

SEJARAH KOTA PADANG

Disusun oleh :

Drs. Mardanas Safwan : Ketua
Drs. Ishaq Taher : Anggota
Drs. Gusti Asnan : Anggota
Drs. Syafrizal : Anggota

1

in
riwisata

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL
J A K A R T A
1 9 8 7

Milik Depdikbud
Tidak diperdagangkan

SEJARAH KOTA PADANG

Disusun oleh :

Drs. Mardanas Sofwan	: Ketua
Drs. Ishaq Taher	: Anggota
Drs. Gusti Asnan	: Anggota
Drs. Syafrizal	: Anggota

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL
JAKARTA

1987

SEJARAH KOTA PADANG

Dewan ahli :

- | | | |
|---------------------|---|---------|
| Dir. Mandama Sofwan | : | Keira |
| Dir. Harap Yusof | : | Anggota |
| Dir. Ganti Azman | : | Anggota |
| Dir. E. S. Ahmad | : | Anggota |

Penyunting : Ir. Chaniago

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional (IDSN) yang berada pada Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, telah berhasil menerbitkan seri buku biografi dan kesejarahan. Saya menyambut dengan gembira hasil penerbitan tersebut.

Buku-buku tersebut dapat diselesaikan berkat adanya kerjasama antara para penulis dengan tenaga-tenaga di dalam proyek. Karena baru merupakan langkah pertama, maka dalam buku-buku hasil Proyek IDSN itu masih terdapat kelemahan dan kekurangan. Diharapkan hal itu dapat disempurnakan pada masa yang akan datang.

Usaha penulisan buku-buku kesejarahan wajib kita tingkatkan mengingat perlunya kita untuk menantiasa memupuk, memperkaya dan memberi corak pada kebudayaan nasional dengan tetap memelihara dan membina tradisi dan peninggalan sejarah yang mempunyai nilai perjuangan bangsa, kebanggaan serta kemanfaatan nasional.

Saya mengharapkan dengan terbitnya buku-buku ini dapat ditambah sarana penelitian dan keputsaan yang diper-

lukan untuk pembangunan bangsa dan negara, khususnya pembangunan kebudayaan.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penerbitan ini.

Jakarta, Agustus 1987
Direktorat Jenderal Kebudayaan



Prof. Dr. Haryati Soebadio
NIP. 130119123

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN	iii
Daftar Isi	v
PENDAHULUAN	1
BAB I. LINTASAN SEJARAH SAMPAI TAHUN 1950	9
1. Asal Usul Penduduk	9
2. Pertumbuhan administratif kota	15
3. Dinamika pertumbuhan kota	18
4. Komposisi, mobilitas dan pola pemukiman Penduduk	27
5. Pemekaran kota sampai tahun 1950	30
6. Penetapan hari jadi	33
BAB II KOTA PADANG DAN LINGKUNGANNYA	41
2.1. Hubungan dengan daerah pedalaman	41
2.2. Padang sebagai titik pusat komunikasi daerah pedalaman dan kaitannya dengan wawasan nusantara	53
2.3. Problematik	68

BAB III	STRUKTUR KOTA	62
	3.1. Gambaran umum	62
	3.2. Perkembangan urbanisme	67
	3.3. Perkembangan pemukiman	74
BAB IV	PEMERINTAHAN KOTA SEJAK TAHUN 1950	83
	4.1. Gambaran umum mengenai administrasi dan pemerintahan	83
	4.2. Ibukota Propinsi Sumatera Barat	88
	4.3. Pembahagian administratif kota	99
BAB V	PERANAN EKONOMI	110
	5.1. Gambaran umum dan kehidupan sosial ekonomi	110
	5.2. Hubungan ekonomi dengan kota lain	115
	5.3. Pasar dan pusat pertokoan	121
	DAFTAR SUMBER	129
A.	DAFTAR BACAAN	129
B.	WAWANCARA	131
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	132

PENDAHULUAN

Berdasarkan informasi yang diperoleh nama "Padang" kira-kira berarti "suatu dataran yang luas". Sesuai dengan alamnya yang terdiri atas dataran rendah di kelilingi oleh perbukitan yang tidak begitu tinggi dan sebahagian daerahnya berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia.

Sebagian wilayahnya berada dekat pantai dengan ombak yang tidak begitu ganas. Pada daerah ini juga bermuara dua sungai yang penting dan cukup besar yaitu Sungai Batang Arau dan Sungai Batang Kuranji. Dengan demikian kehidupan masyarakat dan pemukimannya tidak dapat dipisahkan dari keadaan alam di sekitarnya.

Berdasarkan bahan dan literatur yang ada, pada zaman Kerajaan Minangkabau di Pagaruyung dengan rajanya yang terkenal Adityawarman, kira-kira abad ke XIV, Padang telah mulai dikenal sebagai kampung pemukiman nelayan. Pada waktu itu kerajaan Aceh sudah berkembang. Mereka sudah berhasil menaklukkan Tiku, Pariaman dan Indrapura. Pedagang-pedagang Tiku dan Pariaman sebelum pergi ke Aceh terlebih dahulu singgah di Padang. Pada waktu itu kedudukan Padang belum penting seperti Pariaman yang waktu itu menjadi tempat kedudukan panglima yang diangkat oleh raja Aceh untuk daerah pesisir Sumatera Barat sekarang.

Pada awal abad ke XIV VOC mulai beroperasi di Indonesia. Mereka memasuki Padang melalui Pulau Cingkuk. Kemudian setelah beberapa tahun mereka mendirikan pula loji-loji di daerah Batang Arau sekarang. Dengan demikian daerah pemukiman juga berkembang menjadi wilayah di Muara Padang sekarang.

Mulai saat itu Belanda mulai menempatkan pejabat-pejabat dagangnya sekaligus membangun gudang-gudang untuk menumpuk barang-barangnya sebelum dikapalkan melalui pelabuhan Muara Padang.

Dari informasi yang diperoleh ternyata Belanda dari tahun-ketahun terus meningkatkan kegiatannya, sehingga pada akhir zaman VOC tahun 1799, Padang sudah merupakan pelabuhan terpenting di pantai Barat pulau Sumatera. Padang mulai menjadi tempat pemusatan penduduk yang berdatangan dari kampung-kampung sekitarnya dan mencari hidup dari kegiatan perdagangan Belanda tersebut.

Di samping Belanda, pedagang-pedagang bangsa Barat lainnya juga ada yang singgah di Padang. Sebagian dari mereka adalah orang Inggeris, Perancis dan Portugis. Kemudian diikuti oleh bangsa Cina. Dengan demikian daerah baru ini bukan hanya dihuni penduduk asli juga sejumlah orang asing. Dari satu perkampungan nelayan, Padang berubah menjadi pelabuhan dagang internasional.

Setelah VOC dibubarkan dan wilayah Hindia Timur menjadi koloni Belanda, maka fungsi kota ini berubah pula menjadi tempat kedudukan residen atau kepala pemerintahan untuk daerah Sumatera Barat. Dari Padang lah diatur penyerbuan-penyerbuan ke daerah-daerah lain di Sumatera Barat.

Pada saat bersamaan kebencian dan perlawanan rakyat terhadap kekuasaan Belanda mulai kelihatan. Pada awal abad ke XIX, tepatnya pada tahun 1821 perjuangan rakyat meledak dengan pecahnya Perang Paderi. Sampai abad ke 20 Padang tidak saja menjadi pusat perdagangan dan pelabuhan, juga menjadi pusat pemerintahan Belanda untuk Sumatera bagian Barat.

Kehidupan kota memperlihatkan ciri tersendiri dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Sumatera Barat.

Dengan suatu ordonantie 1 Maret 1906 yang mulai berlaku tanggal 1 April 1906 ditetapkan bahwa Padang menjadi *gemeente* dan mempunyai *gemeenteraad*. Anggota *gemeenteraad* tersebut terdiri dari 13 orang bangsa Eropa, 2 orang Timur Asing dan 4 orang Bumiputera, diketuai langsung oleh Residen Padang dan sekitarnya. Pemerintahan tingkat terendah yaitu onder distrik dapat diangkat kepalanya dari golongan Bumiputera, sedangkan untuk golongan lainnya diangkat kepala-kepala kelompok masing-masing dengan bermacam tingkat dan jabatan.

Tahun 1928 dengan *staatsblaad* Nomor 560 tahun 1916, Gubernur Jenderal Belanda di Batavia untuk pertama kali mengangkat seorang *burgemeester* atau walikota untuk kota Padang dan langsung di bawah Residen Sumatera Barat.

Dalam masa pendudukan Jepang, kota Padang diperluas dengan memasukkan : Ulak Karang, Andalas Marapalam, Seberang Padang, Teluk Bayur, Bukit Air Manis, dan Gunung Pangilun.

Setelah Indonesia memproklamkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, Padang menjadi sebuah kota-praja, dengan walikota yang pertama Abu Bakar Jaar SH dan didampingi oleh Komite Nasional yang bertindak sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan undang-undang Nomor 1 tahun 1945.

Kemudian setelah Abu Bakar Jaar SH ditarik menjadi Residen Sumatera Utara maka sebagai gantinya diangkat Bagindo Aziz Chan. Sebagian wilayah kota kemudian diduduki pasukan Sekutu (Inggris-Belanda) dan menjadi kota ini sebagai baris untuk penerapan penyerangan kota-kota lainnya di Sumatera Barat.

Dengan ditanda tangannya perjanjian Konperensi Meja Bundar Padang menjadi kota otonom di bawah pemerintahan Provinsi Sumatera Tengah melalui Ketetapan Gubernur

Propinsi Sumatera Tengah tanggal 15 Agustus 1950 Nomor 65/GP-50.

Dengan adanya ketetapan Gubernur Sumatera Tengah tersebut daerah kota Padang diperluas lagi. Kewedanaan Padang dihapuskan dan urusannya diserahkan kepada walikota. Untuk menampung urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh wedana, dibentuklah bahagian pemerintahan umum dan seksi politik pada Kantor Walikota Padang yang diselenggarakan oleh petugas Pamongpraja yang diperbantukan.

Setelah itu daerah resort administratif Kepala Kampung pun dibentuk yang terdiri atas 13 Kepala Kampung dengan Surat Keputusan DPRDS Kota Padang tanggal 12 Pebruari 1954 Nomor 2/IPR/54 yang disahkan oleh Pemerintah Daerah Sumatera Tengah dengan ketetapannya tanggal 1 Juli 1954 Nomor 257/IPDS/1954.

Selanjutnya daerah administratif tersebut dibagi lagi menjadi tiga daerah resort kecamatan yang dikepalai oleh Asisten Wedana yaitu Kecamatan Padang Barat, Kecamatan Padang Timur dan Kecamatan Padang Selatan. Pembahagian resort kecamatan ini berdasarkan keputusan Walikota Padang tanggal 19 Maret 1951 Nomor 20/UP.

Untuk memenuhi ketentuan undang-undang Nomor 22 tahun 1948 tentang Pemerintah Daerah, maka di kota Padang dibentuk dan dilantik pula anggota DPRDS yang berjumlah 22 orang dan terdiri dari wakil partai politik, agama dan beberapa lainnya. Hal ini ditetapkan oleh Gubernur Sumatera Tengah tanggal 15 Agustus 1950 Nomor 65/GP/50. Ketentuan tentang daerah otonom menurut undang-undang Nomor 22 tahun 1948 untuk kota Padang ditetapkan dengan undang-undang Nomor 9 tahun 1956.

Pada waktu terjadi pergolakan tahun 1958, kota Padang menjadi pusat, kegiatan politik dan membawa satu aparat pemerintahan daerah, hingga pada waktu terjadi APRI men-darat tanggal 17 April 1958 pemerintahan kota Padang menjadi vakum.

Untuk mengkonsolidasi dan membangun kembali pemerintahan di Sumatera Barat dengan Surat Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia tanggal 19 Maret 1958 Nomor 174/PM/1958 dibentuk sebuah misi di bawah pimpinan wakil Perdana Menteri Hardi yang terkenal dengan misi Hardi. Berdasarkan petunjuk misi ini dibentuk kembali pemerintahan Kotapraja Padang dan kemudian dikukuhkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat tanggal 19 Mei 1958 Nomor 1/G/PD.

Mengikuti isi keputusan-keputusan tersebut maka Walikota dalam menjalankan tugasnya dibantu 5 orang Badan Penasehat yang diambil dari unsur-unsur masyarakat. Pengangkatan Badan Penasehat ini berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat tanggal 28 Juni 1958 Nomor UP/22/GSB-1958.

Berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 6 tahun 1959 sebagai kelanjutan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 untuk kembali ke Undang Undang Dasar 1945 maka pemerintahan daerah pun disesuaikan pula. Dalam hal ini dilakukan dengan cara:

- Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tanggal 4 Desember 1959 No. UP/15/1959 mengangkat pejabat Walikota waktu itu menjadi Walikota Kepala Daerah Padang.

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Sumatera Barat tanggal 23 September 1961 No. 11/SP/BPH/61 mengangkat 4 orang anggota BPH Kota Padang atas dasar instruksi Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 2 menurut Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959. Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Sumatera Barat tanggal 23 April 1962 No. 2/SP/DPRD/62 tentang pembentukan DPRD-GR Sekretariat Padang. Anggota DPRD-GR ini berjumlah 15 orang terdiri dari golongan politik dan karyawan dan ketuanya adalah Walikota Padang. Maka dengan demikian telah lengkap Lemöaga

Pemerintahan Kotaparaja Padang menurut Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 yaitu:

- Kepala Daerah dibantu oleh BPH
- DPR-GR

Kemudian dengan keluarnya Undang-Undang No. 18 tahun 1965, maka Kotapraja Padang dirobah menjadi Daerah Tingkat II Kotamadya Padang. Sejak 1959 sampai 1979 atau selama ± 20 tahun, sejak ditetapkannya Padang sebagai ibukota Propinsi Sumatera Barat, terlihat perkembangan yang pesat. Hal ini seiring dengan kebijaksanaan untuk memperluas wilayah administratifnya.

Didahului dengan Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1979 maka Kota Padang menjadi ibukota Propinsi Sumatera Barat.

Kecuali sebagai Ibukota propinsi, kota ini juga merupakan kota pelabuhan yang cukup penting di sebelah barat pantai Sumatera, kota dagang, dan tentu saja sekaligus sebagai kota pendidikan. Perluasan fungsi juga menuntut perluasan wilayah.

Atas persetujuan Gubernur Sumatera Barat dan DPRD Padang Pariaman, maka perluasan kota dapat dilakukan, dan kemudian dikukuhkan pula dengan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1980.

Saat ini Kotamadya Padang memiliki kecamatan sebagai berikut: Kecamatan Padang Selatan, Padang Barat, Padang Utara, Padang Timur, Koto Tengah, Nanggalo, Kuranji, Pauh, Lubuk Kilangan, Lubuk Begalung dan Kecamatan Bungus/Teluk Kabung. (lihat lamp 1,2, dan 3)

Dari sumber yang dapat ditemui diperoleh keterangan bahwa penduduk kota berasal dari Pagaruyung. Gerakan migrasi ini mulai bergerak ke Banuhampu di Kabupaten Agam sekarang. Kemudian dari sini proses ini mengarah ke Panyinggahan. Dengan melalui perbukitan yang terdapat antara Solok dan Padang, maka gelombang migrasi ini kemudian mende-

kati wilayah yang sekarang disebut sebagai Kecamatan Padang Timur atau "Kampung Durian".

Setelah bermukim beberapa lama, mereka mulai menyebar dari Kampung Durian ini ke beberapa wilayah di sekitarnya. Mula-mula ke Parak Laweh, terus ke Air Camar, Parak Gadang dan ke Seberang Padang. Dengan demikian pemukiman baru mulai terwujud. Sebagian dari mereka adalah cikal penduduk kota saat ini.

Penduduk yang bermukim di Kampung Seberang Padang kemudian menyebar lagi ke beberapa kampung lainnya, seperti ke Kampung Dobi, Pulau Karam, Kampung Alang Laweh dan ke Lolong. Menurut catatan, 1560 ditemui nama Datuk Sanggumo Dirajo. Mungkin datuk ini yang meneruskan tradisi adat Pagarugung di permukaan baru ini.

Gelombang migrasi lainnya muncul dari arah solok sekarang. Mereka menempati beberapa daerah yang sekarang dikenal sebagai Kecamatan Lubuk Begalung, Kuranji dan Pauh, Bungus/Teluk Kabung dan Kecamatan Lubuk Kilangan.

Penduduk yang bermukim di daerah perkampungan Kecamatan Lubuk Begalung ini pada mulanya berasal dari daerah X Koto Di Atas, X Koto Di Bawah, Kubung Tiga Belas dan dari Bandar Sepuluh. Migrasi ini bergerak dari Solok ke Selayo, Belimbing, Gantung Ciri, Bandar Sepuluh, Taratak, Sungai Lundang dan Siguntur, barulah turun wilayah yang sekarang.

Yang berasal dari Gantung Ciri terus ke sebuah bukit di Lubuk Begalung atau yang disebut Bukit Tunggu. Disebut demikian karena bukit tersebut adalah tempat menunggu kaum kerabatnya untuk meneruskan perjalanan. Daerah ini terelak antara Gantung Ciri dengan Limau Manis.

Sedangkan yang datang dari Kubung Tiga Belas menempati daerah pinggiran Batang Arau atau Lubuk Kilangan. Dari sini mereka berpecah, sebahagian menempati Nagari Nan XX sekarang dan sebahagian lagi tinggal di Lubuk Kilangan.

Demikianlah penduduk Pauh dan Bungus/Teluk Kabung, sekarang sebagian berasal dari Solok. Penduduk di sini pada

umumnya berasal dari suku Tanjung, Melayu dan suku Caniago. Di samping itu ada diketemukan pula suku Jambak dan Koto. Sedangkan yang bergerak ke Teluk Kabung adalah suku Melayu, Caniago, Tanjung Koto Piliang dan suku Lambak. Orang yang terkenal berjasa membangun Negari Teluk Kabung ini adalah Rajo Managan, Rajo Indo, Paranji Aceh dan Katik Manyalan.

Sebagaimana telah diungkapkan di atas bahwa penduduk yang mula-mula membuka daerah pemukiman baru di Kuranji adalah nenek moyang yang berasal dari Kubung Tiga Belas Solok. Menurut cerita mereka datang ke daerah ini sebanyak 14 suku. Kelompok 14 ini dapat dikelompokkan dalam dua bahagian, yaitu satu kelompok terdiri dari 7 suku bermigrasi ke Pauh IX dan menetap di sana, sedangkan kelompok yang kedua bermukim di daerah Pauh V sekarang.

Lain halnya penduduk yang mula-mula datang dan membuka pemukiman baru di daerah Kecamatan Padang Utara, seperti Kampung Alai Gunung Pangilun. Penduduk di sini sebagian berasal dari Singkarak, Saningbakar, Sumani, Malalo dan Bayang di Pesisir Selatan.

Pada mula pemukiman baru ini membentuk *Taratak*, kemudian *Koto*, kemudian berkembang menjadi Nagari. Lama-kelamaan penduduk koto bertambah banyak maka terjadilah Kampung Alai Gunung Pangilun Padang sekarang.

Selain pendatang Eropa dan penduduk dari daerah pesisir yang menempati daerah sekitar Batang Arau atau Muara, pada mulanya juga dikenal pendatang-pendatang yang berasal dari daerah Sumatera Barat sendiri dan membuka daerah-daerah perkampungan dan di beberapa tempat di dalam wilayah Kota. Dengan demikian penduduk kota ini sebagian besar berasal dari pedalaman.

BAB I

LINTASAN SEJARAH SAMPAI TAHUN 1950.

1.1. Penduduk.

Kapan Padang mulai didiami oleh penduduk tidak diketahui dengan pasti. Dari tambo dan hasil wawancara diperoleh informasi bahwa penduduk yang mula-mula datang ke Padang berasal dari arah timur, yakni dari Kubung XIII daerah Solok. Migrasi itu berlangsung sekitar abad ke 19, melalui jalan setapak lewat pegunungan sebelah Timur kota Padang. Migrasi itu terjadi secara bergelombang. Cerita tambo ini agaknya dapat diperkuat oleh tulisan Christine Dobbin yang menyatakan telah adanya route perdagangan emas pada tahun 1347 antara Padang dengan pedalaman Minangkabau. Route tersebut adalah sebagai berikut: Suruaso dekat Pagaruyung, Lima Kaum Parangan, Batipuh, Pitalah, Sumpur, Simawang. Dari Simawang perjalanan diteruskan dengan menyiar tepi danau Singkarak ke Sumani atau ke Saningbakar. Dari Sumani atau Saningbakar perjalanan diteruskan melalui jalan darat ke Solok. Dari Solok dengan melintasi Bukit Barisan perjalanan akan sampai ke Limau Manis, Pauh dan Bandar Padang. Jalan perdagangan emas dari Solok ke Padang sama dengan jalan migrasi dari Solok ke Padang pada abad ke 14. Suku yang turun ke

Padang ialah Tanjung, Jambak, Sikumbang, Guci, Melayu, Koto dan Balai Mansiang. Migrasi yang pertama sampai ke Cubadak Tiga Tupang dekat Ladang Sibirin di kaki bukit barisan yang terletak sebelah Timur dari daerah Gadut sekarang.¹⁾ Dari Cubadak Tiga Tupang inilah migrasi ini meneruskan perjalanannya dan menetap di Camin Taruih atau Cermin Terus daerah Pauh IX, Koto Tuo daerah Pauh V dan Nagari Nan XX. Dari daerah SaningBakar dekat danau Singkarak, juga terjadi perpindahan penduduk ke Padang. Route yang mereka tempuh ialah dari Saning Bakar dengan melalui kampung Panyinggahan, Gagauan dan Ngalau Urek sampailah mereka ke Koto Tengah. Di sini mereka mendirikan Koto yang pertama dan diberi nama Koto Tuo. Kemudian didirikan Koto yang daerahnya memanjang ke arah pantai yang dinamai Koto Panjang.²⁾ Mereka inilah yang dianggap sebagai pembuka pertama daerah Kecamatan Koto Tengah di Kotamadya Padang sekarang.

Arus migrasi ke daerah Padang makin meningkat, karena yang datang pada gelombang-gelombang berikutnya, bukan hanya pembuka daerah-daerah baru untuk pertanian tetapi juga para pembuat atau pemasak garam dan pedagang-pedagang. Karena nagari semakin ramai dan syarat-syarat berdirinya suatu nagari sudah dipenuhi maka diadakan pembahagian dan susunan pemerintahan nagari. Daerah Pauh dijadikan 2 nagari yaitu Pauh V dan Pauh IX. Selanjutnya berdiri pula Nagari Nan XX dan Nagari Koto Tengah.³⁾ Namun daerah pesisir pantai Barat dengan jarak lebih kurang 5 km dari nagari-nagari yang telah terbentuk tadi belum dibuka sebagai daerah pertanian. Pada kira-kira tahun 1896 daerah pesisir ini mulai dibuka dan dijadikan daerah pertanian dan pemukiman. Sebagai daerah pemukiman pertama di daerah pantai ini ialah Kampung daerah Seberang Padang.⁴⁾

Pemimpinnya tinggal di sebuah rumah yang dikenal sebagai "rumah limo ruang", malah salah satu keluarga di Padang pada akhir abad yang lalu, merasa berasal langsung dari "rumah lima ruang" tersebut.⁵⁾ Dalam perkembangan selanjutnya

berdiri pula Kampung Alang Lawas, Parak Gadang, Sawahan, Pondok, Simping Enam, Kampung Jawa dan Purus sebagai pemukiman baru. Di dalam "Tambo Bermula Asal Kota Padang" yang ditulis oleh Nasrun AS dalam majalah *Padang Gids*, antara lain dikatakan bahwa yang membuka daerah Padang sebagai pemukiman adalah keturunan dari 2 orang anak raja Pagaruyung yang diusir dari Istana Pagaruyung dan diiringi oleh para pengiringnya. Dari Luhak Tanah Datar mereka pergi ke Luhak Agam di Nagari Kurai Banuhampu. Tak lama kemudian, salah seorang anak raja melanjutkan perjalanannya ke Batipuh dekat Padang Panjang. Dua orang dari anak raja yang mendiami Batipuh melanjutkan penjelajahannya ke daerah pesisir Barat Sumatera seperti daerah Batu Tebal, Gasan yang terletak di Kabupaten Padang Pariaman dan daerah Padang. Menurut catatan Rusli Amran mengemukakan bahwa ada 2 teori tentang asal-usul penduduk asli Padang yaitu:

1. Penduduk asli Padang berasal dari Solok-Selayo
2. Penduduk asli Padang berasal dari Luhak Agam⁶⁾

Dari wawancara dengan kaum bangsawan Padang, ada di antaranya yang mengatakan mereka berasal dari Saningbakar Solok dan ada pula yang mengatakan berasal dari Agam.⁷⁾ Menurut cerita-cerita setempat yang dicatat oleh Belanda, yang datang dari Agam ini malah lebih dulu ketimbang yang datang dari Solok-Selayo tadi. Namun yang datang kemudian itu lebih banyak dan lebih besar peranannya, karena yang datang lebih dulu itu dimasukkan ke dalam suku-suku kelompok dari Solok-Selayo. Ini berlainan dari ketentuan adat Minangkabau, tetapi hal ini mungkin saja, karena mereka yang datang dari Solok-Selayo, tentu membawa serta adat dari daerah asal, bersuku dan berpenghulu.⁸⁾

Mengenai pemukiman yang pertama dikatakan, bahwa rombongan yang pertama datang ke Padang, konon menempati Gurun atau padang sebelah kiri Batang Arau yang kemudian terkenal dengan nama Seberang Padang. Pendapat ini diperkuat oleh bukti bahwa mesjid yang pertama di Padang

adalah di Seberang Padang, yang kemudian dipindahkan ke Ganting dengan nama mesjid Ganting. Di sana juga ditemui Gobah dan Kampung Dalam. Di samping ada pula cerita tambo yang mengatakan bahwa pemukiman yang pertama di Padang adalah di Kampung Durian, arah Timur dan bertetangga dengan Kampung Seberang Padang.

Peristiwa itu terjadi pada penghujung abad ke 16, salah seorang putera raja yang memimpin rombongan ke daerah Padang, bernama Sutan Sangguno Dirajo. Di bawah pimpinan Sutan Sangguno Dirajo, Padang semakin ramai dikunjungi oleh pendatang-pendatang baru dari Singkarak, Saningbakar, Selayo dan nagari nagari lain di Kubung XIII Solok.

Untuk menciptakan suatu masyarakat yang aman, tertib dan sejahtera, maka Sutan Sangguno Dirajo mengangkat 4 orang penghulu, yaitu:

1. Datuk Gunung Padang dari Suku Tanjung
2. Datuk Saripado Maharajo dari Suku Sumagek
3. Datuk Mangkuto Dirajo dari Suku Mandaliko
4. Datuk Sari Marajo dari Suku Melayu.

Daerah yang dikepalai oleh Datuk-Datuk tersebut, masih berstatus kampung, sedangkan Sutan Sangguno Dirajo mengepalai Nagari Padang atau orang tuo nagari Padang⁹). Jika terjadi silang selisih antara Penghulu yang berempat itu, penyelesaiannya terletak pada Sutan Sangguno Dirajo.

Dalam perkembangan selanjutnya nagari Padang semakin ramai juga, karena bukan hanya dikunjungi oleh orang-orang Luhak Nan Tigo saja, tetapi juga oleh nagari-nagari yang terletak di pesisir Barat Sumatera Barat. Seiring dengan penambahan penduduk, juga terjadi pembukaan daerah-daerah baru. Untuk mengepalai daerah-daerah baru itu Sutan Sangguno Dirajo mengangkat 4 orang Penghulu lagi, yakni:

1. Datuk Rajo Marah dari Suku Melayu,
2. Datuk Bagindo Sakti dari Suku Jambak,
3. Datuk Lelo Dirajo dari Suku Jambak,
4. Datuk Panduko Amat dari Suku Panyalai.

Dengan demikian terbentuklah "pemerintahan" tradisional nagari Padang yang diperintah oleh "delapan Penghulu" dengan Kepala Nagarinya Datuk Sangguno Dirajo. Sesuai dengan sistem tradisional kerajaan Minangkabau, maka nagari Padang dalam sejarah tradisional Minangkabau disebut "Bandar Padang". Di samping Bandar Padang didiami oleh delapan kaum/suku, yang menetap, juga ada orang yang datang dari pedalaman Minangkabau dan bandar di pesisir Barat Sumatera Barat yang menetap untuk sementara di Padang, karena urusan perdagangan dan lain-lain. Mereka ini dikenal dengan nama "Urang Dagang" dan mempunyai tempat "tepatan" tertentu di daerah Padang.¹⁰⁾ Secara adat, mereka masih terikat pada adat nagari asalnya. Di Padang mereka punya Surau sendiri dan Kuburan sendiri.¹¹⁾ Di samping itu "Urang Dagang" yang datang dari bandar-bandar pesisir Barat Sumatera Barat juga punya tempat tepatan sendiri, yaitu diperkampungan sebelah kiri Batang Arau, sejajar dengan Gunung Padang dekat Muara Padang lebih kurang 2 km dari mulut muara Padang arah ke Timur. Mobilitas penduduk Minangkabau ini meningkat ke berbagai penjuru di Sumatera bagian tengah, karena sejak abad ke 16, permintaan yang terbesar akan lada pada bandar-bandar pantai Barat itu adalah dari China, Gujarat yang akan diekspor ke Eropa.¹²⁾

Karena jaringan perdagangan pantai dan interinsuler, Bandar Padang itu sampai Pulau Tello Kepulauan Nias, maka suku Nias mulai datang sebagai buruh, pengrajin atau pembuat atap rumbia. Kedatangan mereka ke Padang semakin banyak setelah VOC dan pemerintah Belanda menjadikan Padang sebagai pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahannya. Mereka ini menetap dan mendiami daerah tertentu pula di Padang, yang sekarang masih dikenal dengan nama Kampung Nias. Begitu pula orang Keling atau India dan Cina makin banyak datang dan menetap di Padang sejak Belanda menguasai Padang. Orang Keling juga menempati daerah tertentu di kota Padang dengan nama Kampung Keling. Orang Cina

juga menempati daerah tertentu pula yang sekarang dikenal dengan nama Kampung Cina. Kalau masyarakat Nias dikepalai oleh seorang Kepala Kampung yang berasal dari Nias, maka masyarakat Keling dikepalai oleh Kapten Keling serta masyarakat Cina dikepalai oleh Kapten Cina.¹³⁾

Pada tahun 1819, ketika kota Padang dikembalikan oleh Inggris kepada Belanda, tercatat penduduk kota Padang sebagai berikut: 150 orang Eropa, 7.000 orang Melayu, 200 orang Cina, 200 orang India atau Keling, 1.000 orang Arab dan Asia lainnya, 1.500 orang Nias. Walaupun orang Arab termasuk jumlah yang relatif banyak dibandingkan dengan bangsa-bangsa lainnya di Padang, namun kita tidak menemui suatu kampung Arab. Berbeda dengan suku Jawa yang datang kemudian dibawa Belanda ke Padang sebagai serdadu, pekerja dan buruh serta lain-lainnya, mereka juga mempunyai pemukiman tersendiri dengan nama Kampung Jawa. Bahkan Pasar yang terletak sebelah Timur dan berdekatan dengan Kampung Jawa disebut Pasar Jawa yang sekarang bernama Pasar Raya Kotamadya Padang. Dahulunya bahkan sampai sekarang masih ada penduduk Padang yang akan berbelanja ke Pasar Raya, menyebutnya ke Kampung Jawa, menurut dialek daerah *Kampung Jawo*.

Aceh di bawah pimpinan Panglima Nanda pernah menaklukkan Padang dan menguasai perdagangan bandar Padang. Walau pun Aceh mempunyai pengaruh ekonomi – politik dan sosial budaya selama berpuluh-puluh tahun dalam abad 17, namun mereka tidak mempunyai tempat pemukiman yang berlanjut sampai sekarang. Begitu pula dengan orang-orang Eropa, terutama orang Belanda pada tahun 1665 telah membuka loji dan menetap di Padang. Dalam suatu catatan ditulis bahwa saat Perancis akan menyerang Padang pada tanggal 7 Desember 1793, Von Erack penguasa VOC di Padang minta bantuan ke Batavia untuk melindungi sebanyak 184 jiwa orang Eropa yang menetap di kota Padang.¹⁴⁾ Pemukiman orang Eropa ini terdapat pada pinggir kiri dan kanan Batang

Arau yang sekarang dikenal dengan nama Kampung Muara Padang. Sama halnya dengan orang Aceh sebagai suatu kerajaan yang pernah menguasai Padang, setelah kekuasaannya berakhir, maka pada umumnya mereka meninggalkan Padang, yang tinggal hanya keturunan mereka sebagai hasil perkawinan mereka dengan wanita-wanita pribumi maupun Timur asing.

Penduduk asli atau pribumi pada mulanya suatu kaum atau suku yang mendiami daerah tertentu yang dikepalai oleh seorang Penghulu. Kesatuan daerah yang didiami oleh suatu kaum itu disebut "Kampung". Pada masa sistem pemerintahan tradisional terdapat delapan kampung dan dipimpin oleh delapan Penghulu, maka pola pemukimannya adalah "mengelompok". Walaupun demikian "tanah pusaka kaum" bisa saja terletak di luar kampungnya. Kepada pendatang dan pemukim yang baru seperti Cina, India, Nias dan Bugis diberikan sebidang tanah untuk pemukiman mereka. Pola pemukiman mereka ini juga mengelompok. Di kota Padang sampai sekarang masih ada Kampung Cina, Kampung Keling atau India, Kampung Nias dan Kampung Jawa.

1.2. Pertumbuhan Administratif kota.

Setelah melalui berbagai pertimbangan dan diskusi pada tanggal 31 Juli 1866 DPRD Kota Padang menyetujui dengan suara bulat, tanggal 7 Agustus 1866 sebagai hari jadi Kota Padang.¹⁵⁾ Secara resmi Pemerintah Hindia Belanda mendirikan administrasi kota pada tahun 1906, yang kemudian dikenal sebagai *Gemense* Padang. Penumbuhan *Gemense* Padang didasarkan pada artikel 1 Ordonantie, 1 Maret 1906 dan tercantum dalam lembaran Negara atau Staatsblad No. 151, Keputusan ini baru dijalankan sejak 1 April 1906. Jabatan Wali Kota atau *Burgemeester* Padang dirangkap oleh Assisten Residen. Dalam rangka mewujudkan modernisasi pemerintahan Hindia Belanda perlu diwujudkan Desentralisasi, maka untuk itu pemerintah membentuk *Local Raaden* atau Dewan Daerah. Berdasarkan artikel 7 Ordonantie tanggal 1 Maret 1906 ter-

cantum dalam Lembaran Negara Staatsblad 151 tahun 1906, maka Gemeente Padang mulai membentuk Local Raaden yang bernama *Gemeente Raad Van Padang*. Anggota Dewan ini berjumlah 19 orang yang terdiri dari : 13 orang Eropa, 4 orang Indonesia dan 2 orang Timur Asing. Jabatan Ketua Gemeente Raad Van Padang ini dirangkap oleh Asisten Residen.

Pada tahun 1917 jumlah anggota Gemeente Raad Van Padang dikurangi menjadi 17 orang. Dalam ordonantie tanggal 25 Maret 1917 yang dimuat dalam Staatsblad No. 587 ditetapkan bahwa jumlah anggota Gemeente Raad Van Padang sebanyak 17 orang dengan konposisi sebagai berikut: 10 orang dari golongan Eropa, 5 orang dari bumi putera dan 2 orang dari golongan Timur Asing. Sejak tahun 1917 anggota-anggota Dewan dipilih. Keadaan seperti ini berlangsung sampai Jepang menduduki kota Padang pada tahun 1942.

Dalam rangka penyempurnaan pemerintah Kota Padang dan menampung masalah yang timbul sebagai akibat perkembangan kota, maka dirasa perlu kota Padang dikepalai oleh seorang Walikota atau Burgemeester tanpa jabatan rangkap dalam bidang eksekutif. Pada tanggal 7 Agustus 1920 diangkatlah Burgemeester yang pertama untuk kota Padang. Mulai tanggal 7 Agustus 1928 Gemeente Padang langsung di bawah Departemen *Binnelands Bestuur* atau BB sebagai bahagian dari Desentralisasi. Sejak tahun 1928 di samping Kepala Daerah, Burgemeester juga diangkat Ketua Gemeente Raad Van Padang.

Dengan terbentuknya Provinsi Sumatera tahun 1936, Status dari Gemeente Padang berada dan berhubungan langsung dengan Gubernur Sumatera di Medan. Dua tahun kemudian yakni tahun 1938 Gemeente Padang menjadi *Staatsgemeente* yang berdasarkan Staatsblad tahun 1938 No. 357. Keputusan ini mulai berlaku tanggal 1 Juli 1938. Keadaan seperti ini berlaku sampai bulan Maret 1942. Setelah Jepang menduduki kota Padang, maka Gemeente Padang diperintah "*Padang Sityo*" yang statusnya berada di bawah *Syuyokan* Sumatera Barat.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 sampai tahun 1946 pemerintah RI belum berhasil menyusun suatu pemerintahan sipil di kota Padang. Pada masa ini Padang diwarnai oleh suasana revolusi. Pengambil alihan kantor pemerintah militer Jepang, perusahaan-perusahaan dan gudang-gudang pemerintah Jepang, kantor polisi, penyerbuan dan perampasan terhadap gudang senjata menimbulkan bentrokan senjata dengan NICA dan Pasukan Sekutu atau Inggris yang datang ke Padang untuk melucuti tentara Jepang, tetapi kemudian berubah menjadi pendudukan! Di samping itu masyarakat juga membentuk BKR, Lasykar Rakyat, Organisasi Pemuda guna menunjang revolusi. Pada tahun 1946 Pemerintah RI di Sumatera Barat atau Keresidenan Sumatera Barat berhasil mengangkat Mr Abu Bakar Jaar sebagai Wali Kota Padang yang pertama. Dalam menjalankan pemerintahan Wali Kota Padang dibantu oleh KNI Cabang Padang yang dibentuk pada tahun itu juga.

Jabatan Walikota ini tidak lama dipegang oleh Mr Abu Bakar Jaar, karena ia dipindahkan ke Pematang Siantar Sumatera Utara. Pada bulan Mei 1946 Bagindo Aziz Chan menjadi Walikota kedua menggantikan Mr Abu Bakar Jaar. Beliau mengalami berbagai intrik, tekanan dan ancaman bahkan kemudian Bagindo Aziz Chan dibunuh secara keji oleh tentara Belanda di daerah Nanggalo – Kandis, daerah pinggir kota (20 Juli 1947). Mulai saat itu Pemerintahan kota dipindahkan ke Padang Panjang di bawah pimpinan Said Rasad sebagai Walikota ketiga.

Bulan September 1947, NICA kemudian mengangkat Dr. A. Hakim dari golongan Federal sebagai Walikota Padang yang baru. Di samping itu juga dibentuk Gemeente raad Van Padang yang anggotanya ditunjuk sebanyak 17 orang. Komposisinya terdiri dari 7 orang Indonesia, 5 orang Belanda dan 5 orang Timur Asing. Keadaan seperti ini berlangsung sampai tahun 1950.

Setelah pengakuan kedaulatan RI oleh Belanda tanggal 27 Desember 1949, Gemeente Padang berubah menjadi Kota-

praja Padang dengan Acting Walikota Dr. Rasyidin. Perubahan ini didasarkan pada Ketetapan Pemerintah Propinsi Sumatera Tengah No. 65/Gp. 50. Gemeente raad Van Padang dinyatakan non-aktif sampai terbentuknya Dewan Kotapraja Kota Padang yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 39/1950. Pada tanggal 14 Oktober 1950 dibentuk Panitia Penyelenggara Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Sementara Kota Padang. Pemilihan baru dilaksanakan pada akhir Januari 1951. Sebanyak 19 orang anggota berdasarkan pemilihan dan 3 orang atas angkatan pemerintah. Kesembilan belas orang anggota yang dipilih merupakan wakil-wakil partai dan organisasi sosial.

1.3. Dinamika Pertumbuhan Kota.

Informasi mengenai pertumbuhan kota Padang, sebagian diterima setelah Belanda menjadikan kota Padang sebagai pusat kegiatan perdagangan dan militer di pantai barat Sumatera. Sebelum periode ini sebagian informasi diperoleh dari sumber-sumber tambo, dan cerita-cerita lisan. Salah satu sumber tersebut mengatakan bahwa kegiatan pemerintahan tradisional diadakan di "Rumah lima ruang" yang terletak di Seberang Padang, yaitu sebelah kiri Batang Arau. Tidak jauh dari "rumah lima ruang" arah ke tepi Batang Arau berdiri mesjid yang pertama. Setelah kota ini berkembang ke daerah sebelah kanan Batang Arau, mesjid ini dipindahkan ke Ganting. Sampai sekarang masih bernama Mesjid Raya Ganting. Karena kota makin lama makin ramai dikunjungi oleh pedagang-pedagang dari pedalaman maka kegiatan perdagangan pada mulanya terjadi di sebelah kanan Batang Arau dekat muara Batang Arau. Pasar dinamai Pasar Baru karena orang berjual-beli di daerah yang banyak pakan baru. Karena kegiatan perdagangan di Pasar Baru tidak lagi memenuhi syarat maka 1905 dipindahkan ke Timur, lebih kurang 750 m dari Pasar Baru. Pasar ini dinamai Pasar Gadang, karena berada di bawah pohon gadang atau pohon besar. Rusli Amran

dalam "Padang Riwayatmu Dulu" menyebutnya pasar di "hilir"¹⁶). Namun penduduk Padang sampai sekarang menyebutnya Pasar Gadang. Pasar bertetangga dan sebelah Timur Pasar Gadang dinamai "Pasar Mudik" baik oleh Rusli Amran maupun oleh penduduk.

Namun ketika Aceh melebarkan sayapnya ke daerah-daerah pantai Barat Sumatera sejak akhir abad ke 16, Padang sudah merupakan kota dagang, tidak saja dijalankan dengan daerah pedalaman, tetapi rakyat setempat juga berdagang dengan orang-orang luar seperti: Jawa, India, Arab, Cina dan Aceh.¹⁷)

Hingga akhir abad ke 18 wilayah kota Padang hanya sekitar daerah Batang Arau, Kampung Cina, Pasar Gadang atau Pasar Hilir, Pasar Mudik, Palinggam dan daerah pinggir laut. Sisanya merupakan hutan dan tanah rawa. Sejak dekade ketiga abad 19 pertumbuhan wilayah kota lebih banyak ke arah utara. Perkembangan ini terjadi setelah De Stuers tanggal 22 September 1829 memutuskan bahwa barang siapa membuka tanah, dia menjadi pemilik yang sah, walaupun tanah itu kepunyaan kaum Bodi Caniago maupun Koto Piliang.¹⁸) Pada Pelita I, II, III dan IV pertumbuhan kota ini tidak saja ke Utara tetapi juga ke Timur.

Walaupun kegiatan perdagangan terjadi di daerah sekitar muara Batang Arau, namun kapal-kapal yang relatif berukuran besar tidak dapat berlabuh di Batang Arau, kecuali perahu, biduk dan kapal berukuran kecil. Kapal-kapal layar yang berukuran samudera dan kapal-kapal api berlabuh di pantai Timur pulau Pisang Gadang. Di sini berdiri 3 buah dermaga, bedeng, barak prajurit dan perwira, rumah sakit yang sederhana, gudang batu bara, kuburan dan tiang setinggi 20 meter yang berfungsi memberi tanda. Dari pulau Pisang Gadang inilah para penumpang dan barang-barang dibawa dengan perahu dayung dan kapal ke Muara Padang. Di tepi Batang Arau terdapat sebuah dermaga kecil tempat turunnya penumpang. Setelah naik ke darat penumpang melewati jembatan kecil. Di sebelah kanan

jembatan ini berdiri kantor polisi dan di sebelah kanannya gedung Zeni. Di sebelahnya berdiri lima buah gudang kopi yang besar dan panjang.

Tidak jauh dari kantor di daerah pelabuhan ini terdapat kantor Pekerjaan Umum atau BOW dan beberapa gedung serta kantor swasta.

Di samping itu terdapat pula gedung besar berdinding tebal dan tinggi yang berfungsi sebagai gudang persenjataan.

Masih di dekat Muara, di tepi Batang Arau arah ke Timur dari pelabuhan terdapat gedung besar milik N.H.M. atau *Nederlandsch Handels Maatschappij* serta kantor-kantor kecil milik perusahaan swasta. Sejak awal abad ke 20 di sekitar gedung ini berdiri kantor-kantor dagang swasta besar seperti Houten, Steffan, Guntzel & Schumacher, Veth, Geo Wöhry, Yacobson Van den Berg, Tels & Co, Internatio dan lain-lain.

Tidak jauh dari gedung NHM terdapat sebuah taman bunga De Greve. Di sini juga terdapat sebuah tugu kecil untuk memperingati Ir. De Greve, orang yang menemukan tambang batu bara Sawahlunto. Lapangan ini terletak di pinggir kanan Batang Arau, sekarang berdiri pompa bensin. Lapangan ini dihubungkan oleh sebuah jalan sekarang Jalan Nipah) dengan pantai. Di sebelah kirinya berdiri gudang-gudang pemerintah, untuk menimbun hasil bumi. Di sebelah kanan gudang gudang ini terletak kantor-kantor De Javasche Bank. Kantor ini kemudian dijadikan kantor pajak. Sedangkan De Javasche Bank yang baru didirikan di seberang kantor lama. Di sebelah kantor pajak ini menghadap ke lapangan De Greve, terletak kantor Gubernur dan di sebelahnya lagi kantor lelang. Di belakang kantor Gubernur terdapat rumah penjara lama dan di belakang penjara berdiri rumah sakit khusus bagi "orang rantai" atau narapidana yang bekerja paksa.

Di tepi Batang Arau bagian timur penjara lama, beberapa abad yang lalu berdiri sebuah loji VOC yang terbesar. Di dalam loji inilah tinggal pimpinan VOC termasuk para

pegawainya. Sekitar tahun 1781 loji ini dihancurkan Inggeris sewaktu mereka menduduki kota Padang.

Di simpang Jalan Nipah, berbelok ke kiri arah ke muara ditemui penginapan "Hotel Padang" dan "Hotel Sumatera" yang semuanya menghadap ke laut. Di bekas bangunan "Hotel Sumatera" sekarang berdiri penjara baru atau Rumah Penjara Muara. Apabila berbelok ke kanan dari simpang Jalan Nipah arah ke Utara, ditemui sebuah gedung besar terbuat dari kayu tempat tinggal Gubernur, sebelum pindah ke Belantung yang sekarang bernama Jalan Sudirman. Di bagian depan sebelah kanan gedung ini terdapat sebuah kantor peradilan sebelum didirikan Pengadilan Tinggi yang baru. Setelah rumah Gubernur pindah ke Belantung, di atas tanah bekas rumah Gubernur itu didirikan "Hotel Oranye" sekarang Hotel Muara. Selain "Hotel Oranye" di daerah ini terdapat pula sebuah hotel lagi yakni "Hotel Aceh".

Perlu diketahui bahwa kira-kira pertengahan abad ke 19 sebelum hotel-hotel tersebut didirikan telah ada semacam pension atau pasangerahan bernama "de Chevalier" dekat muara Batang Arau, sekarang bernama Muara Padang.

Dari simpang tiga Jalan Nipah, ke kanannya menyusur pantai ada sebuah jalan sampai ke Ujungpandan dan ke kirinya bersambung dengan Jalan Muara. Di sebelah kanan jalan ke Ujung Pandan itu ditemui kantor pos yang kemudian dijadikan kantor Polisi. Tepat di depan kantor ini terdapat kantor perwalian Weeskamer. Masih di jalan ini arah ke Utara dekat pantai terdapat depot penyimpanan minyak tanah, tempat ini nantinya dijadikan tanah lapang sebagai tempat berlatih menembak atau lapangan Dipo sekarang Taman Budaya Padang.

Arah ke Timur dari Lapangan Dipo tersebut di atas sebelah kanannya terdapat lapangan Michiels. Di lapangan Michiels berdiri sebuah tugu terbesar yang pernah didirikan Belanda di Sumatera, sekarang bernama "Taman Melati". Sebelumnya di lapangan ini semenjak abad ke 18 berdiri gereja

Protestan, terkenal dengan nama Koepel kerk. Pada tahun 1885 gereja ini dipindahkan ke Jalan Benteng yang sekarang bernama Jalan Bagindo Aziz Chan. Di Utara lapangan Michiels terdapat gedung Pengadilan Negeri, dulu Raad Van Justitie. Gedung ini mulai digunakan kira-kira tahun 1833. Di belakang gedung ini terdapat tangsi tentara. Jalan yang terdapat di belakang tangsi tersebut sampai sekarang tetap bernama Jalan Belakang Tangsi. Di sudut Belakang Tangsi dan Jalan Dipo terdapat Sekolah Rakyat. Dalam perkembangan selanjutnya di sebelah Timur Jalan Belakang Tangsi pemerintah Belanda mendirikan "Mesjes School" atau Sekolah Kepandaian Putri. Kantor Demang dan Rumah Pajak Gadai. Di sini juga terdapat gedung-gedung "Loge Matahari". Sebelum Perang Dunia II gedung ini dipakai untuk Perguruan Gumanti, sedangkan "loge"-nya dipindahkan ke Jalan Belantung. Dalam perkembangan kota Padang, Belantung makin penting, lebih-lebih setelah rumah Gubernur dibangun di daerah Belantung.

Dari perapatan Jalan Belakang Tangsi sebelah Selatan, ada jalan yang membujur ke Timur yang bernama Jalan Raaf atau Raafweg, sekarang bernama Jalan M. Yamin. Di pojok Jalan Raaf dan Jalan Benteng berdiri sebuah gedung batu untuk tangsi militer yang kemudian dijadikan penjara militer. Penjara lama di Gurun tidak dipakai lagi. Kemudian penjara militer di Jalan Benteng dijadikan Kantor Polisi dan Reserse yang sekaligus berfungsi sebagai penjara. Gedung ini sekarang berfungsi sebagai Kantor Polisi Kotamadya Padang. Di dekat gedung ini berdiri sebuah Pabrik Es.

Di sisi Timur Plein Van Rome yang sekarang lapangan Imam Bonjol terdapat sebuah jalan melintang dari Utara ke Selatan yang bernama Societeitsweg atau Jalan Rumah Bola, (sekarang bernama Jalan Bagindo Aziz Chan). Di jalan ini pada sisi timurnya terletak rumah bola atau Gedung pertemuan yang tertua di kota ini. Yang hampir sama tuanya dengan Rumah Bola di Societeitsweg ialah rumah bola "Een-

dracht" yang dipakai sejak tahun 1847.¹⁹). Karena rumah bola merupakan tempat yang disenangi oleh Belanda baik sipil maupun militer, maka dengan bertambah banyaknya orang Eropa tentu bertambah pulalah jumlah rumah bola. Dalam rangka itu didirikan lagi sebuah rumah bola "Burger Societeit" di Belantung Kecil, sekarang bernama Jalan Ahmad Yani, khusus untuk orang sipil. Pada tahun 1898 rumah bola ini dipindahkan ke tempat di depan depot minyak tanah di tepi laut yang telah kita sebutkan. Namanyapun berubah menjadi *Societeit Oras Genoegen* yang berarti "Kesenangan Kita". Yang terakhir didirikan ialah "De Club" yang berdiri di Jalan Hilogoo. Pada tahun 1905 dipindahkan ke Dipo, tepatnya ke Kampung Baru.

Karena Padang adalah kota militer, maka bangunan tangsi militer pun juga berkembang. Lebih-lebih ketika perang Aceh masih berlangsung. Kota ini menjadi tempat pemberangkatan tentara Belanda ke Aceh dan juga tempat istirahat militer. Untuk kepentingan itu, maka sisi Selatan dari lapangan "Plein de Rome" didirikan tangsi serta perumahan bintanga artileri. Di samping itu dibangun pula kantor-kantor Kotapraja dan Telepon. Masih di sisi Selatan Plein Van Rome, tetapi arah ke laut berdiri "gedung Komoditi" (dekat Grand Hotel sekarang). Selain itu di daerah Kampung Cina atau Pondok didirikan pula sebuah gedung komoditi. Pementasan komidi bukan saja dikunjungi golongan bumi putra, tetapi juga orang Cina dan Belanda Indo. Di Jalan Pasar Ambacang yang sekarang bernama Jalan Bundo Kandung, pada sisi kanannya berdiri pula Sekolah Rendah Belanda (sekarang SMP Negeri II). Setelah Belantung dikembangkan Belanda menjadi tempat pemusatan kantor-kantor, sekolah-sekolah dan rumah-rumah pembesar, maka sekolah rendah itu dipindahkan ke Belantung. Di seberang jalan di depan sekolah tersebut terdapat rumah komandan militer kota dan sekitarnya. Di selatannya lagi di jalan yang sama berdiri sebuah bengkel senjata tentara. Antara rumah komandan militer Belanda dan bengkel, pada tahun 1894

didirikan sekolah khusus untuk puteri. Sebenarnya pada tahun 1850 Belanda telah membuka Sekolah Kepandaian Puteri, namun setelah berjalan 5 tahun ditutup Belanda. Sutan Gombak gelar Sutan Iskandar penghulu Wijk III yang memikirkan perlunya pendidikan formal bagi anak perempuan, kemudian dalam bulan September 1880 membuka sekolah khusus untuk anak-anak perempuan. Sekolah ini diadakan di ruang depan rumahnya sendiri di Alang Lawas. Waktu peresmianya dihadiri oleh Gubernur dan Regen.²⁰⁾

Mengenai pengembangan bangunan suci umat Kristen kita mendapat informasi bahwa di samping gereja Protestan yang didirikan di Jalan Bagindo Aziz Chan, juga didirikan gereja Katholik dan biaran berdekatan dengan Hotel Oranye. Mengenai pembangunan masjid tidak banyak informasi yang diperoleh, kecuali keterangan tentang pemindahan masjid di Seberang Padang ke Ganting, setelah pusat pemerintahan tradisional dipindahkan dari Seberang Padang ke Alang Lawas.²¹⁾ Dalam pembangunan masjid Ganting selalu saja mendapat kesulitan uang. Sudah sejak tahun 1866 dilakukan berbagai usaha untuk mencari uang namun selalu saja kekurangan dana. Sesudah 20 tahun dibangun belum juga selesai.

Pasar merupakan pusat kegiatan ekonomi yang penting pada suatu kota. Dalam sumber sejarah tradisional kita ketahui bahwa pasar pertama di Padang adalah Pasar Gadang yang terletak di sisi kanan Batang Arau. Dalam perkembangannya di samping Pasar Gadang atau Pasar Hilir, berdiri pula Pasar Mudik, Pasar Batipuh yang pada umumnya terletak di sisi kanan Batang Arau membujur dari Barat ke Timur sepanjang 1 kilometer. Sampai pertengahan abad ke 19 pasar ini cukup strategis letaknya, sehingga merupakan urat nadi perekonomian kota.

Pasar ini dikuasai oleh pedagang pribumi. Kota bukanlah sesuatu yang statis, ia berkembang terus. Kemudian beberapa pedagang Cina bersatu mendirikan pasar saingan dekat klenteng mereka. Pasar ini terletak arah Barat dari Pasar Mu-

dik dan Pasar Gadang. Pasar ini kemudian terbakar. Sebuah kantor dagang bernama "Badu Ata & Co" di Pasar Mudik, membuka pula sebuah pasar di sebidang tanah di belakang Tangsi sebagai cabang dari Pasar Mudik. Usahanya kelihatan berhasil, tetapi pada tahun 1882 pasar tersebut dilalap api seluruhnya. Kemudian seorang Cina yang bernama Gho Lam San segera membuka pasar baru tidak jauh dari pasar Badu Ata & Co yang terbakar. Gho Lam San berhasil karena letak Pasar Baru ini strategis. Lie Saay, seorang Kapten Cina di Padang melihat suatu kesempatan baik untuk mendirikan pasar yang lebih strategis lagi. Di tengah-tengah Kampung Jawa, Lie Saay mulai membuka pasar kecil yang terletak sebelah Utara dan bertetangga dengan Pasar Baru. Pada mulanya pasar ini tidak ramai, karena telah ada 4 pasar di dalam kota, yaitu: Pasar Mudik dan Pasar Gadang, Pasar Tanah Kongs, Gho Lam dan Lie Saay. Terjadilah persaingan di antara 4 pasar ini. Pasar Mudik dan Pasar Gadang sebagai yang tertua, tetap saja ramai di bawah pimpinan Badu Ata & Co, dengan manager yang professional bernama Nurut. Lie Saay membujuk Nurut untuk bekerja sama dan diberi modal, tetapi bukan bidang usaha yang sama, transpor kopi. Ternyata Pasar Mudik dan Pasar Gedang makin mundur. Pedagang-pedagang yang meninggalkan Pasar Mudik dan Pasar Gedang ditampung oleh Lie Saay di Pasar Jawa. Namun Pasar Mudik dan Pasar Gedang masih tetap bertahan sebagai grossier kain batik, kain dan barang kelontong. Sampai Jepang menduduk kota Padang Pasar Tanah Kongs tetap tidak dapat bertahan menghadapi perkembangan Pasar Jawa hingga sampai sekarang Pasar Tanah Kongs masih tetap merupakan pasar kecil yang menjual sayur, lauk-pauk dan barang-barang P & D.

Pasar yang dimiliki Gho Lam merupakan saingan yang terakhir bagi Lie Saay. Untung bagi Lie Saay, Pasar Gho Lam habis terbakar, dibangun kembali sehingga sanggup menyaingi Pasar Kampung Jawa. Namun usaha Gho Lam menyaingi Pasar Kampung Jawa milik Lie Saay tidak tercapai karena

pasar yang baru dibangun terbakar lagi. Tempat bekas pasar Gho Lam dibeli oleh Goan Hoat dari keluarga Lie Saay. Di tempat ini dibangun pula pasar yang oleh masyarakat Padang dikenal dengan nama "Pasar Goan Hoat atau Pasar Miskin". Pasar ini berdampingan dengan Pasar Kampung Jawa, bersatu menjadi Pasar Jawa yang menjadi inti pasar yang sekarang yang bernama Pasar Raya Padang. Kemudian seorang Cina yang bernama Oei Soei Kiat mendirikan pula pasar baru yang dikenal oleh masyarakat Padang dengan nama Balai Baru untuk menyaingi Pasar Lie Saay. Pasar ini terletak di sebelah Utara Pasar Jawa. Namun usaha Oei Soei Kiat untuk menyaingi Pasar Kampung Jawa belum berhasil. Sementara itu Pasar Jawa berkembang dengan pesat, sehingga berperan besar pada kehidupan ekonomi. Akhirnya penempatan Kota-praja mengambil alih pasar itu dari tangan Lie Saay dengan ganti kerugian.

Dalam rangka meningkatkan hubungan kota Padang dengan daerah-daerah pedalaman Sumatera Barat berdasarkan Undang Undang tahun 1887, Lembaran Negara No. 136 dibuatlah jaringan kereta api. Selain itu untuk memperlancar hubungan Padang dengan dunia luar dimulai pulalah pembangunan pelabuhan kapal di Teluk Bayur, menggantikan pelabuhan di pulau Pisang Gadang. Pada tahun 1891 dibuka trayek umum yang menghubungkan Padang - Teluk Bayur dan Padang - Padang Panjang., Pada tahun itu juga selesai pula dibuka hubungan Padang Panjang dengan Bukittinggi. Pada tahun 1892 pelabuhan Teluk Bayur dibuka secara resmi. Pada waktu pelabuhan Teluk Bayur diresmikan, dibuka pula trayek kereta api yang menghubungkan Padang dengan Sawahlunto, daerah tambang batu bara. Pada tahun 1910 dibuka jaringan kereta api yang menghubungkan Lubuk Alung dengan Pariaman. Dengan demikian dapat dikatakan pada dekade pertama abad ke 20 kota Padang mempunyai jaringan kereta api yang menghubungkannya dengan daerah-daerah penting di pedalaman Sumatera Barat.

1.4. Komposisi, Mobilitas dan Pola Pemukiman Penduduk.

Mengenai komposisi penduduk kota Padang selama abad 18 dan 19 tidak diketemukan data yang akurat dan terperinci. Pada tahun 1781 pegawai sipil, tentara, awak kapal dan tukang VOC yang bertempat tinggal di bandar-bandar pantai Sumatera Barat yang diduduki VOC berjumlah 176 orang. Dua puluh dua orang diantaranya bertugas di Pulau Cingkuk dan Air Haji, sekarang bagian dari Kabupaten Pesisir Selatan. Selebihnya sebanyak 154 orang bertugas di bandar Padang, yang terdiri dari: 19 orang pegawai sipil, 87 orang prajurit Belanda, 48 orang prajurit bumi putera, terutama orang Bugis, Moor dan orang Keling dari India Selatan.

Orang Belanda dan keluarga mereka yang bukan pegawai bertempat tinggal di luar benteng VOC; diperkirakan di Kampung Berok sekarang. Mereka disebut Mardykera atau orang Merdeka yang umumnya bekas pegawai dan pensiunan serdadu. Mereka hidup sebagai petani dan pedagang kecil dibantu oleh budak-budak belian mereka yang berasal dari Mentawai dan Nias. Menurut catatan tahun 1790 keluarga Mardykera di Padang berjumlah kira-kira 10 keluarga yang terdiri dari 33 orang pria, 44 orang wanita dan 107 orang anak. Pada akhir abad 18 orang Cina sudah cukup besar jumlahnya di kota Padang. Biasanya mereka berperan sebagai pedagang menengah atau perantara, karena itu mereka mempunyai pimpinan sendiri yang disebut Kapten Cina. Orang Cina dan Mardykera hidup dalam Wijk tersendiri, terpisah dari tempat kediaman penduduk setempat.²²) Sampai sekarang masih dikenal tempat pemukiman Cina sebagai Kampung Cina. Mengenai golongan Mardykera, sekarang tidak ditemui lagi. Orang Nias juga mempunyai daerah kediaman tersendiri dan sekarang lokasi itu masih disebut Kampung Nias. Kampung Nias bertetangga dengan Kampung Cina. Begitu pula orang-orang Keling, baik yang pensiunan VOC maupun pedagang juga mempunyai daerah tempat tinggal sendiri yang sampai sekarang masih disebut Kampung Keling. Kampung Keling ini bertetangga

dengan Kampung Cina yang terletak di sebelah Barat dan Utara.

Salah satu sumber menyebutkan bahwa penduduk kota ini telah bertambah antara 9.000 dan 15.000 orang pada kurun waktu 1770-1865.²³⁾ Tetapi sumber ini tidak menyebutkan berapa jumlah penduduk kota Padang pada tahun 1770 atau pada tahun 1865. Dijelaskan bahwa menjelang tahun 1905 penduduk kota berjumlah 47.000 orang yang terdiri dari: 39.000 orang penduduk asli, dan 8.000 orang Belanda, Cina, Arab dan lain-lain.²⁴⁾

Pada waktu Inggris menyerahkan kembali kota Padang kepada Belanda pada tahun 1819, jumlah penduduk kira-kira 10.550 orang, terdiri dari: 150 orang Eropa, 7.000 penduduk asli, 200 orang Cina, 700 orang Benggali atau India, 1.000 orang Arab dan 1.500 orang Nias.²⁵⁾

Kalau dibandingkan data penduduk kota Padang yang ditulis oleh Harian Singgalang dengan data penduduk yang dikemukakan Buyoshi Kato pada tahun 1905 maka berarti pertambahan penduduk kota rata-rata pertahun 351 orang, antara tahun 1819-1905.

Pertambahan ini ternyata lebih besar dibandingkan pertambahan rata-rata pertahun penduduk kota Padang antara tahun 1770 – 1865 yang hanya 157 orang pertahun. Keadaan ini mungkin ada kaitannya dengan kebijaksanaan pemerintah Belanda. Pada tahun 1819 pemerintah Belanda mengembangkan kota, dan 1820 mengizinkan setiap orang untuk membuka daerah pertanian di sebelah Utara pelabuhan Batang Arau sampai dengan ke daerah Nanggalo. Selanjutnya tahun 1829 pemerintah menjamin hak pembukaan tanah pertanian yang baru itu.²⁶⁾

Daerah Rimbo Kaluang pada umumnya dibuka oleh orang yang berasal dari Alang Lawas dan Seberang Padang. Daerah-daerah sebelah kiri Bandar Jati, Alai, Gunung Pangilun, Belanti dan Nanggalo dibuka oleh penduduk yang berasal dari Nagari Pauh dan Koto Tangah. Sampai sekarang orang

yang berasal dari Pauh masih mempunyai tanah pusaka di daerah tersebut. Begitu pula orang dari delapan Suku juga mempunyai tanah pusaka tinggi di daerah tersebut. Di antara orang yang membuka daerah baru ini ada yang menetap dan ada pula yang kembali, karena jaraknya berkisar antara 2-5 km.²⁷⁾

Sebagai tambahan perlu diperhatikan sensus penduduk tahun 1852. Menurut sensus ini penduduk Padang dan sekitarnya berjumlah 40.158 orang, terdiri dari 662 orang Eropa, 35.126 penduduk asli, 1.140 orang Cina, Timur Asing lainnya 953 orang, dan budak-budak 2277 orang.²⁸⁾ Tidak diketahui berapa jumlah penduduk kota sendiri dan wilayah sekitarnya. Begitu pula sensus penduduk pada tahun 1920 menyatakan bahwa jumlahnya 146.762 orang, yang terdiri dari 2.447 orang Eropa, 136.216 orang penduduk asli, 6.909 orang Cina dan 1.798 orang Timur Asing lainnya.²⁹⁾

Kalau kita bandingkan data sensus tahun 1852 dan 1920, maka terlihat bahwa rata-rata pertambahan penduduk sebanyak 1.568 orang pertahun, selama 68 tahun. Selanjutnya kalau dibandingkan data penduduk tahun 1905 dengan 1930, maka rata-rata pertambahan penduduk pertahun 202 orang selama 25 tahun. Karena data penduduk yang terakhir ini hanya berdasarkan asumsi dari Akira Oki dan Bappeda Kotamadya Padang, maka kita lebih cenderung menerima pertambahan penduduk kota Padang rata-rata 1.568 orang petahun berdasarkan sensus tahun 1852 dan tahun 1920. Pertambahan penduduk kota Padang yang cepat ini ada kaitannya dengan bertambah pentingnya kedudukannya sebagai pusat kegiatan ekonomi. Pada dua dekade pertama abad 20 jaringan perdagangan makin meluas ke seluruh Sumatera, Jawa bahkan dunia internasional.

Dalam permulaan abad 20, Padang mulai dihubungkan secara langsung dengan bahagian-bahagian lainnya di Sumatera. Pada tahun 1910 telah dibuka hubungan transportasi kendaraan bermotor antara Padang dengan Medan. Menjelang

tahun 1920 jalan raya ke Pakan Baru di pantai timur Sumatera dibuat secara besar-besaran. Sebagai satu-satunya Bandar atau pelabuhan yang menghubungkan Sumatera Barat dengan Batavia, Padang dapat diperkirakan sebagai bandar yang sangat penting pada masa yang sama. Kota itu menjadi lebih bersifat kosmopolitan dalam karakter dan pertumbuhan penduduknya.³⁰⁾

1.5. Pemekaran Kota Sampai Tahun 1950.

Walaupun Hari Jadi Kota Padang ditetapkan tahun 1669 namun tidak akan diperoleh gambaran yang utuh tentang perkembangan wilayah kota ini, tanpa mengetahui bagaimana keadaan sebelumnya. Seperti sudah disinggung pada bagian terdahulu bahwa kira-kira tahun 1610. Padang telah dibuka sebagai tempat pemukiman setelah daerah ini berkembang menjadi nagari dengan seorang penghulu sebagai pimpinannya Tercatat delapan penghulu yang mengepalai suku atau kaum. Mereka dipimpin oleh seorang penghulu yang ditukan, berpengalaman dan bijaksana. Kedudukannya di antara penghulu yang delapan adalah sebagai primus inter pares (yang utama dan yang banyak). Sebagai pusat pemerintahannya ialah "Seberang Padang" disuatu bangunan yang dikenal dengan "rumah lima ruang". Daerah ini meluas ke Ranah Binuang, Alang Lawas dan sampai ke daerah Muara Batang Arau atau Muara Padang. Perkembangan daerah ini menyebabkan pusat pemerintahan tradisional pindah ke Alang Lawas yang sekarang bernama Jalan M.H. Thamrin. Sampai berakhirnya kekuasaan kaum bangsawan, dan diganti dengan sistem pemerintahan yang diciptakan Belanda, Alang Lawas tetap menjadi pusat pemerintahan tradisional.

Pada waktu VOC menginjakkan kakinya tahun 1663, Penghulu yang Delapan dipimpin oleh Rang Kayo Kaciek. Untuk kepentingan perdagangannya pada tanggal 18 Agustus 1667, Rang Kayo Kaciek diangkat menjadi Panglima atau Raja Bandar. Tambahan lagi VOC sudah mengetahui bahwa

delapan penghulu sudah berpengalaman sebagai pedagang perantara.

VOC memilih tempat sebagai loji, mereka di dekat mulut Muara Batang Arau (1666). Sampai akhir abad 18 kota Padang hanya sekitar Batang Arau, Kampung Cina, Kampung Keling, Pasar Hilir, Pasar Mudik, Pulau Air, Ranah Binuang, Alang Lawas dan Seberang Padang. Arah Utara dari daerah ini masih merupakan hutan dan rawa-rawa.³¹)

Setelah kota ini dikuasai oleh pemerintah Belanda di bawah pimpinan de Stiers, barulah kota ini diperluas ke arah Utara, yaitu ke Nanggalo dan Ulak Karang, ke Selatan sampai Teluk Bayur, ke arah Timur sampai ke Lubuk Begalung, Marapalam dan Andalas. Pada abad 19 wilayah yang tadinya berada di bawah Penghulu dirubah Belanda menjadi sistem pemerintahan Wijk. Penghulu Wijk bukan lagi kepala pemerintahan atas kaum atau suku, tetapi memerintah atas daerah kampung atau Wijk. Masing-masing Wijk dikepalai oleh Penghulu Wijk. Wijk yang tercatat adalah sebagai berikut:

- Wijk I Kampung Mata Air dan Kampung Durian;
- Wijk II Kampung Purus, Damar, Olo, Ujung Pandan dan Rimbo Kaluang;
- Wijk III Kampung Jawa, Sawahan, Belantung, Terendam dan Jati,
- Wijk IV Kampung Pondok, Kampung Sebelah, Berok, Kampung Cina dan Belakang Tangsi;
- Wijk V Kampung Parak Gadang, Simpang Haru dan Andalas;
- Wijk VI Alang Lawas, Ganting, Ranah Binuang, Pasar Gedang, Kampung Nias dan Palinggam;
- Wijk VII Teluk Bayur, Air Manis, Seberang Padang dan Kampung Teleng dan
- Wijk VIII Nanggalo dan Ulak Karang.

Dalam pemekaran selanjutnya daerah kota diperluas dengan membentuk Wijk IX yang daerahnya meliputi Lubuk Begalung,

Gaung, Sungai Baramah, Parak Laweh dan Gurun Laweh.

Kesemua Panghulu Wijk ini bergabung dalam satu dewan yang bernama Dewan Penghulu Wijk diketuai oleh seorang Regent yang diangkat oleh pemerintah Hindia Belanda. Dalam menjalankan pemerintahannya, Regent didampingi seorang wakil yang mengetuai jabatan yang bernama Bandaro dan Kadhi serta Imam.

Pada tahun 1905 ditetapkan betas-batas kota Padang dengan Ordonansi Gubernur Jenderal Hindia Belanda 1 April 1905. Kemudian pada tahun 1913, pemerintah Belanda mengatur pembahagian daerah kota ini dan sekitarnya berdasarkan Staatsblad dalam Lembaran Negara No. 321, yang menyatakan bahwa Padang dan sekitarnya terdiri atas 7 distrik yaitu:

1. Distrik Tanah Tinggi
2. Distrik Batang Arau
3. Distrik Binuang
4. Distrik Koto Tengah
5. Distrik Pauh IX
6. Distrik Sungkai
7. Distrik 7 Lurah Pauh V

Ketujuh distrik tersebut di atas merupakan sebuah Luhak yang dikepalai oleh seorang Asisten Residen. Dalam dialek daerah sistem residen ini terkenal dengan nama Tuanku Luak. Di samping itu ketujuh distrik itu dapat dibedakan atas:

- a. Padang Kota, ke dalamnya termasuk Distrik Tanah Tinggi, Batang Arau dan Binuang
- b. Padang Luar Kota, ke dalamnya termasuk Distrik Koto Tengah, Pauh IX, Sungkai dan Pauh V

Pada tahun 1925 pemerintah Belanda mengangkat seorang Burgemeester Padang ang bernama Mr. Quwekerk.

Pada tahun 1928 Gubernur Jenderal Belanda di Batavia berdasarkan Staatsblad No. 560 tahun 1916, menetapkan bahwa Walikota juga diberi hak untuk bertindak sebagai Ketua Dewan Gemeente. Dalam operasionalnya Burgemeester ber-

tindak untuk urusan pembangunan dan pekerjaan umum dengan pengertian sebagai "Kota Administratif".

Dalam zaman Pendudukan Jepang, kota Padang diperintah oleh Kepala Pemerintah kota dengan nama "Sityo". Jepang berusaha memperluas daerah kota dengan memasukkan kampung-kampung yang selama ini terletak di luar dan dipinggir kota. Kampung atau daerah tersebut adalah:

1. Ulak Karang
2. Andalas – Marapalam
3. Seberang Padang
4. Teluk Bayur
5. Bukit Air Manis
6. Gunung Pangilun

Pada waktu revolusi daerah kota Padang menciut seperti pada zaman penjajahan Belanda lagi. Padang menjadi Kotapraja dengan Walikota RI yang pertama adalah Mr. Abu Bakar Jaar. Setelah pengakuan kedaulatan RI, kota Padang menjadi kota Otonom di bawah Propinsi Sumatera Tengah. Berdasarkan Ketetapan Gubernur Sumatera Tengah tanggal 15 Agustus 1950 No. 65/GP-50 daerah kota Padang diperluas lagi seperti pada zaman Pendudukan Jepang. Karena itu Kewedanaan Kota Padang dihapuskan, dan segala urusannya diserahkan kepada Walikota Padang.

1.6. Penetapan Hari Jadi.

Sudah lama dirasakan perlunya ditemukan Hari Jadi Kota Padang yang dapat diperingati setiap tahunnya. Usaha ke arah ini sudah mulai sejak tahun 1974 ketika Walikotamadya Padang dijabat oleh Drs. Hasan Basri Durin. (kemudian Gubernur Sumbar). Setelah melalui proses yang panjang, tahun 1980 mulai dilakukan rapat-rapat dan melahirkan beberapa makalah dan tulisan oleh:

Drs. Ishak Taher
 Drs. Hasan Basri
 LKAAM Kodya Padang

H.Z. Abidin St. Pangeran
Drs. H. Mukhtiar Mukhtar.

Tulisan itu timbul berbarengan dengan diperolehnya Prasmya Purnakarya Nugraha dari Pemerintah sebagai lambang keberhasilan pelaksanaan Pelita. Selain itu juga telah dihubungi Institut Voor de Tropen di Amsterdam dan Arsip Nasional di Jakarta, dan menerjemahkan berbagai Keputusan Gubernur Jenderal yang berhubungan dengan pembentukan gemeente Padang.

Tanggal 15 Nopember 1982 Drs. Nurwan Yunus BE menurunkan tulisannya. Ia mengajukan beberapa data dan cara untuk menetapkan hari jadi.

Medio 1985 panitia mencoba lagi memancing pendapat masyarakat, ilmuwan dan tokoh sejarah. Ir. Lesman bekas ketua Bappeda mengusulkan tanggal 1 Maret 1906 sebagai hari jadi kota Padang, bertepatan dengan Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang menjadikan Padang sebagai daerah Otonom. Kemudian sejumlah ilmuwan juga memberikan sumbangan pemikirannya. Sekurang-kurangnya ditemukan 12 tulisan tentang masalah Hari Jadi Kota Padang, seperti dari:

- Abrar Yusra
- Syafri Segeh
- Fachrul Rasyid HF
- E. Bavhri Sikum
- St. Chaidir Yusuf Gelar St. Maharaja Besar
- Djamilis Djamin
- St. Munir

Kriteria hari jadi diharapkan dapat memperkuat persatuan warga kota yang mendiami daerah seluas 695 km², desa dapat dijadikan landasan dalam mempertebal kecintaan terhadap kotanya.

Beberapa alternatif hari jadi Kota Padang adalah:

13 Februari 1667 yaitu ketika perundingan VOC dengan

- Raja Pagaruyung yang mengakui kedaulatan Raja Pagaruyung di Pesisir Barat Minangkabau
- 18 September 1667, orang Kayo Kaciak diangkat sebagai Panglima oleh Raja Pagaruyung
 - 30 April 1666, Pasukan Belanda yang menyerang Pauh dihancurkan oleh Rakyat Pauh
 - 13 Desember 1700, pasukan Belanda menyerang Pauh dihancurkan oleh rakyat Pauh
 - 1 Oktober 1892, peresmian Pelabuhan Teluk Bayur
 - 1 Maret 1906, Status Gemeente Kota Padang
 - 7 Agustus 1669 rakyat Pauh dan warga kota lainnya menghancurkan benteng/loji Belanda di Padang.

Setelah terkumpul bermacam usul dan saran baik yang disampaikan langsung kepada panitia maupun melalui mass media, akhirnya pada 20-21 Januari diadakan rapat konsultasi yang dihadiri oleh para ilmuwan dan tokoh-tokoh masyarakat. Selain itu dihadiri pula oleh Rusli Amran penyusun buku Sumatera Barat sampai Pelakat Panjang, DR. Taufuk Abdullah dan Drs. Mardanas Safwan dari Jakarta.

Akhirnya Tim Perumus yang diketuai oleh DR. Mochtar Naim menyarankan agar tanggal 7 Agustus 1669 saat penyerangan loji Belanda di Muara dapat dijadikan hari jadi Kotamadya Padang. Tanggal ini dipilih karena adanya segi patriotisme dan punya kepastian sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan.

Beberapa tokoh dan pejabat yang turut memberikan saran untuk penentuan hari jadi kota Padang antara lain:

- Azwar Dt. Mangiang, St. Munir, St. Chaidir, St. Azis dan kawan-kawan, E. Bachri Sikum
- Para wartawan Syafri Segeh, Abrar Yusra, Fachrul Rasyid HF Sahar, Jamilis Jamin
- Rusli Amran, DR. Taufik Abdullah, Drs. Mardanas Safwan dan beberapa ahli sejarah dari IKIP Padang
- Drs. Zuiyen Rais, Ir. Lesman, Drs. Nurwan Yunus, Drs. H. Muchtiar Muchtar
- Tokoh-tokoh masyarakat lainnya.

Setelah melalui berbagai pertimbangan dan diskusi pada tanggal 31 Juli 1986 DPRD Padang dengan suara bulat menyetujui tanggal 7 Agustus 1669 sebagai tanggal Hari Jadi Kota Padang. Penetapan tanggal ini disetujui dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Pada tanggal 7 Agustus 1669 tersebut rakyat Pauh dan Koto Tangah dan penduduk Kota Padang menyerang Loji atau benteng kompeni yang menimbulkan kerugian besar dipihak Belanda.
- Peristiwa di atas memperlihatkan semangat kepahlawanan rakyat Padang yaitu dengan mengadakan perlawanan secara serentak terhadap kompeni.
- Dalam peristiwa tersebut telah dapat diwujudkan rasa persatuan dan kesatuan di antara rakyat dalam menentang penjajahan.
- Peristiwa ini dapat membangkitkan rasa kepahlawanan yang sangat penting artinya dalam melanjutkan pembangunan di segala bidang, menuju terciptanya Kota yang aman, tertib, bersih, indah dan sejahtera.

Dalam rangka perumusan ini DPRD Padang telah membentuk panitia khusus yang diketuai oleh Sulaiman Saleh SH, Wakil Ketua H. Amunir Indra, dengan anggota Syamsu, Anas Lubuk, Abu Nawas, Thamran Anwar SH, Rahalim St. Rajo Alam, Syamsi, Bahar, H. Yunir Yunus, Syafril Ramli, Basyir Said, Bagindo Yornoly Latif BA, Drs. Busyra Amarullah, A. Muis SR. Ali Akbar, Jamain Rifti, Drs. Syafni Bakaruddin, Tarmizi Hosen SH, Syawalis R.

Dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Padang yang ke 317 tanggal 7 Agustus 1986, Walikota Padang menyerukan:

- Marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah ditetapkan hari jadi Kotamadya Padang tanggal 7 Agustus 1669.
- Marilah kita jadikan hari jadi Kotamadya Padang ini sebagai momentum untuk meningkatkan kegiatan pemba-

ngunan dan mempertinggi semangat perjuangan warga kota yang telah dibuktikan sejak ratusan tahun yang lalu di dalam membangun kota ini sebagai bahagian yang tak terpisahkan dari wilayah RI yang besar.

- Kita tingkatkan persatuan dan kesatuan dalam segala bidang sehingga dapat lebih ditingkatkan pula program K3 dan kita rayakan dengan sederhana namun memberikan dorongan untuk menciptakan kota yang SEJATI yaitu sejahtera Lahiriah, Bathiniah, Aman, Tertib, Indah dan Bersih. Kepada DPRD Padang, Panitia Hari Jadi Kota Padang serta semua pihak yang telah memberikan saran dan partisipasinya diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Dengan berhasilnya penggalian Hari Jadi Kota Padang maka bertambah lengkap pula kebanggaan Kota Padang di samping Prasamya Purna Karya Nugraha, Adipura, dan Hutan Raya Bung Hatta. Dan yang lebih penting munculnya keharmonisan, kerukunan, keamanan, ketentraman untuk semua warga kota.

CATATAN KAKI

- 1) Daerah ini dulunya terletak dalam kenagarian Lubuk Kilangan. Berdasarkan PP No. 17 Tahun 1980, menjadi Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Madya Padang
- 2) Daerah ini dulunya terletak dalam kenagarian Koto Tanjung Padang Luar Kota
- 3) Sebelum PP No. 17 Tahun 1980 daerah ini disebut Daerah Padang Luar Kota, yang terletak di sebelah Timur Kota Padang, yaitu Nagari Pauh IX, Nagari Pauh V, Nagari Nan XX dan Nagari Lubuk Kilangan, sebelah Utara yaitu Nagari Koto Tangah dan sebelah Selatan Nagari Nan XX
- 4) Sekarang menjadi Kelurahan Seberang Padang, Kecamatan Padang Selatan Kota Madya Padang
- 5) Rusli Amran, *Padang Riwayatmu Dulu*, Mutiara Sumber Widya, Jakarta 1986, hal 119
- 6) *Ibid*, hal 119
- 7) Wawancara dengan *St Burhanuddin*, Jalan Thamrin No. 36 Padang
- 8) *Opcit*, hal 119
- 9) Nagari merupakan alat pemerintahan tradisional yang terkecil dan otonom yang terdiri atas kampung-kampung.
- 10) Nagari-nagari yang berdiri di pesisir Barat pantai Sumatera Barat disebut Bandar, seperti: Tiku, Pariaman dan

Padang. Daerah ini termasuk daerah rantau Pesisir Barat kerajaan Minangkabau. Kalau nagari di Darek atau Luhak Nan Tigo diperintah oleh penghulu, maka rantau diperintah oleh raja.

- 11) Sekarang masih ada "Surau Sumpu" di Jalan Pasar Mudik Padang. Namun kuburan dagang yang terletak di Jalan M.H. Thamrin Padang, depan Kodim Padang tidak ada lagi. Di sana sekarang berdiri Perguruan Thawalib.
- 12) Christine Dobbin, *Islamic Revivalism in a Changing Pre-sant Economy*, hal 72
- 13) H. St Azis et al, *Menggali Hari Jadi Kota Padang*, Padang 1980, hal 7
- 14) *Ibid*, hal 35
- 15) DPRD Kota Padang, *Sejarah Hari Jadi Kota Padang*, Padang 1986
- 16) Rusli Amran, *Opcit*, hal 117
- 17) *Ibid*, hal 118
- 18) *Ibid*, hal 118
- 19) *Ibid*, hal 20
- 20) *Ibid*, hal 29
- 21) Wawancara dengan *Dt. Mara Indo Bumi* di Seberang Padang
- 22) M.D. Mansoer et al, *Sejarah Minangkabau*, Bhratara, Jakarta, 1970, hal 104-105
- 23) Tsuyoshi Kato, *Matriliny Migration; Envolving Minangkabau Traditions in Indonesia*, Cornell University Press, Ithaca and London, 1982
- 24) *Ibid*, hal 108
- 25) *Harian Singgalang* 15 Nopember 1982, No. 2106 Tahun XVI Padang, hal V
- 26) Ahira Oki, *Social Change in The West Sumatran Village: 1908-1945*, Thesis Doctor of Philosphy in The Aistralian National University, Canberra, tahun 1977, hal 106
- 27) Wawancara dengan *Dinar*, di Ampang Kecamatan Kuranji tanggal 7 April 1987

- 28) Elizabeth Graves, *The Ever – Vistorious Buffalo: Itow-
The Minangkabau of Indonesia Solved Their” Colonial
Questions”*, University Microflems, Ann Arbor, Michigan,
1971
- 29) *Ibid*, hal 24
- 30) Tsuyoshi Kato, *Opcit*, hal 108
- 31) Wawancara dengan *Dt. Mara Indo Bumi, Opcit.*

BAB II

KOTA PADANG DAN LINGKUNGANNYA

2.1. Hubungan Dengan Daerah Pedalaman.

Kota Padang terletak di tepi pantai pesisir Barat pulau Sumatera. Tepatnya pada garis astronomi $0^{\circ}56' \text{ LS}$ dan $0^{\circ}21' \text{ BT}$. Sebahagian besar kota Padang ini terletak pada ketinggian kurang dari 10 meter di atas permukaan laut. Sedangkan sebagai suatu kota yang terletak di tepi pantai, kota Padang mempunyai lebih kurang 19.800 meter garis pantai. Dalam hal ini termasuk garis pantai yang terdapat di pulau Pisang yang termasuk ke dalam daerah administratif kota ini.

Di awal tahun 1950-an, kota Padang merupakan salah satu dari 16 Daerah Tingkat II yang ada dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah. Di waktu itu kota ini mempunyai status Kotapraja di bawah seorang Walikota. Sumatera Tengah dipecah tahun 1958, karena itu kota ini menjadi salah satu dari 14 Daerah Tingkat II yang ada dalam lingkungan Propinsi Sumatera Barat dengan status Kotamadya.

Dalam wilayah Propinsi Sumatera Barat, kota Padang merupakan salah satu dari beberapa Daerah Tingkat II yang terletak di tepi pantai atau yang mempunyai daerah pantai, sehingga kota ini dan beberapa bagian daerah Tingkat II lain-

nya sering juga disebut dengan daerah pesisir, sebagai lawan dari sebutan daerah pedalaman atau darek.

Penamaan daerah pesisir dan darek ini secara sosiologis merujuk pada kerajaan Minangkabau. Konsep ini untuk dipakai melihat pertalian hubungan antara kota Padang dengan daerah lainnya di Sumatera Barat. Selain dipergunakan untuk daerah-daerah yang secara topografis terletak di pedalaman Sumatera Barat, maka konsep daerah pedalaman dalam studi ini juga dipergunakan untuk membicarakan beberapa daerah yang terletak di luar lingkungan, tetapi dengan jarak yang tiada begitu jauh, seperti luar kota.

Kota ini sebetulnya tidak pernah terisolasi dari daerah manapun, termasuk dengan daerah pedalaman. Sejak zaman pra-kolonial kota ini sering dikunjungi oleh saudagar-saudagar pedalaman, apalagi setelah dibukanya jalan raya dan jalan kereta api antara Padang dengan kota-kota lain di Sumatera Barat. Peranan kota Padang semakin besar setelah memasuki awal abad ke 20. Pada waktu itu kota ini telah menjadi pusat kegiatan politik, ibukota Sumatera's Weskust, pusat pendidikan, perdagangan, perekonomian dan lain sebagainya.

Tahun 1950-an peranan kota Padang dalam bidang perekonomian dan pendidikan tinggi cukup besar. Hal ini disebabkan tersedianya sarana penunjang untuk itu. Kota ini mempunyai sarana transportasi perhubungan baik darat, laut dan udara. Lebih dari 90% penduduk kota ini adalah penduduk asli. Saat itu kota Padang mempunyai status sebagai sebuah Kotaparaja dibawah seorang Walikota. Setelah Propinsi Sumatera Tengah dipecah menjadi tiga, maka kota Padang menjadi salah satu dari 14 Daerah Tingkat II, dan berubah status menjadi Kotamadya.

Walaupun sejak 1950-an kota Padang menjadi daerah Tingkat II dalam Propinsi Sumatra Tengah, tetapi karena mempunyai pelabuhan alam Teluk Bayur yang dapat dimasuki oleh kapal-kapal dari luar negeri, maka kota ini menjadi pusat jaringan dengan pedalaman, terutama dengan daerah penghasil komo-

diti ekspor, seperti karet dan kopra. Pada waktu itu tidak kurang dari 4.000 km jalan raya di Propinsi Sumatera Tengah sudah dapat ditempuh kendaraan beroda empat.¹⁾ Jalan raya ini penting karena tidak semua daerah di Sumatera Tengah dapat dicapai dengan kereta api, kapal terbang, kapal laut atau perahu. Jaringan kereta api hanya menghubungkan kota Padang dengan Padang Panjang. Solok dan Sawahlunto terutama karena adanya tambang batu bara Ombilin. Dari Padang Panjang jalan kereta api itu bercabang dua, satu di antaranya ke Bukittinggi dan Payakumbuh. Tujuan pemerintah Belanda membuat jalan kereta api Padang Sawahlunto adalah untuk membawa batu bara ke Teluk Bayur. Tetapi karena jalan kereta api Sawahlunto melalui Solok sebagai penghasil beras yang terpenting dan Padang Panjang sebagai penghasil kol, kentang, ubi rambat, buncis dan lain-lain, maka kereta api juga berfungsi membawa hasil-hasil dari kedua kota tersebut ke Padang. Jalan kereta api Payakumbuh diteruskan ke Gunung Bungsu (lebih kurang 25 km sebelah Utara kota Payakumbuh) karena di sana terdapat tambang emas. Karena eksploitasi tambang emas itu tidak memuaskan, maka jaringan keretaapi ke sana akhirnya ditutup. Praktis kereta api Padang – Padang Panjang– Bukittinggi – Payakumbuh hanya membawa penumpang pulang pergi. Karena Payakumbuh penghasil ternak kuda yang penting dan Bukittinggi penghasil palawija, maka kereta api Padang – Payakumbuh juga berfungsi membawa hasil ternak dan palawija dari kedua kota tersebut ke kota Padang. Dalam rangka menghubungkan kota Padang dengan daerah penghasil kopra terpenting, maka dari Lubuk Alung yang terletak dipertengahan jalan kereta api Padang – Padang Panjang dibuat pula jaringan kereta api Lubuk Alung – Pariaman, Dari Pariaman jalan kereta api diteruskan ke Naras, 5 km arah Utara Pariaman menyusur pantai Barat. Karena ongkos relatif rendah dibanding bus, maka kereta api di Sumatera Barat sangat penting dalam melayani arus penumpang dari berbagai kota. Jasa kereta api ini juga dimanfaatkan oleh

pedagang kecil antar "pekan" atau pasar bergilir dan antar kota. Lambat laun peranan kereta api digeser oleh bus. Hal ini karena kereta api terlampau lambat dibandingkan bus. Untuk menghubungkan Padang – Payakumbuh sejauh 120 km memakan waktu 8 sampai 10 jam, sedangkan dengan bus paling lama 3 jam. Di samping itu, kereta api masih digerakkan oleh stom, dan asap pembakaran batu bara pada lokomotif mengotorkan pakaian penumpang. Keadaan seperti ini menyebabkan jasa kereta api kurang dimanfaatkan lagi masyarakat dan akhirnya tidak lagi membawa penumpang. Pada tahun 1970-an jalan kereta api Padang – Payakumbuh ditutup. Sekarang ini yang ada hanya jalan kereta api Padang – Sawahlunto yang khusus membawa batu bara. Jalan kereta api Padang – Pariaman sampai sekarang masih diusahakan melayani penumpang, namun tidak menggemirakan hampir-hampir tidak ada penumpangnya. Pernah jalan kereta api ini mendapat julukan "kereta api rumput",²⁾ walaupun telah digerakkan dengan mesin diesel. Oleh karena itu sejak pertengahan 1960 sampai tahun 1980-an Perum PJKA Sumatera Barat, selalu mengalami kerugian. Akhir-akhir ini setelah batu bara menjadi bahan bakar yang penting, maka frekwensi kereta api yang menghubungkan Padang – Sawahlunto makin tinggi dalam membawa batu bara ke pelabuhan Teluk Bayur.

Transportasi darat dengan menggunakan kendaraan bermotor merupakan alat pengangkutan yang menghubungkan kota Padang dengan daerah pedalaman. Di samping mengangkut beribu-ribu orang dari dan ke kota Padang setiap hari, mobil juga membawa beribu-ribu ton karet, kopra, teh, beras, ternak, sayur-mayur dan hasil kerajinan rakyat ke kota ini.

Karena transportasi darat dengan mempergunakan kendaraan bermotor merupakan salah satu urat nadi bagi perekonomian rakyat, maka pemerintah ikut mengaturnya.

Pada 1 Januari 1900, pemerintahan Belanda telah mengeluarkan peraturan mengenai cara pemakaian kendaraan bermotor. Peraturan ini baru sekadar menjaga keselamatan dan keamanan di jalan raya.³⁾

Karena pertambahan jalan raya, meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dan kebutuhan pemakai jasa angkutan maka dikeluarkan peraturan-peraturan untuk menghindarkan persaingan antara pemilik perusahaan pengangkutan. Beberapa tahun menjelang Perang Dunia ke II telah ada beberapa buah perusahaan bis swasta kepunyaan bangsa Indonesia. Dari zaman Jepang sampai tahun 1950 alat transportasi darat yang terpenting yang menghubungkan kota Padang dengan daerah pedalaman adalah kereta api. Di samping itu juga dipergunakan pedati dan bendi. Mobil dipakai untuk kepentingan militer dan pemerintah.

Untuk mengetahui bagaimana sistem perhubungan kota Padang dengan daerah pedalaman, sebaiknya kita ketahui tentang daerah pedalaman kota Padang itu sendiri.

Secara teratur kota Padang mempunyai hubungan dengan daerah pinggiran kota atau yang disebut daerah luar kota seperti kenagarian Koto Tengah, Nanggalo, Pauh XI, Pauh V, Nagari Lubuk Kilangan, Nagari Nan XX, Teluk Kabung dan Bungus. Jarak daerah ini dari pusat kota berkisar antara 4 km-7 km.⁴) Sampai tahun 1955 alat transportasi yang terpenting yang menghubungkan daerah tersebut dengan kota Padang adalah bendi. Kecuali untuk penumpang kendaraan juga dipakai membawa sayur-mayur dan ternak.

Beberapa daerah luar kota yang telah dihubungkan dengan kendaraan bermotor umum adalah Indarung (\pm 14 km arah Timur kota Padang) dan Teluk Kapung (\pm 15 km arah Selatan). Perusahaan oto yang menghubungkan trayek Padang - Indarung ialah FA Selamat, N.V. Atom, Plastic dan P.O. Andalas. Perusahaan oto yang menghubungkan Padang - Teluk Kabung ialah P.O. Andalas, N.V. Atom.⁵) Pada tahun 1950-an perusahaan oto tersebut berkembang secara baik, karena pola transportasinya masih "berat sebelah".⁶)

Setiap hari beribu-ribu penduduk luar kota ini pergi ke Padang untuk bekerja sebagai tukang, buruh, menjual hasil ladang, ternak dan lain-lain. Di samping itu tukang pedati dan

kusir bendi ikut meramaikan pasar kota Padang. Pada umumnya waktu sore mereka kembali ke desanya.

Mobilitas penduduk luar kota ke kota Padang relatif lebih besar. Kota Padang bukan sekadar tempat mencari kehidupan, juga sebagai tempat membeli kebutuhan pokok, baik kebutuhan keluarga maupun untuk dijual di kedai atau di warung ataupun pada "pasar nagari" yang terdapat di daerah itu.⁷⁾

Seperti yang telah dikemukakan di atas sejak abad 19 penduduk luar kota relatif lebih besar dari penduduk kota Padang sendiri.

Sesuai dengan perkembangan penduduk maka terjadi pula perkembangan transportasi. Sekitar tahun 1955 dibuka trayek oplet yang menghubungkan kota Padang dengan Tabing, Ampang, Gunung Pangilun dan Kampung Kalawi. Kalau trayek yang menghubungkan Padang dengan Indarung, Padang — Teluk Bayur dikelola oleh P.T., CV dan badan usaha lainnya, maka trayek baru ini diusahakan oleh orang perorangan yang mempunyai 1 atau 2 buah oplet. Oplet dibuat dengan memodifikasi Jeep-Jeep bekas Perang Dunia II yang dapat dimuat sebanyak 9-10 orang penumpang. Oplet ini juga nanti menjalani trayek Padang-Indarung dan Padang-Teluk Bayur. Karena oplet ini hanya bermuatan 9-10 orang menyebabkan frekuensi keberangkatan tinggi, sehingga mematikan usaha PT dan CV yang mengoperasikan bus ukuran menengah.

Sampai tahun 1975 jenis kendaraan bermotor yang digunakan tidak banyak mengalami perubahan, namun dari segi jumlah kendaraan terjadi peningkatan. Perkembangan ini juga diikuti oleh sistem pengisian oplet. Kalau dulu dilayani PT atau CV, maka sekarang dilayani oleh agen yang berasal dari bekas sopir oplet yang menganggur. Agen ini bukan merupakan organisasi yang teratur, tetapi kesepakatan yang tidak tertulis antara agen dengan supir-supir oplet. Sampai sekarang sistem keagenan mengisi penumpang oplet tersebut masih berlaku.

Menjelang akhir tahun 1980 terjadi pembaharuan jenis kendaraan yang digunakan. Satu persatu mobil bekas diganti dengan jenis yang baru. Untuk jurusan Padang Indarung dan Padang – Teluk Bayur digunakan merek Datsun yang bermuatan antara 13-17 orang. Untuk jurusan Padang – Air Tawar, Padang – Tabing, Padang – Parak Karakah dan Padang – Pampangan digunakan merek Suzuki. Selanjutnya untuk jurusan Padang – TABing – Lubuk Buaya dan Lubuk Minturun beroperasi mobil yang bermerek Datsun. Pada perkembangan terakhir sistem keagenan yang tidak resmi ini berubah menjadi organisasi yang resmi. Untuk jurusan Padang – Indarung dilayani oleh POPI, jurusan Padang – Air Tawar diurus oleh IKABE; untuk jurusan Padang – Ampang oleh POPAS, untuk Padang – Alai – Kandis dilaksanakan oleh PERSOPAK dan untuk jurusan Padang – Tabing – Lubuk Buaya – Lubuk Minturun dikelola oleh Koperasi Rakyat Koto Tengah atau KRKT.

Fungsi dari organisasi keagenan bukan hanya melayani penumpang dan kesejahteraan anggotanya, tetapi juga para supir yang mengalami kecelakaan karena tabrakan dan lain-lain. Walaupun telah terjadi peningkatan organisasi dan fungsi, namun organisasi ini tidak punya kantor resmi di terminal-terminal oplet, yang menjadi tempat pusat pertemuan mereka biasanya di rumah Ketua Organisasi keagenan tersebut.

Terminal oplet ini pada mulanya terletak pada berbagai tempat di lokasi Pasar Raya Padang, kemudian dipindahkan pada suatu lapangan di tengah Pasar Raya karena di lokasi ini akan dibangun kompleks pertokoan yang nantinya dikenal dengan nama kompleks Pasar Mambo, maka terminal oplet terpecah lagi pada berbagai tempat di lokasi Pasar Raya Padang. Menjelang akhir tahun 1980 semua terminal oplet yang tersebar itu disatukan lagi pada suatu tempat yang dikenal dengan nama Pasar Goan Hoat atau Pasar Miskin. Sebelumnya tempat ini adalah terminal bus antar kota.

Dengan meningkatnya jumlah oplet dan trayek yang menghubungkan kota Padang dengan daerah-daerah dan kampung di luar kota, maka peranan bendi atau dokar sebagai alat transportasi yang menghubungkan daerah luar kota dengan kota Padang makin merosot.

Sekitar tahun 1980 peranannya hanya menghubungkan Pasar Raya, Terminal Bus dan pusat perbelanjaan lain dengan pemukiman penduduk kota yang berjarak antara 1-3 km. Peranan bendi atau dokar sebagai alat transportasi dalam kota makin tergeser dengan hadirnya bemo. Di samping biayanya yang murah ketimbang bendi, bemo juga punya jaringan tetap dan teratur yang menghubungkan Pasar Raya Padang dengan lokasi pemukiman penduduk di berbagai tempat di dalam kota. Organisasi keagenan bemo juga sudah teratur, seperti organisasi oplet. Dalam rangka kebersihan, keindahan dan keteraturan kota maka bendi dilarang menempuh jalan raya tertentu. Perkembangan transportasi bermotor dan pembenahan K 3 hampir-hampir menghilangkan peranan bendi sebagai alat transportasi dalam kota. Pertambahan penduduk serta makin meningkatnya ekonomi, pendidikan dan pemerintahan menyebabkan bendi masih bertahan sampai sekarang. Tempat pemusatan bendi menunggu penumpang yang dalam istilah daerah "perhentian bendi" terletak di jalan Pasar Raya sebelah Barat Kantor Walikota, Jalan Pasar Baru dan terminal bus Lintas Andalas dan lain-lain.

Mengenai hubungan darat dengan kota-kota Kabupaten dan daerah lainnya pada awal tahun 1950 cukup parah, karena banyak jalan raya dan jembatan yang rusak dan hampir 95% dari kendaraan bermotor yang masih ada hanya terdiri dari mobil-mobil yang sudah tua. Dapat dikatakan lalu lintas antar kota dan daerah pedalaman sepi, bahkan tidak jarang pedati digunakan untuk membawa barang.

Kekurangan kendaraan bermotor ini segera diatasi pemerintah dengan memberi izin pembelian mobil secara kredit kepada perusahaan bus swasta. Dengan cara berangsur-angsur

kesibukan lalu lintas yang menghubungkan kota ini dengan daerah pedalaman mulai hidup kembali. Sampai akhir tahun 1952 trayek bus yang menghubungkan kota Padang dengan berbagai kota meningkat dengan pesat. Pada waktu itu ada 7 buah perusahaan bus yang menghubungkan kota Padang dengan kota Bukittinggi.⁸⁾ Perusahaan tersebut adalah: PO Gabungan APD, NV. NPM, NV, HIMSAR, Fa. M.E. AGAM, NC. ATOM, FLORA dan PLASTIC.

Penumpang yang turun di Bukittinggi dan hendak ke Matur, Palembang, Lubuk Basung harus menaiki oplet dan bus yang khusus beroperasi ke daerah-daerah tersebut.

Sungai Penuh merupakan daerah yang penting bagi kota Padang, karena hasil hutannya seperti Cassia Vera, kopi, beras, dan lain-lain. Sebaliknya Sungai Penuh sangat membutuhkan kota ini khususnya untuk memperoleh barang P & D, kain, barang bangunan dan lain-lain. Karena itu ada 9 perusahaan bus yang beroperasi ke daerah tersebut yaitu: PO. Plastik, PO. GOM, ME. AGAM, PO. Gesit, TOSRA, PO. A. Sentosa, Fa. TOBAS dan NV. ATOM. Di samping itu juga terdapat oto pracht milik perorangan yang khusus membawa barang dan hasil hutan. Kalau musim hujan jalan ke Sungai Penuh hampir tidak dapat ditempuh karena berlumpur. Tidak jarang dalam musim penghujan jalan ini ditempuh dalam 7 hari. Walaupun jurusan Sungai Penuh dilayani oleh 9 perusahaan atau perusahaan bus sama dengan Bukittinggi namun frekwensi keberangkatan bus lebih banyak ke jurusan Padang – Bukittinggi. Setiap $\pm \frac{1}{2}$ jam ada bus yang berangkat ke Bukittinggi. Perusahaan angkutan yang beroperasi pada jalur Padang – Bukittinggi menyediakan tidak kurang 75 buah bus.⁹⁾ Antara Padang – Sungai Penuh masih terdapat kota kecil antara lain: Siguntur, penghasil gambir, Tarusan, dan Painan sebagai penghasil ikan kering. Untuk itu ada pula trayek Padang – Siguntur yang dilayani perusahaan NV. Atom, Padang – Tarusan dilayani oleh perusahaan PO. A. Sentosa, Fa. Safko, NV. Atom dan Fa. Tosra; Padang – Painan dilayani oleh perusahaan Fa. Selamat,

NV. Atom dan PO. A, Sentosa. Walaupun Padang – Lubuk Alung dan Pariaman dilalui oleh jalan kereta api tetapi masih ada perusahaan bis yang beroperasi ke sana. Di samping daerah luar kota yang banyak penduduknya yang berdagang dan berbelanja balik hari juga ada yang menetap di dalam kota dan sewaktu-waktu kembali ke kampung halamannya. Trayek Padang – Lubuk Alung hanya dilayani oleh satu perusahaan bus yaitu PO. Plastik, karena penumpang dari dan ke Lubuk Alung masih dapat memanfaatkan bus-bus yang melayani Padang – Bukittinggi dan Padang – Batusangkar. Trayek Padang – Pariaman dilayani oleh 4 buah perusahaan bus yaitu: PO. Samudera, PO. Nusantara. M.E. Agam dan PO. Pesisir Sebatang Panjang. Dari terminal Pariaman penumpang dapat meneruskan perjalanan dengan menggunakan jasa angkutan bendi dan oplet.

Perlu diketahui bahwa Pariaman adalah ibukota Kabupaten Padang Pariaman dan Sungai Penuh adalah ibukota Kabupaten Pesisir Selatan Kerinci. Sekarang ini Kerinci masuk Propinsi Jambi.

Payakumbuh sebagai ibukota Kabupaten Lima Puluh Kota di samping dihubungkan oleh kereta api dari Padang juga dilayani oleh beberapa perusahaan bus. Trayek Padang – Payakumbuh walaupun hanya dilayani oleh 2 perusahaan bus pada tahun 1950-an yaitu PO Gabungan Sago dan M.E. Agam, namun ada beberapa perusahaan bus yang menghubungkan Bukittinggi dengan Payakumbuh antara lain: NV. Himsar, PO. GON, Gabungan APD dan PO. Gabungan Sago.

Antara Padang langsung ke Batusangkar sebagai ibukota Kabupaten Tanah Datar dilayani oleh beberapa perusahaan bus angkutan umum seperti: Gabungan Padri dan Gabungan APD. Sampai tahun 1970-an frekwensi hubungan Padang – Batusangkar tetap rendah dibandingkan dengan ibukota Kabupaten yang lain, bahkan pernah hanya dilayani oleh satu perusahaan bus APD saja.

Mengenai hubungan Padang dengan kota-kota di kabupaten Solok terdapat 3 trayek, yaitu: Padang – Solok, dan Padang

– Sawahlunto dan Padang – Muara Labuh. Trayek Padang – Solok ibukota Kabupaten Solok dilayani oleh perusahaan angkutan umum PO. Gunung Merah, PO. Andalas dan Gabungan APD. Trayek Padang – Sawahlunto dilayani oleh NV. Atom dan NV. NPM. Rute ini melewati kota Solok. Antara Solok – Sawah lunto dihubungkan juga oleh kendaraan umum yang diusahakan secara perorangan. Trayek Padang – Muara Labuh dilayani oleh perusahaan angkutan Fa. Selamat, PO. Gunung Merah dan PO. ADK. Banyaknya kendaraan umum yang menghubungkan Padang dengan Solok karena mobilitas penduduk Solok cukup besar ke Padang. Hal ini disebabkan penduduk Padang sebagian besar berasal dari Solok. Di samping itu Solok adalah gudang beras bagi Padang khususnya dan Sumatera Barat pada umumnya.

Kalau diperhatikan jumlah perusahaan darat bermotor pada tahun 1950-an yang menghubungkan kota Padang dengan daerah pedalaman Sumatera Barat cukup menggemblakan, sayangnya kebanyakan perusahaan tersebut tidak tahan lama, karena kelemahan dalam manajemen. Selama ± 30 tahun banyak perusahaan angkutan yang gulung tikar. Sampai tahun 1980 yang dapat bertahan hanya 2 perusahaan saja, yaitu: NV. NPM dan Gabungan APD. Di samping itu perusahaan angkutan darat yang baru yaitu ANS yang mempunyai trayek tidak saja untuk menghubungkan berbagai kota di pedalaman tetapi juga mempunyai trayek ke Medan, Pekanbaru, Palembang dan Jakarta. Di samping ANS muncul pula perusahaan angkutan yang baru seperti: Tri Arga dan Cemerlang yang melayani jurusan Padang – Bukittinggi, Bintang Kejora melayani trayek Padang – Payakumbuh, PO. Kawan menghubungkan Padang dengan Pariaman, PO. Harmoni dan Teratai melayani Padang – Lubuk Basung, PNB, HZN melayani Padang – Solok dan Sawahlunto, PNB melayani Padang – Solok. Semuanya hampir tidak bisa bertahan lama. Selanjutnya berdiri pula beberapa perusahaan angkutan umum yang menghubungkan kota Padang dengan daerah pedalaman Kabupaten

Solok yaitu: UBANI, Po. Terang dan PO. Hidup Bersama. Sampai tahun 1980 ada 4 perusahaan angkutan darat beroperasi dari Padang ke berbagai daerah dan kabupaten Solok yaitu: HZN, PO. Terang, PO. Hidup Bersama dan UBANI. Perusahaan yang terakhir ini tidak berkembang dibandingkan dengan 3 perusahaan lainnya.

Mengenai perusahaan angkutan umum yang melayani Padang – Sungai Penuh, walaupun mengalami nasib yang sama, NV Atom merupakan satu-satunya perusahaan yang agak lama bertahan. Ketika tahun 1960-an jalan raya yang menghubungkan Padang – Sungai Penuh mengalami kehancuran, maka trayek ke sana mengalami masa suram. Baik NV. Atom maupun perusahaan lain satu persatu menutup trayeknya. Setelah ada perbaikan jalan muncul lagi beberapa perusahaan angkutan, antara lain: Habeco, PO. Anak Gunung.

Beberapa kota kecil yang terletak di pantai Barat Sumatera Tengah dan kepulauan Mentawai mempunyai hubungan laut dengan kota Padang. Jalur pelayaran pantai Barat ini berkembang sejak zaman VOC, menjadikan Padang sebagai pusat perdagangan dan pelabuhan di pantai Barat Sumatera Barat. Jalur pelayaran pantai Barat itu ke Utara menghubungkan kota Padang dengan Pariaman, Tiku, Sasak, Air Bangis dan Pulau Tello di kepulauan Nias Sumatera Utara. Ke Selatan menghubungkan dengan Painan dan Indera putra. Pada umumnya pelayanan pantai berpusat di pelabuhan Muara yang dipergunakan sampai tahun 1970, oleh Tongkang atau biduk yang dijalankan dengan tenaga manusia. Di samping itu juga dipergunakan kapal-kapal kecil yang bertenaga mesin, namun jumlahnya relatif kecil. Hubungan dari Muara Padang atau Teluk Bayur dengan kepulauan Mentawai menggunakan kapal mesin. Menjelang tahun 1980 keadaan ini terbalik, peranan Tongkang sedikit demi sedikit mulai digeser oleh kapal bertenaga mesin. Pelayaran pantai ini terutama membawa hasil-hasil daerah seperti: beras, ternak, hasil hutan. Dari Padang dibawa barang P & D, kain, bahan bangunan dan lain-lain.

Dari Mentawai dibawa tepung sagu kayu gelondongan, penumpang, dan pedagang.

Ketika jalanraya ke pesisir Selatan Kerinci mengalami rusak berat, maka pelayaran antara Indrapura dengan Padang menjadi penting.

Begitu pula ketika jalandarat yang menghubungkan kota Padang dengan Kabupaten Pasaman mengalami rusak berat, maka pelayaran pantai antara kota Padang dengan Sasak dan Air Bangis menjadi ramai pula. Di antara perusahaan pelayaran yang menghubungkan Sumatera Barat khususnya dengan daerah-daerah lain adalah:

- P.T. Pelayaran Pantai Barat Indonesia
- P.T. Siaga Shipping Agencies, yang melayani Padang - Gunung Sitoli - Pulau Tello - Sinabang - Tapak Tuan - Meulaboh - Sabukan Haji - Olele, - Sasak - Air Bangis, dan 2 kali sebulan ke Bengkulu - Kroe.

2.2. Padang sebagai titik pusat komunikasi; daerah pedalaman dan kaitannya dengan wawasan nusantara.

Pada tahun 1950 kota Padang belum menjadi ibukota Propinsi. Pusat pemerintahan Propinsi Sumatera Tengah adalah Bukittinggi. Namun demikian Padang tetap sebagai pintu gerbang bagi daerah pedalaman. Pelabuhan Muara dan Teluk Bayur merupakan pintu gerbang pengiriman hasil bumi ke daerah lain. Di kota ini pula dijadikan sebagai tempat pemberangkatan para jemaah haji. Dalam aktivitas sosial ekonomi dan sosial budaya Padang bersaing dengan Bukittinggi. Untuk menjalankan fungsinya tersebut kota Padang mempunyai media cetak seperti surat kabar, telepon dan radio serta transportasi darat. Begitu pula untuk hubungan dengan dunia luar kota Padang juga disinggahi oleh PT. PELNI dan GIA. Keadaan ini berkembang dengan dinamika kotanya dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya. Lebih-lebih sejak kota Padang menjadi ibukota Propinsi Sumatera Barat pada tahun 1959, maka kedudukannya menjadi bertambah penting.

Peranan kota Padang sebagai pusat perguruan tinggi di Sumatera Barat mulai kelihatan sejak awal 1950-an. Atas inisiatif Yayasan Sriwijaya, tanggal 17 Agustus 1951 didirikan Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat. Kemudian atas usaha swasta yang lain berdiri pula Fakultas Ekonomi. Pada tahun 1954 kedua Fakultas ini menjadi Perguruan Tinggi Negeri dengan nama Universitas Andalas. Setelah terjadinya pergolakan daerah Sumatera Barat tahun 1958, seluruh Fakultas Negeri yang tersebar di Sumatera Barat seperti: Perguruan Tinggi Pendidikan Guru atau PTPG di Batusangkar, Fakultas Kedokteran di Bukittinggi dan Fakultas Pertanian di Payakumbuh ditarik ke Padang. Dengan demikian kampus Universitas Andalas disatukan di kota Padang.

Berdirinya perguruan tinggi negeri dan swasta di Padang pada awal tahun 1950-an mengundang pencari ilmu ke kota Padang. Dayatariknya sebagai pusat perguruan tinggi makin meningkat setelah kampus Universitas Andalas dipusatkan di kota ini. Para pelajar tamatan SLA berdatangan untuk menuntut ilmu pengetahuan. Di samping itu pemerintah juga mendatangkan dosen dari berbagai cabang ilmu. Di antara dosen tersebut ada yang berasal dari Inggris, Belanda dan India. Perkembangan perguruan tinggi ini memberi pengaruh pada masyarakat pedalaman. Merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi orang tua Minangkabau jika anaknya belajar di Universitas Andalas. Secara implisit mengangkat derajat keluarga si mahasiswa. Tidak jarang terjadi biaya studi mahasiswa atas gotong-royong kaum kerabatnya. Malahan ada orang tua yang menjual atau menggadaikan tanahnya untuk menyekolahkan anaknya ke perguruan tinggi.

Tidak dapat dimungkiri bahwa para mahasiswa tersebut akan membawa pengaruh kebudayaan perguruan tingginya dan kebudayaan kota Padang ke kampung asalnya.

Pers sebagai media cetak di samping memperlancar komunikasi antar golongan dan penduduk juga menambah intensif komunikasi antara kota Padang dengan daerah pedalaman.

Sejarah lahirnya Pers di kota Padang cukup panjang, pada tahun 1882 telah terbit surat kabar Pelita Kecil yang pada saat akhirnya dipimpin oleh Datuk Sutan Maharaja. Kemudian Pelita Kecil diganti namanya menjadi Warta Berita. Pada tahun 1890 terbit pula surat kabar Perca Barat di bawah pimpinan Ja Endar Muda. Tujuh tahun kemudian (1897) muncul pula surat kabar Cahya Sumatera yang dipimpin oleh Rajo Sampono. Pada dekade pertama abad XX secara berturut-turut terbit surat kabar Wasir Hendra di bawah Sutan Rajo Nan Gadang, Sinar Sumatera oleh Lim Sun Kim, dan Warta Hindia oleh Sutan Rajo Nan Gadang. Di samping itu pada tahun 1910 terbit pula surat kabar Dagblad Radio. Dari kalangan Wanita terbit pula surat kabar Sunting Melayu dipimpin oleh Siti Rohana (1911), dan Suara Perempuan oleh Sa'adah Alim (1919). Selain itu ada pula surat kabar yang berhaluan Islam bernama Al Munir yang dipimpin oleh H. Abdullah Ahmad.

Undang-undang *Vergader verbod* di sini pihak menekan pos daerah, di pihak lain mengembangkan cita-cita perjuangan kebangsaan Indonesia. Antara tahun 1925-1926 di Padang diterbitkan surat kabar "Buka Mata" oleh Syekh Muhammad Sahab. Salah satu surat kabar yang dianggap radikal yang terbit di kota ini tahun 1929 ialah Medan Rakyat yang dipimpin oleh H. Ilyas Yakub. Surat kabar ini berusaha menjembatani antara Islam dan cita-cita kebangsaan. Di masa pendudukan Jepang terdapat beberapa surat kabar seperti: Persamaan, Sinar Sumatera, Pewarta dan Dagblad Radio. Besarnya pengaruh surat kabar-surat kabar tidak terlepas dari partisipasi tokoh-tokoh pergerakan nasional di daerah ini seperti: Suska, Mulkan, Rustam Sutan Palindih, Marah Alif dan lain-lain.

Dari masalah-masalah sosial ekonomi dan sosial budaya Pers kota Padang melangkah pula kepada masalah sosial politik. Walaupun jangkauan surat kabar itu belum begitu meluas, namun andil mereka dalam membentuk opini politik di daerah pedalaman cukup besar. Cita-cita nasionalisme secara perlahan-lahan mulai mengalir ke daerah pedalaman. Desa-desa

di pedalaman mulai diseret ke dalam kancah politik nasional.

Pada zaman Jepang semua surat kabar tersebut tidak boleh diterbitkan, kecuali surat kabar milik Jepang yang bernama Padang Nippon. Wartawan-wartawan nasional hanya dijadikan pegawai pada suratkabar yang diterbitkan Jepang.

Walaupun kota Padang pada masa awal revolusi merupakan arena bentrokan bersenjata antara kaum republiken dengan NICA dan tentara Sekutu, namun wartawan yang nasionalis masih sempat menerbitkan surat kabar Utusan Sumatera.

Setelah pengakuan kedaulatan RI surat kabar yang ada di Padang ialah Harian Penerangan dan Haluan. Setelah kota Padang dibebaskan dari PRRI, terbit pula Harian Angkatan Bersenjata. Sekarang surat kabar ini berganti nama dengan Harian Semangat.

Di samping itu pada tahun 1960-an terbit pula surat kabar Aman Makmur yang anti komunis.

Sampai akhir tahun 1980 surat kabar yang terbit di Padang sirkulasinya telah menjangkau desa-desa di pedalaman. Peranan "masa education" telah memberi manfaat bagi perkembangan masyarakat. Di samping itu kota Padang juga berperan sebagai pusat penyebaran surat kabar terbitan Jakarta untuk kota lain dan pedalaman. Surat kabar terbitan Jakarta yang pernah beredar di Sumatera Barat antara lain Harian Pedoman, Harian Indonesia Raya, Harian Merdeka dan lain-lain. Surat kabar dari tingkat nasional ini menyebabkan arus Informasi dari seluruh penjuru tanah air mengalir ke pedalaman dengan kota Padang sebagai pintu gerbangnya. Keadaan ini akan mendekatkan mereka dengan daerah-daerah lain di Nusantara dan mempertajam wawasan mereka sebagai suatu masyarakat besar yang mendiami wilayah tertentu serta menyadari keterkaitan mereka satu sama lain dalam berbagai aspek kehidupan.

Peranan Padang sebagai pemancar siaran RRI baru dimulai pada tahun 1950. Ketika seluruh radio berada di bawah

pengawasan Kementerian Penerangan RIS, maka Radio Padang langsung menjadi cabang Radio Republik Indonesia Serikat yang berpusat di Jakarta. Mulai saat itu studio Republik Indonesia Serikat di Padang mulai memancarkan siaran-siarannya. Radio Padang hanya punya sebuah pemancar yang berkekuatan 0,25 KW dengan memakai gelombang 41 m. Pada akhir Desember 1950 RRI Padang telah menggunakan 2 buah pemancar yang masing-masing bergelombang 129,2 m untuk kota dan 75,76 m untuk daerah Propinsi Sumatera Tengah.

Pada tahun 1952 RRI Padang memiliki dua studio, yaitu Studio I untuk menyiarkan siaran lokal, kesenian daerah, pandangan mata dan lain-lain. Studio II untuk merelay siaran RRI pusat Jakarta untuk kepentingan regional. Sampai tahun 1970 radio baru merupakan konsumsi sebahagian orang-orang-orang kota di Sumatera Barat. Di desa masih sedikit ditemui radio. Kalau toh ada hanya pada orang-orang desa yang kaya. Itu bukan berarti orang pedalaman tidak tahu sama sekali berita-berita penting yang disiarkan dari Padang. Mobilitas penduduk dari desa ke kota atau sebaliknya, tersedianya sarana lapau atau warung, langgar dan mesjid, serta pekan bergilir, menyebabkan berita penting yang disiarkan radio melalui pembicaraan dari orang ke orang tersebar juga ke pedalaman.

Pada masa Pemilihan Umum tahun 1955, Radio Republik Indonesia dan surat kabar-surat kabar di Padang dipakai dalam rangka kegiatan kampanye. Untuk pertama kali penduduk pedalaman ikut dalam kegiatan politik. Informasi politik, opini politik dan komentar politik menembus masyarakat desa. Dengan turunnya tokoh-tokoh politik ke pedalaman dalam rangka kampanye mempertinggi partisipasi rakyat pedalaman dalam kegiatan politik. Pada waktu Pemilihan Umum ke II tahun 1971 dan Pemilihan Umum ke III tahun 1977 keterlibatan rakyat desa pedalaman Sumatera Barat makin besar. Hal ini disebabkan antara lain oleh perkembangan pers, radio dan Televisi yang sangat pesat. Perkembangan

an ini dimungkinkan pula karena perkembangan teknologi radio transistor, Televisi dan mulai masuknya aliran listrik ke daerah pedesaan. Khusus alat komunikasi massa Televisi benar-benar mendapat sambutan yang besar bagi rakyat pedesaan. Tidak jarang mereka menjual emas, ternak untuk dapat membeli Televisi. Perkembangan pada tingkat nasional maupun daerah dalam waktu singkat dapat diketahui oleh daerah pedesaan. Perkembangan alat komunikasi elektronika telah memperdekat jarak dan mempersatukan daerah pedalaman, kota serta tingkat nasional menjadi satu kesatuan hidup dalam berbagai dimensi. Di samping membawa pengaruh positif, perkembangan pemakaian Televisi juga menimbulkan ekses yang kurang menggembarakan. Kehidupan bentuk luar dari penduduk kota mengalir dengan cepatnya, yang kadang-kadang menimbulkan goncangan pada nilai-nilai dan norma yang berlaku pada masyarakat pedalaman. Dalam beberapa hal, penampilan pemuda desa, kota Padang dan Jakarta tidak berbeda secara menyolok. Perkembangan mode pakaian, model rumah dan seni dengan cepat ditiru dan dinikmati oleh penduduk desa pedalaman. Perkembangan seperti ini masih berlanjut sampai sekarang.

2.3. Problematik Kota.

Kota Padang adalah salah satu Kotamadya di Propinsi Sumatera Barat yang pada saat ini merupakan kota yang terluas di daerah ini. Luas daerah kota ini adalah 629,63 km² dengan penduduk sebanyak 480.607 jiwa atau dengan kepadatan rata-rata sebesar 767 jiwa per km². Kota ini terdiri dari 11 kecamatan dan 193 kelurahan. Sebahagian besar dari kecamatan yang ada boleh dikatakan masih dalam kondisi daerah pedesaan, sebagaimana kebanyakan desa-desa yang ada di daerah Sumatera Barat.¹⁰⁾

Dari 193 kelurahan yang ada, baik di pusat kota maupun yang dijumpai di pinggir kota masih tergolong kelurahan dengan kondisi relatif rendah. Kondisi perkampungan se-

macam ini tidak hanya ditentukan oleh lingkungan fisik tetapi juga oleh keadaan sosial dan ekonomi masyarakat.

Ditinjau dari kondisi jalan-jalan, dapat dinyatakan bahwa masih banyak jalan-jalan yang belum memadai, khususnya di pinggiran kota. Jalan-jalan yang relatif baik dijumpai hanya di pusat kota.

Hal yang sama juga terlihat pada selokan pembuangan air kotor, seperti bekas mandi, cuci dan air buangan lainnya. Keadaan demikian seringkali mengganggu bilamana curah hujan cukup lebat. Sering sebagian kampung-kampung mengalami banjir. Selokan yang teratur yang dibuat dengan sistem pengairan yang baik sebagian baru dijumpai pada kompleks-kompleks perumahan dan atau pada perumahan elite.

Dilihat dari segi bangunan semakin ke pinggir kota semakin jarang dijumpai gedung-gedung yang permanen. Hal ini lebih kentara rumah penduduk atau bangunan di daerah pertanian yang kurang subur. Bangunan semacam ini disebut pondok.

Situasi perumahan seperti tersebut di atas pada umumnya dialami oleh penduduk yang memiliki latar belakang pekerjaan sebagai buruh besar, pedagang kaki lima dan sebagainya. Tingkat kehidupan mereka juga sederhana.

Suatu hal yang sering disinyalir tentang kehidupan kaum tani yang relatif miskin itu adalah karena corak kehidupan mereka yang banyak santai dan tidak mempunyai keterampilan khusus. Di samping itu banyak kaum tani pada daerah pedesaan atau pinggir kota ini hanya sebagai buruh tani. Dapat dibayangkan suasana kehidupan mereka dengan penghasilan sekitar Rp. 1.000,- perhari, dan sering pula tidak mendapatkan kerja.

Keadaan serupa juga dijumpai pada sebahagian nelayan di sepanjang pantai kota Padang. Pada daerah dimaksud banyak nelayan yang hidup sebagai buruh nelayan dan tidak bermodal sama sekali, selain hanya tenaga. Pada umumnya pendidikannya rendah dan kurang memiliki keterampilan.

Walaupun kehidupan mereka sederhana tetapi pergaulan sesama warga dan tetangga cukup baik. Kehidupan ekonomi tidak menghapus kebiasaan desa. Sebagian dari hal ini berkat dorongan budaya dan agama.¹²⁾

CATATAN KAKI.

- 1). Kementerian Penerangan, *Propinsi Sumatera Tengah*, Jakarta, 1950, hal 711.
- 2). Karena para penumpangnya kebanyakan tukang sabit rumput untuk makanan kuda.
- 3). Kementerian Penerangan, *Op Cit*, hal 711.
- 4). Berdasarkan peraturan pemerintah No. 17 tahun 1980 daerah ini dijadikan wilayah Tingkat II Kotamadya Padang dengan status kecamatan.
- 5). *Ibid*, hal 719.
- 6). Pada waktu pagi sampai jam 11.⁰⁰, penumpang yang banyak hanya dari luar kota sedangkan pada sore hari penumpang terbanyak hanya menuju luar kota.
- 7). Pasar nagari antara lain Pasar Bandar Buat yang hari pasarnya hari Selasa dan Sabtu.
Pasar Indarung hari pasarnya hari minggu dan Pasar Lubuk Buaya pasarnya hari Minggu.
- 8). Kementerian Penerangan, *Op Cit*, hal 719.
- 9). *Ibid*, hal 719.
- 10). Marnis Nawi, Drs, et al, *Perkembangan Di Perkotaan Sebagai Pola Adaptasi Sosial Kehidupan Di perkampungan Miskin Kota Padang*, IDKD Sumatera Barat 1982, hal 7.
- 11). *Ibid*, hal 9.
- 12). *Ibid*, hal. 12.

BAB III STRUKTUR KOTA

3.1. Gambaran Umum.

Kota Padang secara geografis terletak pada koordinat $100^{\circ}22'$ BT dan $0^{\circ}56'$ lintang Selatan, dengan luas daerah administrasi seluruhnya lebih kurang $629,63 \text{ km}^2$.

Batas-batas wilayah kota adalah : sebelah utara dengan Kabupaten Padang Pariaman, sebelah selatan dengan Kabupaten Pesisir Selatan, sebelah timur dengan Kabupaten Solok dan sebelah barat dengan Samudera Indonesia.

Sama halnya dengan pesisir pantai Barat Sumatera seperti Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman, dan Kabupaten Pesisir Selatan, iklim Kota Padang tergolong kepada iklim hujan tropis dan basah. Suhu berkisar antara $28,5^{\circ} \text{C} - 31,5^{\circ} \text{C}$ di siang hari, $24^{\circ} \text{C} - 25,5^{\circ} \text{C}$ di malam hari. dengan demikian suhu rata-rata berkisar antara $25^{\circ} \text{C} - 27,5^{\circ} \text{C}$. Perubahan suhu rata-rata mencapai 2°C . Musim-musim kering di daerah ini terjadi antara bulan Mei sampai September, sedangkan musim-musim basah mulai bulan Oktober, Nopember, Desember, Januari, Pebruari dan Maret.¹⁾

Curah hujan pada bulan-bulan yang tergolong kering berkisar antara 147 mm sampai dengan 257 mm. Sedangkan curah hujan pada bulan-bulan basah berkisar antara 295 mm

sampai dengan 476 mm. Dapat dikemukakan di sini bahwa puncak dari bulan-bulan basah biasanya terjadi pada bulan Oktober dan Nopember.

Selain itu seperti telah dikemukakan bahwa Kota Padang merupakan daerah yang terdiri dari dataran pantai dan bukit-bukit serta pulau-pulau kecil yang berkarang. Daerah ini mempunyai panjang pantai 84 km, dan diairi oleh lima buah sungai yaitu Sungai Batang Arau, Batang Kuranji, Batang Tarung, Batang Kandis, dan Batang Lagan yang mengairi daerah-daerah persawahan dan perladangan.

Sebagai implikasi dari kenyataan ini maka wilayah Kota yang efektif dihuni hanya seluas 30,52% atau 192 km². Sedangkan sisanya sebanyak 69,48% atau 437 km² terdiri dari daerah perbukitan dan pulau-pulau karang.

Berdasarkan data/informasi yang diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum ternyata pada tahun 1979 panjang jalan yang ada di Kotamadya Padang lebih kurang 200.915 meter. Pada tahun 1980 panjang jalan tersebut bertambah menjadi 300.400 meter. Hal ini berarti bertambah sepanjang 99.485 meter, atau 33,12% dari panjang jalan yang ada di tahun 1979.²⁾

Dari panjang jalan tersebut tujuh diantaranya sudah dapat dimasukkan pada jalan yang sudah dapat diisi, walaupun masih memperlihatkan kecenderungan pada klasifikasi jalan tanpa kelas.

Pada tahun 1979 panjang jalan tanpa kelas semacam ini berjumlah 91.348 meter sedangkan pada tahun 1980 panjang jalan yang dimaksud dengan jumlah panjang jalan dalam tahun masing-masingnya maka ternyata dalam tahun 1979 panjang jalan yang dimaksud berjumlah 45,46% dari panjang jalan seluruhnya di tahun tersebut, sedangkan pada tahun 1980 turun menjadi 35,08% jika dibandingkan dengan panjang jalan yang ada pada tahun yang sama.

Implikasi dari keadaan yang demikian adalah kenaikan persentase klasifikasi jalan kelas V, kelas IV dan kelas III A pada tahun 1980 jika dibandingkan dengan tahun 1979. Pada tahun 1979 panjang jalan kelas V adalah 47.531 meter naik

pada tahun 1980 menjadi 85.466 meter, panjang jalan kelas IV dalam tahun 1979 adalah 26.420 meter naik menjadi 60.000 meter pada tahun 1980, begitu juga panjang jalan kelas III A dalam tahun 1979 adalah 11.350 meter dan naik menjadi 20.000 meter dalam tahun 1980. ³⁾

Perlu dikemukakan bahwa sampai 1979 jalan kelas II belum dijumpai. Baru dalam tahun 1980 panjang jalan kelas II berjumlah 12.805 meter atau 4,26% dari panjang jalan yang ada di tahun tersebut. Dengan adanya penambahan panjang jalan dan semakin baiknya klasifikasi jalan maka perhubungan darat semakin baik pula. Hal ini mempunyai inpak langsung terhadap kehidupan masyarakatnya.

Jika dibandingkan kondisi jalan 1979 — 1980 maka dapat dinyatakan bahwa dalam tahun 1979 jalan yang telah diaspal baru 109.567 meter atau 54,53% dari panjang jalan yang ada di tahun itu, sedangkan dalam tahun 1980 panjang jalan yang telah diaspal ini naik menjadi 195.000 meter atau 64,91%.

Jika dibandingkan pula panjang jalan yang masih berkerikil dan tanah pada kedua tahun tersebut maka dalam tahun 1979 panjang kedua jenis jalan tersebut adalah 91.348 atau 45,47%, sedangkan dalam tahun 1980 berjumlah 105.400 meter atau 35,09%.

Segi lain yang dapat dikemukakan adalah bahwa jalan-jalan yang belum teraspal sampai pada tahun 1980 hanya lebih kurang sepertiga dari panjang jalan yang ada di daerah ini.

Peranan perhubungan yang tak kalah pentingnya adalah jembatan. Dari data/informasi yang diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Padang dalam tahun 1979 jumlah jembatan yang ada sebanyak 31 buah dengan panjang 345,00 meter. Sedangkan dalam tahun 1980 dengan jumlah jembatan yang sama, panjangnya adalah 427,65 meter. Hal ini disebabkan adanya perbaikan pada beberapa jembatan, dan dijadikan jembatan yang permanen. Dari 31 buah jembatan yang terdapat di pusat kota tersebut dalam tiga kecamatan, yaitu 11 buah di Kecamatan Padang Barat, 15 buah di Kecamatan Padang Timur dan lima buah berada pada Kecamatan Padang Selatan. ⁴⁾

Berdasarkan data/informasi yang diperoleh, ada tiga macam saluran air yang ada di daerah ini, yaitu saluran primer, sekunder dan tertier.

Jenis saluran primer terbagi dua bahagian yaitu permanen dan tanah. Dalam tahun 1978 dan 1979 panjang kedua jenis saluran ini tidak menunjukkan perbedaan yang berarti; jumlahnya tetap sama yaitu 11.435 meter, dengan lebar 4 – 7 meter. Sedangkan pada tahun 1980 kedua jenis saluran tersebut bertambah besar 4.065 meter, dengan lebar yang sama. Hal ini menunjukkan kenaikan sebesar 26,23%.

Bila ditinjau pada saluran sekunder dengan lebar 2 – 4 meter pada umumnya jauh lebih besar dibanding dengan saluran tanah dan yang berjenis permanen. Dalam tahun 1978 panjang saluran primer dengan jenis permanen satu berbanding lima dengan saluran jenis tanah, atau 15,21% dengan 74,79%. Keadaan demikian tidak berbeda dengan tahun 1979.⁵)

Tahun 1980 penambahan panjang riol atau saluran sekunder ini menunjukkan perbedaan yang cukup berarti dengan dua tahun sebelumnya yaitu 18.100 meter dalam tahun 1980 dan 8.220 meter pada tahun 1978 dan 1979, atau bertambah sebesar 54,59%. Bila ditinjau pada saluran tertier, ternyata panjangnya 100.721 meter dalam tahun 1978 dan 1979. Sedangkan dalam tahun 1980 bertambah menjadi 145.000 meter atau sebesar 29,85% dari tahun sebelumnya.

Dari tiga macam saluran yang tersebut dari tahun ke tahun terlihat kualitasnya bertambah baik, di samping jumlahnya juga bertambah. Di pusat kota sendiri saluran primer dan sekunder telah berfungsi, dibandingkan saluran tertier. Sedangkan di pinggir kota baik saluran primer, sekunder, maupun tertier umumnya terbuat dari tanah, sebahagian telah berfungsi mengairi tanah pertanian di daerah ini.

Ada tiga jenis bangunan fisik yang dijumpai di daerah ini yaitu tunggal, gedung dua, dan gedung banyak yang tersebar dalam sebelas kecamatan di kota ini. Jenis bangunan tunggal terbagi lagi atas yang tidak bertingkat dan yang bertingkat. Dari

seluruh jumlah bangunan tunggal yang tidak bertingkat di daerah ini banyak dijumpai pada empat kecamatan yaitu Kecamatan Koto Tangah sebanyak 14,55%, Kecamatan Kuranji 14,15%, Kecamatan Padang Timur sebesar 12,70% dan Kecamatan Padang Barat sebanyak 12,70%. Sisanya sebanyak 10,44% terdapat di Kecamatan Lubuk Begalung, 9,93% di Kecamatan Padang Utara, 6,92%, di Kecamatan Pauh, 6,20% di Kecamatan Nanggalo, dan selebihnya sebanyak 18,20% berada pada Kecamatan Lubuk Kilangan, Kecamatan Bungus/Teluk Kabung, dan Kecamatan Padang Selatan.⁶)

Sebagian jenis bangunan tunggal ada yang bertingkat. Jenis bangunan seperti ini dijumpai sebanyak 24,30% di Kecamatan Pauh, 17,98% di Kecamatan Kuranji dan 16,74% di Kecamatan Padang Barat. Sedangkan sisanya ditemui pada delapan kecamatan lainnya atau sebesar 40,98%.

Jumlah bangunan tunggal baik yang tidak bertingkat maupun yang bertingkat di pusat kota paling banyak dijumpai di Kecamatan Padang Barat. Hal ini disebabkan wilayah penduduknya sangat padat.

Sebanyak 74,09% dari jumlah bangunan bertingkat gandengan dua (kopel) dijumpai pada tiga kecamatan, yaitu 30,36% di Kecamatan Padang Barat, 28,75% di Kecamatan Padang Timur, dan 14,98% lagi di Kecamatan Padang Selatan.

Berkaitan dengan bangunan-bangunan yang dikemukakan di atas adalah tentang penggunaannya. Sebagian diperuntukkan sebagai tempat tinggal, toko/perdagangan, industri/kerajinan, penginapan, dan lain sebagainya. Dari 172.495 jumlah bangunan, penggunaan yang terbanyak adalah untuk rumah tangga, tempat tinggi masing-masingnya sebagai berikut :

- Rumah tangga 86.188 buah 49,91%
- Tempat tinggal 76.632 buah 44,42%
- Lainnya 5.181 buah 3,00%
- Toko/Perdagangan 3.520 buah 2,04%.

Sebanyak 0,45% untuk industri/kerajinan dan 0,18% untuk penginapan/restoran. Bangunan tempat tinggal banyak di-

jumpai di Kecamatan Padang Barat (16,11%), Kecamatan Padang Timur 14,82%, Kecamatan Padang Selatan 11,09%, Padang Utara 10,56%, Kuranji 10,60% dan Koto Tangah 10,23%. Sisanya 26,59% berada di Kecamatan lainnya.

Hampir dua perlima dari jumlah toko-toko berada di Kecamatan Padang Barat (38,32%). Hal ini tidak mengherankan karena kecamatan ini berada di pusat kota.

Penggunaan bangunan pertokoan juga dominan di Kecamatan Koto Tangah (12,76%), Kecamatan Padang Selatan (11,25%) dan Kecamatan Padang Timur (11,22%).

Bangunan untuk industri/kerajinan banyak dijumpai di Kecamatan Padang Barat, Kecamatan Padang Selatan, Kecamatan Padang Timur dan Kecamatan Lubuk Begalung atau (60,44%).

Hampir tiga perlima dari jumlah bangunan yang digunakan untuk penginapan/restoran berlokasi di Kecamatan Padang Barat. Di tempat ini banyak dijumpai hotel-hotel dan rumah-rumah makan. Sisanya ditemui di bagian kota yang lain.⁸⁾

3.2. Perkembangan Urbanisasi.

Dilihat dari sudut aktivitas perekonomian, maka pasar merupakan syarat atau kebutuhan penting bagi sebuah kota. Secara sederhana, pasar dapat diterjemahkan sebagai wadah yang mempertemukan para penjual dan pembeli. Berbagai macam benda yang dibutuhkan untuk mempertahankan kehidupan, mulai dari pangan, sandang sampai kepada barang-barang kebutuhan sekunder seperti sepatu, televisi dan radio serta yang sejenis dengan itu tersedia di pasar. Perputaran barang-barang di pasar itu, adalah cermin dari proses perdagangan yang pada gilirannya merupakan suatu gejala konstruktif, dalam rangka mempertinggi income atau pemasukan bagi perekonomian kota.

Untuk menciptakan kelancaran aktivitas perekonomian melalui pasar, maka diperlukan usaha pengembangan penyediaan fasilitas ekonomi pasar itu sendiri. Dalam konteks inilah, pemerintah kota Padang telah berupaya terus meningkatkan pe-

ngadaan fasilitas pasar secara bertahap-tahap. Selama kurun waktu semenjak tahun 1950 sampai dengan tahun 1979, terlihat adanya usaha pengembangan fasilitas ekonomi ini.

Pada tahun 1950 keadaan fasilitas pasar di Kota Padang umumnya masih berupa los-los, yang terbuat dari kayu dan beratap seng. Masing-masing los itu khusus menyediakan jenis barang-barang tertentu seperti kain, kelontong, ikan, sayur-sayur dan lain-lain.⁹⁾ Kemudian lambat laun mengalami perubahan. Pembongkaran los-los dilakukan dan sebagai gantinya dibangun petak-petak kios. Ketika fasilitas pasar masih berupa los-los, pedagang tidak bisa menyimpan barang-barang dagangannya di pasar. Hal ini merupakan indikasi kemajuan dalam upaya penyediaan fasilitas pusat perbelanjaan.

Pada tahun 1955 terjadi peristiwa kebakaran yang memusnahkan bangunan petak-petak kios pasar Kota Padang.¹⁰⁾ Kebakaran ini sempat mengganggu kelancaran aktivitas perekonomian pasar sehingga pemerintah kota berusaha mencari jalan ke luarnya. Usaha yang dilakukan oleh pemerintah kota adalah dengan membangun fasilitas pasar yang permanen. Semenjak tahun 1959 sampai dengan tahun 1978, perkembangan penyediaan fasilitas pasar dapat disimak melalui data-data sebagai berikut :

A. PASAR RAYA

1. Pasar Bertingkat Fase I dibangun tahun 1959
2. Pasar Bertingkat Fase II dibangun tahun 1962
3. Pasar Bertingkat Fase III dibangun tahun 1964
4. Pasar Bertingkat Fase IV dibangun tahun 1971 dengan biaya Rp. 60.154.444,25
5. Pasar Bertingkat Fase V dibangun tahun 1972
6. Pasar Bertingkat Blok A dibangun tahun 1973 dengan biaya Rp. 127.232.000,00
7. Pasar Bertingkat Fase VI dibangun tahun 1974 dengan biaya Rp. 133.822.000,00
8. Pasar Bertingkat Fase VII dibangun tahun 1976 dengan biaya Rp. 732.361.695,00

9. Pasar Raya Timur Blok I dibangun tahun 1978 dengan biaya Rp. 154.843.150,00
10. Pertokoan Rajawali dibangun tahun 1973 dengan biaya Rp. 52.250.000,00 dengan dana Inpres.

B. PASAR PEMBANTU

1. Pasar Simpang Haru dibangun tahun 1973.
2. Pasar Ulang Karang dibangun tahun 1974 dengan biaya Rp. 41.225.042,80
3. Pasar Tanah Kongsu dibangun tahun 1976 dengan biaya Rp. 19.080.865,00
4. Pasar Alai dibangun tahun 1974 dengan biaya Rp. 71.075.000,00¹¹⁾

Tersedianya fasilitas pasar yang memadai bagi penduduk kota merupakan kondisi yang mendorong semakin besarnya volume penampungan barang-barang yang didistribusikan. Keadaan fasilitas pasar yang demikian, sanggup mengimbangi arus kedatangan barang-barang dari daerah lain, guna memenuhi konsumsi penduduk kota yang jumlahnya cenderung meningkat.

Dalam rangka menjamin kelangsungan aktivitas perekonomian penduduk diperlukan perhatian pemerintah kota terhadap peningkatan kuantitas dan kualitas jalan-jalan. Hal ini mengingat jalan merupakan prasarana yang menentukan bagi usaha pengembangan kegiatan perekonomian. Di samping itu, jalan-jalan ini juga dibutuhkan oleh penduduk kota untuk memudahkan kontak atau interaksi antar penduduk kota. Inventarisasi mengenal jalan-jalan di kota ini baru mulai dilakukan oleh Tim Perencana Pembangunan Daerah atau TEPPEDA Kotamadya Padang pada tahun 1973/1974. Inventarisasi tahun 1973/1974 ini, menginformasikan bahwa jumlah jalan-jalan yang terdapat di kota Padang adalah sepanjang 174,2 km, yang terdiri dari jalan aspal sepanjang 73,1 km, jalan kerikil 36,6 km dan selebihnya masih berupa jalan tanah.¹²⁾ Pada tahun-tahun berikutnya, pertumbuhan jalan-jalan mengalami peningkatan. Pada tahun 1979 panjang jalan aspal bertambah menjadi 252,01

km, jalan kerikil sepanjang 183,80 km, sedangkan sepanjang 184,39 km masih berupa jalan tanah.¹³⁾ Dari data-data tersebut, mencerminkan perhatian yang sungguh-sungguh Pemerintah kota terhadap pengadaan jalan-jalan di kota Padang. Bersamaan dengan itu, terlihat pula semangat pengorbanan seperti gotong-royong yang hidup dalam masyarakat, guna membantu pemerintah dalam upaya meningkatkan pertumbuhan jalan-jalan.

Untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, maka pemerintah kota mengusahakan peningkatan pembangunan lembaga-lembaga pendidikan.¹⁴⁾ Diharapkan pelaksanaan dari rencana kerja bidang pendidikan ini, akan mampu menampung anak-anak usia sekolah yang berhasrat terhadap pendidikan. Semenjak tahun 1969 sampai tahun 1974 jumlah sekolah/taman kanak-kanak atau STK sebanyak 37 buah. Dalam kurun waktu yang sama dibangun pula sebanyak 134 buah Sekolah Dasar atau SD, 17 buah Madrasah Ibtidaiyah Negeri/Swasta, 17 buah SMP, 3 buah SMEP, 2 buah SKKP, 4 buah Sekolah Teknik atau ST, 1 buah KPAP dan 2 buah PGA pertama. Sedangkan jumlah lembaga pendidikan tingkat atas atau SMTA sejak tahun 1969 sampai dengan tahun 1974 adalah sebanyak 8 buah SMA Negeri dan Swasta, 5 buah STM Negeri dan Swasta, 6 buah SPG Negeri dan Swasta, 1 buah SMOA, 1 buah SPMA dan 1 buah SMF atau Sekolah Menengah Farmasi. Juga terdapat 1 buah Sekolah Perawat/Bidan, 1 buah SAKMA, 1 buah STMA, 1 buah SMPP, 4 buah PGA Atas, 1 buah Thawalib dan 1 buah Persiapan IAIN.

Jumlah lembaga-lembaga pendidikan itu, mengalami pertambahan pada tahun-tahun berikutnya. Hal ini bertujuan untuk mengimbangi pertambahan penduduk usia sekolah yang jumlahnya semakin meningkat terus. Pertambahan ini terbukti melalui data tentang perkembangan pendidikan di kota Padang pada tahun 1979.¹⁵⁾ Pada tahun ini jumlah sekolah dasar 162 buah, dengan perincian 80 buah sekolah negeri, 32 buah Inpres, 16 buah subsidi, dan 35 buah swasta. SMP sebanyak 28 buah, 9 buah adalah negeri, 4 buah subsidi, 13 buah

swasta dan 2 buah bantuan. Dari 18 buah SMA, 3 buah di antaranya adalah sekolah negeri, 12 swasta dan 3 buah subsidi, gejala pertambahan ini juga dialami oleh lembaga-lembaga pendidikan kejuruan seperti SMEA, SPG, STM dan lain-lain, baik yang bersifat negeri maupun swasta.

Selama periode tahun 1950 sampai dengan tahun 1979, lembaga-lembaga pendidikan tinggi memperlihatkan perkembangan yang mengagumkan. Dalam periode ini terdapat di kota ini cukup banyak lembaga pendidikan tinggi, dengan berbagai jenis dan tingkatannya. Di antaranya adalah IKIP, Universitas Andalas, Institut Agama Islam Negeri, Sekolah Tinggi Olahraga, AMA, AAN, AKBP, ATP, AAI, APP, Akademi Bahasa Asing Prayoga, Sekolah Tinggi Sosial Politik, ATI, ITTSB, Universitas Muhammadiyah, ASMI dan lain-lain. Pendidikan tinggi yang ada di kota ini, didirikan atas inisiatif pemerintah dan pihak-pihak yayasan swasta yang memiliki kesadaran akan pentingnya arti pendidikan tinggi. Pendiannya bertujuan menampung tamatan pendidikan tingkat atas, yang jumlahnya mengalami peningkatan sepanjang tahun.

Pemerintah kota Padang tidak hanya memusatkan perhatiannya terhadap pembangunan di bidang fisik, melainkan juga pembangunan spiritual atau mental keagamaan. Salah satu pembangunan keagamaan ini adalah pendirian sarana-sarana ibadah seperti mesjid, mushalla, gereja dan lain-lain. Kita sering mempunyai persepsi, bahwa banyak tidaknya jumlah sarana keagamaan itu merupakan cerminan dari kesadaran beragama penduduk suatu tempat. Bertolak pada persepsi demikian, maka kesadaran beragama penduduk kota Padang cukup menggembarakan. Kerjasama antara pemerintah kota dengan para pemeluk agama, terutama kaum muslimin terjalin dengan eratnya, khususnya dalam rangka meningkatkan intensitas pembangunan sarana-sarana peribadahan. Peningkatan ini dapat diketahui lewat data-data sebagai berikut.

Jumlah Rumah Ibadat di Padang (1970 – 1975)¹⁶⁾

No.	Jenis	1970	1971	1972	1973	1974	1975
1.	Mesjid	69	70	72	73	73	74
2.	Mushalla	104	123	123	131	133	138
3.	Gereja Ka- tholik	6	6	6	6	6	6
4.	Gereja Pro- testan	4	5	5	5	5	5
5.	Kelenteng	1	1	1	1	1	1
6.	Pura	1	1	1	1	1	1

Pada tahun 1979 terjadi peningkatan jumlah sarana ibadah, sehingga mesjid berjumlah 183 buah dan 550 buah mushalla.¹⁷⁾

Aspek kesehatan juga tidak luput dari titik perhatian. Secara berangsur-angsur pemerintah kota berupaya memperbanyak jumlah sarana atau fasilitas kesehatan. Jumlah sarana dan fasilitas kesehatan yang terdapat di kota ini, menurut data tahun 1974/1975 adalah sebagai berikut :¹⁸⁾

No.	Jenis	Pemerintah	Swasta	ABRI	Jumlah
1.	RSUP	1	—	—	1
2.	RST	—	—	1	1
3.	Puskesmas	4	—	—	4
4.	Balai Pengobatan	13	12	2	27
5.	BKIA	16	7	—	23
6.	Klinik Bersalin	—	11	2	13
7.	Apotik	—	21	—	21
8.	Rumah Obat	—	24	—	24

Pada mulanya penyebaran fasilitas kesehatan hanya terkonsentrasi di kota. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya pemerintah kota meningkatkan penyebarannya. Intensitas penyebaran ini, sekaligus menyebabkan semakin banyaknya jumlah sarana dan fasilitas kesehatan yang melayani masyarakat di daerah-daerah pinggiran kota. Tahun 1979, terlihat pertambahan jumlah sarana kesehatan.¹⁹⁾ Puskesmas menjadi 6 buah 5 buah negeri dan 1 swasta, 33 buah Balai Kesehatan Ibu dan atau BKIA, dengan perinciannya 18 buah milik pemerintah dan 15 buah milik swasta. Pada tahun 1979 ini pula terdapat 31 buah Balai Pengobatan, yakni 18 milik pemerintah dan 13 buah swasta, 18 buah rumah bersalin, dan 34 buah rumah obat. Dengan demikian selama 4 tahun, yaitu dari tahun 1975 sampai dengan tahun 1979 terjadi hampir 50% pertambahan fasilitas kesehatan di kota Padang. Peningkatan ini dimungkinkan karena dukungan swasta. Sejalan dengan itu, jumlah tenaga-tenaga medis seperti tenaga dokter umum, dokter spesialis, perawat juga mengalami pertambahan sebagian tenaga ini berasal dari Universitas Andalas Padang yang memiliki Fakultas Kedokteran, dan Sekolah Perawat Kesehatan atau SPK.

Kota Padang juga mempunyai beberapa tempat rekreasi. Dapat dikatakan, bahwa tempat-tempat rekreasi itu dapat dikategorikan ke dalam dua bentuk. Pertama adalah objek wisata yang mengandalkan keindahan alam. Dalam kategori ini termasuklah keindahan pantai Padang, kesejukan Gunung Padang, pantai Air Manis yang sanggup mencuri simpati para pengunjungnya. Kategori kedua adalah berupa obyek-obyek wisata yang mengandung nilai-nilai bersejarah, seperti Museum Daerah Adityawarman yang di depannya terhampar kehijauan rerumputan, Taman Melati tempat anak-anak muda memadu kasih, Tugu Bagindo Aziz Chan yaitu Walikota Padang yang dibunuh dalam kancah perjuangan agresi militer Belanda. Ke tempat-tempat inilah para wisatawan domestik dan luar negeri pergi dalam rangka memanfaatkan waktu senggang.

Dari tahun 1969 sampai dengan tahun 1976 di kota ini prasarana yang mendukung kepariwisataan, yakni berupa hotel

26 buah dengan kamar 604 buah.²⁰) Pada periode ini, terdapat pula 7 buah bioskop sebagai sarana hiburan bagi masyarakat.²¹) Pada tahun 1979 jumlah bioskop meningkat menjadi 14 buah. Bioskop yang baru dibangun ini, di antaranya adalah Indah Theatre di Ulak Karang, Terendam dan lain-lain.

3.3. Perkembangan Pemukiman.

Tanggal 17 Agustus 1945 merupakan tonggak penting di dalam lembaran sejarah Indonesia, karena pada waktu inilah bangsa Indonesia berhasil merebut kemerdekaannya setelah tenggelam di bawah dominasi penjajahan bangsa Belanda dan Jepang. Sungguhpun kemerdekaan telah tercapai, namun pihak Belanda melanjutkan terus usahanya untuk menjajah Indonesia, seperti terbukti dengan peristiwa agresi militer yang dilakukannya pada tahun 1947 dan 1948. Belanda baru mengakhiri usahanya ini pada akhir tahun 1949, dan mengakui kedaulatan bangsa Indonesia. Semenjak tahun 1950, Pemerintah Republik Indonesia mulai merasakan arti kemerdekaan itu, dan masalah-masalah yang akan digarap melalui proses pembangunan mulai dipikirkan.

Pemerintah Kota Padang sebagai bagian dari Negara Republik Indonesia, semenjak tahun 1950 itu segera mengawali rencana kerja pembangunan, yang meliputi berbagai bidang kehidupan. Dalam hal ini termasuk pembangunan di bidang pemukiman atau perumahan. Pertama-tama yang menjadi prioritas di bidang ini adalah pembangunan perumahan yang disediakan untuk para pegawai pemerintah.

Pada masa pemerintahan Walikota Padang yang dijabat oleh dr. Rasyidin dari tahun 1950-1957, mulai dibangun perumahan untuk pegawai di daerah-daerah pinggiran kota, seperti Padang Baru atau Rimbo Kaluang, Padang Baru Timur, Air Tawar, Siteba dan Ulak Karang.²²) Lokasi perumahan baru di Padang Baru, pada mulanya adalah milik orang Cina yang digunakannya sebagai lokasi pabrik minyak goreng Lam Kiaw. Tanah ini kemudian dibeli oleh Gubernur sekitar 1.000

meter persegi. Selanjutnya dengan cara mencicil tanah ini dibeli pula oleh para pejabat, untuk digarap menjadi kompleks perumahan.

Kemudian atas inisiatif Walikota Padang dr. Rasyidin maka diambillah tanah Padang Pasir yang dulunya adalah milik sebuah yayasan Belanda. Dengan bantuan keuangan dari *Padang sche Bank*, Pemerintah Kota Padang membangun beberapa buah rumah baru di daerah Padang Pasir ini. Setelah rumah-rumah itu selesai dibangun, maka dijualah kepada para pegawai yang membutuhkan seharga Rp. 5.000,— dengan cara mencicilnya sebanyak Rp. 25,— perbulan. Pada waktu bersamaan dibangun pula perumahan baru untuk perumahan pegawai di Padang Baru Timur. Biaya yang diperlukan untuk pembangunan ini juga berasal dari bantuan *Padang-sche Bank*.

Erat relevansinya dengan tujuan pengembangan wilayah kota Padang ketika itu, pemerintah kota membeli tanah perumahan di Air Tawar. Padahal ketika itu batas kota Padang ke Utara ini adalah jembatan Lolong.²²) Jadi pembelian tanah di Air Tawar itu merupakan usaha pemerintah kota yang bertujuan untuk mengembangkan batas kota Padang ke arah Utara. Pada tahun 1950-an itu juga, Gubernur membeli tanah perumahan di Siteba. Tanah ini dibeli seharga Rp. 1.000.000,— dari Mak Pak Sui yang berkebangsaan Tionghoa yang luasnya lebih dari takaran harga yang berlaku. Pembelian ini berlangsung dengan mudah, karena pada waktu itu dilaksanakan UU Agraria Nasional yang menyatakan bahwa orang Cina tidak boleh memiliki tanah lebih dari 7 Ha per orang. Sejalan dengan itu maka tanah perumahan di Ulak Karang seluas 14 Ha milik Marah Rizal, diambil oleh pemerintah kota seluas 7 Ha sebagai akibat dari pelaksanaan UU Agraria tersebut. Tanah itu diserahkan oleh pemerintah kepada para pegawai untuk dibangun perumahan baru, sehingga berkembanglah kompleks pemukiman baru di Ulak Karang, pinggiran kota ke arah Utara.

Semenjak tahun 1970-an, pembangunan perumahan di daerah pinggiran kota Padang semakin meningkat. Umumnya kompleks perumahan Wisma Indah di Ulak Karang atas inisiatif Asuransi Bumi Putera, Perumnas Air Tawar dan lain-lain. Untuk jelasnya informasi tentang pertumbuhan pemukiman di kota Padang semenjak tahun 1970-an dapat diketahui melalui data-data sebagai berikut.²⁴)

Jumlah Rumah Menurut Tahun Pendirian

No.	Tahun Pendirian	Permanen	Seni permanen/biasa	Jumlah
1.	1969	—	—	12.991
2.	1970	9.600	15.900	25.500
3.	1971	9.900	15.300	25.200
4.	1972	10.100	15.920	26.020
5.	1973	10.400	15.800	26.200
6.	1974	10.700	16.300	27.000
7.	1975	11.200	16.160	27.360

Jumlah bangunan gedung-gedung perkantoran juga mengalami pertambahan di kota Padang, semenjak dari tahun 1970 sampai dengan tahun 1975, baik kantor-kantor pemerintah maupun swasta.

Jumlah Kantor di Kodya Padang Tahun 1970-1975.²⁵)

No.	Tahun	Kantor Pemerintah	Kantor Swasta	Jumlah
1.	1970	97	100	197
2.	1971	122	124	246
3.	1972	138	157	295
4.	1973	169	191	360
5.	1974	173	200	373
6.	1975	194	216	410

Perkembangan kompleks perumahan dan gedung-gedung perkantoran di kota Padang, dipengaruhi dan sangat tergantung pada pertumbuhan jumlah penduduk kota Padang itu sendiri. Dari tahun 1969 sampai dengan tahun 1975, data menunjukkan bahwa jumlah pertambahan pemukiman di kota Padang cenderung melaju tinggi. Hal ini merupakan indikator bagi kota ini sebagai pusat perhatian penduduk.

Keadaan penduduk di kota Padang dari tahun ke tahun selalu mengalami perubahan. Perubahan itu mengarah kepada peningkatan jumlah personalnya, sehingga penduduk yang menempati wilayah kota dari tahun ke tahun semakin bertambah padat.

Bertolak dari keadaan demikian, maka dapatlah diajukan sebuah pertanyaan, mengapa penduduk yang mendiami kota Padang ini selalu bertambah banyak? Barangkali tentu saja banyak faktor yang turut mempengaruhinya. Kedudukan kota Padang yang tergolong strategis, merupakan salah satu faktor. Dalam keadaan ini, kota Padang berfungsi sebagai pintu gerbang yang memudahkan bagi orang untuk masuk dan ke luar dari daerah Sumatera Barat. Keadaan yang demikian jelas merangsang atau memancarkan motivasi penduduk daerah lain, terutama penduduk di daerah pedalaman, untuk berpindah dan menetap di kota Padang.

Erat kaitannya dengan kedudukannya yang strategis tadi, maka faktor ekonomi merupakan satu faktor lain yang memancing minat penduduk daerah lain ke kota Padang. Banyak usaha yang bisa dilakukan penduduk di kota ini, guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Kalau di daerah pedesaan umumnya penduduk hanya memiliki usaha di bidang pertanian semata-mata. Agaknya usaha ini sukar dijadikan sebagai sumber utama pencaharian, karena perkembangan dunia modern menuntut penduduk bersistem ekonomi uang. Kondisi demikian mendesak penduduk untuk melakukan terobosan-terobosan dalam rangka membuka usaha baru di luar lapangan pertanian, yang lebih cepat mendatangkan uang guna memenuhi tuntutan sistem ekonomi uang tersebut. Dalam kon-

teks inilah kota Padang berperan sebagai salah satu alternatif, di tempat mana penduduk pedesaan Sumatera Barat akan bermukim.

Tuntutan ekonomi uang, bisa dipenuhi lewat berbagai usaha mata pencaharian yang bisa dibuka di kota Padang. Orang bisa bekerja di luar lapangan pertanian seperti bidang perdagangan, jasa, kepegawaian baik negeri maupun swasta, buruh, usaha kerajinan dan lain-lain. Pekerjaan semacam ini tidak membutuhkan tanah yang jumlahnya relatif terbatas. Untuk pengembangannya dibutuhkan semangat kerja yang tinggi, tekun, hemat, kreatif dan lain-lain. Perhatian pemerintah kota Padang terhadap pengembangan usaha tersebut boleh dikatakan intensif, terbukti dengan disediakannya fasilitas prasarana dan sarana pasar, pertumbuhan jalan-jalan yang memadai dan sebagainya. Tersedianya fasilitas yang memadai ini, jelas merupakan salah satu sub-faktor yang mendorong penduduk di daerah lain berpindah untuk mencari penghidupan baru di kota ini.

Pertambahan jumlah penduduk di kota Padang, juga dipengaruhi oleh faktor pendidikan. Tersedianya lembaga-lembaga pendidikan dengan berbagai jenis dan tingkatannya, mendorong penduduk di daerah pedalaman Sumatera Barat untuk hidup di kota Padang dalam rangka melanjutkan pendidikan, lebih-lebih di perguruan tinggi. Bagi Sumatera Barat periode 1950-1979, hanya di kota Padang terdapat perguruan tinggi seperti Universitas Andalas, IKIP, IAIN, AKBO dan lain-lain. Keadaan ini mengakibatkan para lulusan SLA di daerah pedalaman, misalnya orang di desa-desa Kabupaten Agam, Pasaman dan sebagainya, pindah ke kota Padang untuk meneruskan studinya di berbagai perguruan tinggi yang ada di Padang. Malahan kota Padang ternyata banyak menampung para generasi muda lepasan SLA dari propinsi-propinsi tetangganya seperti Riau dan Jambi. Kesemuanya itu merupakan faktor kunci yang menyebabkan bertambahnya jumlah penduduk di kota Padang dari tahun ke tahun, yang pada tahun 1930 hanya berjumlah 52.042 jiwa.

Untuk mengetahui pertambahan jumlah penduduk di kota Padang sepanjang tahun, dapat dilihat melalui data di bawah ini:²⁶⁾

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1951	—	—	114.905
1961	73.730	69.969	143.699
1962	75.993	72.232	148.225
1963	78.827	76.067	153.894
1964	80.827	77.822	157.803
1965	82.282	80.523	162.805
1966	84.363	83.603	167.966
1967	87.825	86.625	173.290
1968	91.063	90.304	181.387
1969	93.329	92.570	185.899
1970	96.812	93.803	190.615
1971	100.900	96.218	196.615
1972	103.958	100.915	204.873
1973	105.493	103.491	208.984
1974	108.945	106.694	213.609
1975	112.294	110.150	222.444
1976	115.546	113.946	229.492

Pada tahun 1979, jumlah penduduk yang mendiami kota Padang meningkat menjadi 240.873 orang.²⁷⁾ Dari angka-angka tersebut, menunjukkan bahwa pertambahan jumlah penduduk di kota Padang tergolong tinggi. Dalam sumber yang sama diperoleh informasi, semenjak tahun 1930 sampai dengan tahun 1961 pertambahan penduduk kota Padang diperkirakan sekitar 3,3%, sedangkan dari tahun 1961 sampai dengan tahun 1976 turun sedikit menjadi 3,2%. Barangkali untuk tahun-tahun berikutnya pertambahan ini tidak jauh berbeda.

Dengan tingginya persentase tersebut pemerintah kotamadya Padang berusaha mencari pemecahannya. Pertambahan penduduk mulai dikendalikan dan diarahkan kepada

hal-hal yang positif dalam rangka meningkatkan proses pembangunan nasional. Di antara pemecahan masalah yang dilalui pemerintah kota adalah berupa usaha meyakinkan penduduk akan pentingnya Keluarga Terencana, mengundurkan usia perkawinan dan sebagainya.

CATATAN

- 1). Marnis Nawi, Drs, et al, *Perkampungan Dipertokoan Sebagai Pola Adaptasi Sosial, Kehidupan Dipertampungan Miskin di Kota Padang* IDKD Sumatera Barat, Padang, 1982, hal, 26
- 2). dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Padang, *Pertambahan Jalan Di Kota Padang*, Padang, 1985, hal 91.
- 3). *Ibid*, hal 94
- 4). Marnis Nawi, Drs, et al, *Op Cit*, hal 31.
- 5). *Ibid*, hal 32.
- 6). *Ibid*, hal 35.
- 7). *Ibid*, hal 37.
- 8). *Ibid*, hal 40.
- 9) Keterangan Bapak *Bachtiar Nurdin*, Kepala Dinas Pasar Kotamadya Padang, pada tanggal 2 April 1987.
- 10). Wawancara dengan *Bapak Bustal Dt. Bungsu*, pensiunan Pegawai Balai Kota Padang, pada tanggal 22 Juni 1987 di Padang
- 11). Sumber ini diperoleh dari *Kantor Dinas Pasar* Kotamadya Padang.
- 12). Untuk jelasnya lihat Zuiyen Rais, et al, *Padang Statistik Dan Informasi 1970-1974*.
TEPPEDA Padang, hal. 80.
- 13). Kerjasama TEPPEDA Padang dengan Kantor Statistik

- Kotamadya Padang, *Padang Dalam Angka Tahun 1979*, TEPPEDA Padang, hal 212.
- 14). Data tentang jumlah lembaga pendidikan TK sampai SMTA di Padang dari tahun 1969-1974, lihat Zuiyen Rais, et al, *Op Cit*, hal 29-33.
 - 15). Untuk jelasnya tentang data pendidikan di kota Padang tahun 1979 ini, dapat dilihat Kerjasama , *Padang Dalam Angka 1979*, Op Cit, hal 68-113.
 - 16). Zuiyen Rais, et al, *Op Cit*, hal 41.
 - 17). Kerjasama TEPPEDA dengan , *Op Cit*, hal 63.
 - 18). Data ini dikutip dari Zuiyen Rais, et al, *Op, Cit*, Hal 42.
 - 19). Untuk jelasnya lihat Kerjasama TEPPEDA dengan , , *Padang Dalam Angka 1979*, Op Cit, hal 119.
 - 20). Hotel-hotel kenamaan di kota Padang adalah Hotel Machudum, Hotel Pangeran, Hotel Mariani, Hotel Muara dan lain-lain.
 - 21). Ketujuh buah bioskop ini yaitu: Raya, Karya, Satria, Purnama, New Rex Theatre, Padang Theatre dan bioskop Mulia, Untuk jelasnya lihat Zuiyen Rais, et al, *Op Cit*, hal 50.
 - 22). Keterangan Bapak *Bustal Dt Bungsu*, Pensiunan Balai Kota Padang, pada tanggal 22 Juni 1987 di Komplek Wisma Warta Padang.
 - 23). Keterangan Bapak *Bustal Dt. Bungsu*, Ibid.
 - 24). Zuiyen Rais, et al, *Op Cit*, hal 50
 - 25). *Ibid*, hal 50.
 - 26). Data ini disederhanakan dari Kerjasama TEPPEDA dengan , *Padang Dalam Angka Tahun 1979* TEPPEDA Padang 1979, hal 4.
 - 27). Kerjasama , *Padang Dalam Angka Tahun 1979*; *Op Cit*. hal 32.

BAB IV.

PEMERINTAHAN KOTA SEJAK TAHUN 1950

4.1. Gambaran Umum Mengenai Administrasi Dan Pemerintahan.

Sesuai dengan data/informasi yang diperoleh dari Kantor Bappeda Kotamadya Padang, ternyata pada tahun 1977/1978 sampai tahun 1979/1980 jumlah kecamatan ada di Kotamadya Padang adalah tiga buah dengan jumlah kampung 13 buah. Dari 13 kampung tersebut terdapat 101 RK/LSD.

Kemudian pada tahun 1980/1981 berdasarkan PP NO. 17/1980 jumlah kecamatan yang tadi hanya tiga buah bertambah dan menjadi enam buah. Sedangkan jumlah kampung masih tetap 13 buah, ditambah sembilan nagari. Dari 13 buah kampung dan sembilan nagari ini terdapat 101/LSD sebagaimana halnya di tahun 1977/1978 – 1979/1980 sebelumnya. Suatu hal yang berbeda dengan tahun sebelumnya adalah pada tahun 1980/81 ini jumlah jorong, yaitu pemerintahan setingkat di bawah nagari ada sebanyak 94 buah.

Setelah surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 140-502/1982 maka jumlah kecamatan yang termasuk wilayah Administratif Daerah Tingkat II Kotamadya Padang menjadi 11 buah. Berbeda dengan keadaan yang dijumpai dalam tahun 1977-1980, pada tahun 1981/82 ini, kampung yang

tadinya ada sebanyak 13 buah, dirobah menjadi 195 buah kelurahan, tiap kelurahan juga dilengkapi dengan satu Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau LKMD¹)

Jumlah kecamatan yang ada dan luas tiap kecamatan dimaksud dapat dilihat dalam daftar di bawah ini.

Nama Kecamatan	Luas wilayah.
1. Kecamatan Padang Selatan	21,20 km ²
2. Kecamatan Padang Barat	6,77 km ²
3. Kecamatan Padang Utara	9,97 km ²
4. Kecamatan Padang Timur	7,62 km ²
5. Kecamatan Kota Tengah	157,85 km ²
6. Kecamatan Nanggalo	14,17 km ²
7. Kecamatan Kuranji	57,00 km ²
8. Kecamatan Pauh	147,00 km ²
9. Kecamatan Lubuk Kilangan	86,80 km ²
10. Kecamatan Lubuk Begalung	30,00 km ²
11. Kecamatan Bungus/Teluk Kabung	99,25 km ²
Jumlah	626,63 km ²)

Pembinaan pemerintahan dilakukan berupa: peraturan, rapat staf, pertemuan, dan kunjungan. Selain itu juga ada kegiatan-kegiatan studi tour.

Jenis kegiatan yang dikemukakan di atas pembinaan dimulai dari Kecamatan, Kelurahan, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Lembaga Sosial Desa atau LKSD/LSD dan PKK. Dari data/informasi yang diperoleh kegiatan yang banyak dilakukan dengan jumlah yang cukup besar adalah kegiatan di kelurahan baik jenis kegiatan penataran staf, pertemuan, dan kunjungan.

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang ada pada setiap Kelurahan bertujuan:

- Membina kehidupan kekeluargaan di lingkungan daerah masing-masing.
- Membina saling pengertian dan integrasi antara rakyat dan pemerintahan.
- Memupuk dan memelihara semangat musyawarah mufa-

- kat, dan gotongroyong sebagai sendi kepribadian bangsa.
- Mengajukan masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila.

Berdasarkan data/informasi yang diperlukan mengenai jumlah dan kepadatan penduduk Kotamadya Padang, ternyata jumlah penduduk daerah ini berdasarkan hasil sensus yang terakhir adalah sebanyak 480.607 orang, sedangkan luas seluruh wilayah sebanyak 626,63 km². Dengan demikian kepadatan geografis adalah 767 jiwa per km².³⁾

Bila jumlah dan kepadatan penduduk Kotamadya Padang ini dipelajari pada setiap kecamatan yang ada, maka gambarnya akan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Sebagian kecil wilayah kota ini atau 5,52% dihuni lebih dari separoh jumlah penduduk, yaitu 53.87%. Sedangkan daerah luasnya 94,48% hanya ditempati 46,13% dari jumlah penduduk seluruhnya.

Bila dikaji pula kepadatan penduduk per km², hal ini juga menunjukkan bahwa pada daerah Kecamatan Padang Barat, Padang Timur, Padang Utara dan Padang Selatan merupakan daerah-daerah yang terpadat. Rata-rata kepadatan penduduk di keempat kecamatan dimaksud adalah sebesar 8.086 jiwa per km², dengan daerah yang terpadat adalah Kecamatan Padang Barat, sedangkan yang terjarang adalah Kecamatan Padang Selatan.⁴⁾

Dari daerah seluas 94,48% dengan prosentase penduduk 46,13% di dalamnya terdapat di Kecamatan Koto Tengah, Kecamatan Nanggalo, Kecamatan Kuranji, Kecamatan Pauh, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kecamatan Lubuk Begalung dan Kecamatan Bungus/Teluk Kabung. Dari tujuh kecamatan yang disebutkan di atas yang terbesar penduduknya adalah kecamatan Kota Tengah dan yang paling sedikit adalah kecamatan Bungus/Teluk Kabung. Dari kecamatan-kecamatan tersebut yang terpadat penduduknya adalah Nanggalo, sedangkan yang terjarang Kecamatan Bungus/Teluk Kabung. Penyebaran penduduk Kotamadya Padang belum lagi merata

pada setiap kecamatan; lebih-lebih bila dibandingkan dengan penduduk yang ada di pusat kota dengan daerah-daerah pinggirannya.

Di samping jumlah dan kepadatan penduduk yang telah disebutkan di atas penting pula dikemukakan pertambahan penduduk rata-rata tiap tahun mulai tahun 1976 sampai 1980. Pada tahun 1976, jumlah penduduk adalah 350.727 orang, sedangkan pada tahun 1980 penduduk telah berjumlah 480.727 orang, dengan pertambahan rata-rata tiap bulan sebesar 3,56%.

Dalam hal perkembangan penduduk, Kotamadya Padang melebihi rata-rata pertambahan penduduk Propinsi Sumatera Barat (1,99%) dan rata-rata kotamadya lainnya di Sumatera Barat. Jika diteliti secara mendalam pertambahan penduduk yang relatif meningkat pada daerah Tk. II Kotamadya Padang, terlihat ada hubungannya dengan terbukanya kesempatan kerja baru, disamping besarnya jumlah pendatang atau urbanisasi ke daerah ini berbagai maksud, seperti melanjutkan pendidikan. Kesempatan kerja sebagaimana disebutkan di atas juga mendorong timbulnya implikasi-implikasi tertentu seperti didirikannya lembaga-lembaga pendidikan dan pusat-pusat kegiatan lainnya. Semua itu mempengaruhi perkembangan penduduk Kotamadya Padang.

Komposisi penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin adalah amat penting, karena erat sekali kaitannya dengan aspek tenaga kerja, sumber manusiawi ini sangat menentukan terhadap kelangsungan dan perkembangan pembangunan sesuatu daerah.

Dalam hubungan ini, dua macam cara penggolongan umur dapat diterapkan sebagai terlihat dalam daftar berikut.

Menurut Prof. Dr. Wijoyo Nitisastro

Golongan Umur

0 – 14 tahun (belum produktif)	195.732 (40,73%)
15 – 65 tahun (produktif)	277.961 (57,84%)
di atas 65 tahun (inproduktif)	6.914 (1,43%)

Dr. W. Sleumer

0 – 14 tahun (belum produktif)	195.732 (40,73%)
15 – 19 tahun (belum produktif penuh)	55.846 (11,62%)
20 – 54 tahun (produktif penuh)	196.432 (940,87%)
55 – 64 tahun (tidak produktif)	25.683 (5,34%)
di atas 65 tahun (inproduktif)	6.914 (1,43%) ⁵

Berdasarkan susunan penduduk menurut golongan umur seperti dicantumkan di atas, bila kriteria Prof. Dr. Wijoyo Nitiasastro diterapkan maka jumlah penduduk yang belum produktif adalah sebesar 40,73% dari seluruh jumlah penduduk yang ada di Kotamadya Padang, dan penduduk produktif adalah sebanyak 57,84%, sedangkan yang tidak produktif atau inproduktif lagi berjumlah sebanyak 1,43%.

Bila penduduk belum produktif dan penduduk inproduktif dijumlahkan maka kedua kriteria ini ada sebanyak 42,16%. Dengan demikian susunan penduduk Kotamadya Padang adalah cukup baik, karena jumlah penduduk yang menanggung beban atau biaya hidup jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ditanggung, yaitu berbanding antara 57,84% dengan 42,12%.

Bilamana susunan penduduk menurut umur ini diterapkan terhadap kriteria pembahagian yang dikemukakan Dr. W. Sleumer, maka sedikit agak berbeda dengan yang di atas yaitu perbandingan jumlah penduduk usia belum produktif penuh ditambah produktif penuh yaitu 47,50% hampir berimbang dengan jumlah penduduk belum produktif, tidak produktif yaitu 52,50%.

Kalau sebahagian penduduk belum produktif penuh dapat digolongkan ke dalam usia penduduk belum produktif, maka kriteria yang dikemukakan Dr. W. Sleumer ini jelas menunjukkan bahwa penduduk yang akan ditanggung beban kehidupannya di Kotamadya Padang jauh lebih besar dari penduduk yang menanggung atau berbanding 53,32% dengan 46,68% dari jumlah penduduk Kotamadya Padang seluruhnya.

Ditinjau dari sudut susunan penduduk menurut jenis kelamin ternyata di Kotamadya Padang prosentase penduduk yang laki-laki lebih banyak dibanding perempuan yaitu 50,65%. Sedangkan penduduk perempuan hanya 49,35%.

Untuk meninjau potensi kependudukan ini tidak saja didasarkan kepada jumlah-jumlah penduduk secara kuantitatif, baik dalam golongan umur yang menyangkut produktifitas tenaga kerja maupun yang diorientasikan kepada jenis kelamin. Di samping itu potensi kependudukan ini juga dapat dilihat dari segi agama sebagai penggambaran latar belakang sosial budaya.

Dari sudut agama, penduduk Kota Padang dapat dinyatakan bahwa sebahagian besar adalah menganut agama Islam yaitu 485.422 orang atau 95,38%. Setelah itu sebanyak 10.120 atau 2,11% menganut agama Katolik. Penganut agama Kristen lainnya yaitu 4.376 atau 0,91%. Sedangkan sisanya 1,60% adalah penganut agama Budha dan Hindu 87 orang menganut agama Hindu dan 7.602 penganut agama Budha.

Jumlah penduduk kota Padang menurut kewarganegaraan dapat pula dilihat dalam daftar di bawah.

Kewarganegaraan	Jumlah Penduduk. ⁶)
1. Kewarganegaraan Indonesia	476.170 (99,08 %)
2. RRC, Taiwan dan Cina Stateless	4.252 (0,88 %)
3. Lainnya	185 (0,04 %)

Walaupun jumlahnya tidak begitu besar, tetapi masih cukup banyak penduduk yang belum memiliki kewarganegaraan Indonesia khususnya mereka yang berasal dari RRC, Taiwan dan Cina Stateless, yaitu 0,88%.

4. Ibukota Propinsi Sumatera Barat.

Di awal tahun 1950-an penduduk kota Padang diperkirakan berjumlah sekitar 114.905 orang.⁷) Jumlah ini setiap tahunnya mengalami penambahan sekitar 3,3%, khususnya sam-

pai tahun 1961. Sedangkan semenjak tahun 1961 – 1971 laju pertumbuhan penduduk kota ini mengalami sedikit penurunan yaitu menjadi 3,2%.⁸⁾ Pertambahan penduduk sebesar ini terhitung cukup tinggi di Indonesia. Akibatnya kota ini merupakan salah satu kota yang mempunyai penduduk terpadat di bagian tengah pulau Sumatera.

Di samping mempunyai jumlah penduduk yang cukup besar bila dibandingkan dengan luasnya yang lebih kurang 33 km², kota Padang juga mempunyai sarana transportasi yang memenuhi syarat-syarat perhubungan modern. Bukan hanya itu saja, kota ini juga memenuhi beberapa kriteria lainnya yang sering dijadikan patokan untuk mengukur apakah kota tersebut dapat dikatakan sebagai kota besar atau tidak.⁹⁾

Prasarana transportasi baik darat, laut maupun udara telah tersedia dalam keadaan yang cukup memadai. Selain jalan-jalan yang terdapat di dalam kota, sarana jalan raya untuk perhubungan darat dengan beberapa kota lainnya cukup baik. Seperti ke Painan ibu kota kabupaten Pesisir Selatan, ke Solok ibu kota Kabupaten Solok, ke Bukit Tinggi ibu kota kabupaten Agam, dan juga ke Pariaman ibu kota kabupaten Padang Pariaman. Begitu pula ke kota-kota besar lainnya yang terdapat di Sumatera seperti ke Pekanbaru, Jambi dan Medan.

Jarak kota Padang dengan beberapa kota di Sumatera Barat dan beberapa kota besar lainnya di pulau Sumatera dapat dilihat dari daftar berikut

Kota-kota	Jarak
Padang – Painan	77 km
Padang – Solok	64 km
Padang – Bukit Tinggi	91 km
Padang – Payakumbuh	124 km
Padang – Batu Sangkar	102 km
Padang – Lubuk Sikaping	164 km

Padang – Sawah Lunto	89 km
Padang – Sijunjung	127 km
Padang – Pariaman	56 km
Padang – Pakan Baru	312 km
Padang – Medan	835 km
Padang – Jambi	570 km
Padang – Palembang	1.074 km
Padang – Banda Aceh	1.482 km

10)

Lancarnya perhubungan darat antara kota Padang dengan kota-kota tersebut di atas dapat dilihat dari banyaknya jumlah kendaraan lintas propinsi yang keluar masuk kota ini. Kenyataan ini dapat dilihat di stasiun-stasiun bus yang ada di kota Padang. Seperti di pasar Goan Hoat dulunya ataupun di stasiun Lintas Andalas semenjak awal tahun 1970-an. Di samping dapat dilihat dari banyaknya jumlah kendaraan pengangkutan penumpang, maka jumlah kendaraan yang datang dan pergi dari dan ke kota ini juga dapat dilihat dari banyaknya jumlah kendaraan angkutan barang. Apakah itu barang-barang yang berasal dari daerah untuk dipasarkan di kota Padang atau dilanjutkan guna diekspor atau sebaliknya. Khususnya alat angkutan jenis truk ini, sampai sekarang memang belum mempunyai suatu tempat pangkalannya yang khusus seperti stasiun atau tempat perhentian bus.

Biasanya kendaraan-kendaraan jenis truk ini berhenti atau membongkar dan memuat barang-barang bawannya di tempat-tempat tertentu yang bisa memberikan kemudahan baginya. Seperti dekat gudang-gudang penimbunan barang ataupun dekat toko-toko yang memiliki barang-barang yang dibawa.

Selain tersedianya beberapa fasilitas untuk prasarana transportasi darat bagi kendaraan-kendaraan yang datang dari luar kota, Padang juga punya sarana transportasi yang memenuhi syarat bagi suatu kota yang besar. Beberapa jenis alat angkutan kota tersedia dalam jumlah yang memadai.

Selain *bendi* yaitu sejenis alat angkutan tradisional Minangka-

bau, kota Padang juga mempunyai jenis-jenis alat angkutan yang lain seperti bemo, oplet, bus kota dan taxi. Becak sejenis alat angkutan penumpang yang banyak ditemui di kota-kota besar lainnya di Indonesia tidak ada dijumpai di kota ini. Resolusi yang diajukan DPRD Kota Padang diawal tahun 1950-an sewaktu di bawah pimpinan wali kota Dr. Rasidin yang menilai jenis angkutan becak kurang manusiawi. Hal ini merupakan latar belakang mengapa tidak diizinkan becak beroperasi di kota Padang. Ternyata semenjak awal tahun 1970-an jenis alat angkutan becak itupun muncul juga, khusus untuk mengangkut barang. Namun tidak jarang pula pemilik barang nongkrong juga di atasnya.

Kendaraan-kendaraan ini mempunyai jaringan-jaringan yang tersebar hampir ke seluruh wilayah kota. Kenyataan ini biasa dilihat dari pembagian jalur-jalur trayek kendaraan tersebut di masing-masing pangkalannya. Dahulu pangkalan bemo tersebar di beberapa tempat sesuai dengan jurusannya masing-masing kemudian dilokasikan semuanya di belakang Koresta 301 Padang dan kemudian dipindahkan lagi ke jalan Pasar Raya sampai sekarang. Sedangkan tempat perhentian oplet semula adalah di depan bioskop Mulia. Kemudian pindah ke belakang Koresta 301 Padang dan setelah itu pindah lagi ke Pasar Goan Hoat sampai sekarang. Selain oplet dan jenis angkutan yang sejenisnya yang betul-betul dimiliki oleh warga, maka untuk jenis angkutan ini sampai awal tahun 1970-an juga beroperasi kendaraan-kendaraan yang berasal dari luar daerah, terutama yang berasal dari Pariaman. Untuk jenis kendaraan lainnya seperti taxi, selain terdapat di kantor-kantor perusahaan, taxi taxi tersebut bisa juga ditemukan di pelabuhan udara Tabin, Teluk Bayur dan Pasar Raya Fase VII.

Kereta Api yang pertama kali dibuat pemerintah kolonial Belanda di Sumatera Barat di penghujung abad ke sembilan belas bertujuan untuk membawa batu-bara dari Sawah Lunto ke Teluk Bayur. Kemudian ini akhirnya juga dipergunakan untuk pengangkutan penumpang. Bahkan jenis alat angkutan

kereta api ini pernah penuh menjadi angkutan yang cukup penting. Selain tujuan ke Sawah Lunto melalui Padang Panjang, maka rel kereta api ini juga menghubungkan kota Padang dengan beberapa kota penting lainnya di Sumatera Barat seperti ke Pariaman, Bukit Tinggi dan Payakumbuh. Ke dan dari kota-kota inilah setiap harinya berangkat beberapa buah kereta api membawa penumpang dan barang. Kota Padang merupakan pusat dari unit pelayanan kereta api di Sumatera Barat. Di kota ini terdapat kantor pusat Perusahaan Jawatan Kereta Api dan juga perbengkelannya. Lokomotif yang dipakai dahulunya adalah lokomotif uap, tetapi sekarang lokomotif uap itu tidak diaktifkan lagi dan diganti dengan lokomotif diesel. Lokomotif-lokomotif diesel tersebut sekarang hanya mengkhususkan diri untuk mengangkut batu bara. Ada juga beberapa buah yang menjalani trayek Pariaman membawa penumpang dan barang-barang seperti kelapa. Fungsi lainnya kereta api itu adalah membawa semen dari Indarung ke Teluk Bayur. Perkembangan sarana angkutan jalan raya baik peningkatan mutu jalan dan jenis alat angkutan dapat diduga merupakan latarbelakang mengapa kereta api ini jadi tersingkir. Tersingkirnya kereta api ini dari persaingan membawa penumpang telah mulai kelihatan di akhir tahun 1960-an.

Di bidang sarana angkutan laut, kota Padang juga mempunyai dua buah pelabuhan laut. Yang pertama bernama Muaro, yaitu pelabuhan laut yang telah ada di kota Padang sejak zaman VOC dahulu. Tepatnya pelabuhan Muaro ini terletak di muara Batang Arau, yaitu di muara salah satu dari tiga sungai yang mengalir di dalam kota Padang. Di pelabuhan inilah dahulunya kompeni VOC mendirikan loji-loji mereka sewaktu pertama datang ke Sumatera Barat, juga di pelabuhan ini pulalah kantor-kantor dagang dan jawatan-jawatan penting pemerintah kolonial Belanda ditempatkan.

Pelabuhan Muaro ini sesuai dengan kondisinya yang tidak begitu besar hanya bisa disinggahi oleh kapal-kapal dalam ukuran menengah ke bawah. Kapal-kapal yang biasanya singgah di

sini adalah kapal-kapal yang membawa barang dan penumpang dari kota Padang ke beberapa kota pantai lainnya yang terdapat di pesisir barat Sumatera. Seperti ke pelabuhan-pelabuhan yang terdapat di Painan, Pariaman, Tiku, Sasak dan Air Bangis. Juga dari pelabuhan ini sering berangkat kapal-kapal dengan tujuan daerah kepulauan Mentawai serta ke beberapa pulau lainnya yang juga terdapat di bagian barat pulau Sumatera.

Peranan pelabuhan Muaro seperti tersebut di atas pada masa sekarang sebetulnya telah jauh berkurang. Gambaran di atas hanyalah melukiskan berperannya pelabuhan tersebut pada kurun waktu sebelum tahun 1970-an, saat mana pengangkutan laut masih sama penting artinya dengan pengangkutan darat. Terutama dari daerah-daerah pantai seperti di atas. Waktu sekarang yang sering singgah di pelabuhan ini sebagian besar hanyalah kapal-kapal dengan tujuan kepulauan Mentawai dan kapal-kapal dengan tujuan pulau-pulau lainnya. Di samping itu di pelabuhan ini sekarang juga sering singgah kapal-kapal yang khusus berfungsi sebagai penangkap ikan, sebab di sekitar pelabuhan ini terdapat kantor pusat perikanan laut.

Pelabuhan laut yang kedua adalah pelabuhan Teluk Bayur, terletak lebih kurang 15 km sebelah selatan kota Padang. Seperti telah disebutkan di atas, dibangunnya pelabuhan ini juga berhubungan erat dengan dibangunnya sarana transportasi darat jenis kereta api dan pembangunan tambang batu bara Ombilin. Jadi pelabuhan ini dibangun dipenghujung abad ke sembilan belas.¹¹⁾ Semenjak dekade ke dua dan ke tiga abad ke dua puluh pelabuhan ini makin berperan setelah dibukanya pabrik semen Indarung. Pada waktu itu ke pelabuhan inilah dibawa semen-semen yang diproduksi di Indarung dengan lori kemudian dikapalkan.

Di pelabuhan Teluk Bayur ini sering keluar masuk kapal-kapal dalam ukuran besar dengan jalur-jalur perjalanan yang jauh. Selain kapal-kapal yang membawa barang seperti batu bara, semen dan hasil-hasil bumi lainnya dari Sumatera Barat seperti karet, kopra, kulit manis, rotan dan lain sebagainya

maka di pelabuhan ini juga sering bersandar kapal-kapai yang khusus membawa penumpang. Khusus untuk kapal-kapal dengan tujuan Tanjung Priok Jakarta. Di Teluk Bayur ini terdapat beberapa kantor perusahaan pelayaran, salah satu di antaranya adalah kantor Pelni.

Sarana transportasi lain yang tersedia di kota Padang adalah sarana pelabuhan udara Tabing, terletak lebih kurang 7 km sebelah utara pusat kota. Dari Tabing ini beberapa pesawat terbang setiap harinya pulang pergi dari kota Padang ke kota-kota besar lainnya di pulau Sumatera atau ke pulau Jawa. Dari Padang biasanya pesawat-pesawat ini terbang ke Medan, Palembang, Bengkulu, Jakarta dan Pekanbaru. Dari Pekanbaru melanjutkan penerbangannya ke Singapura. Pesawat terbang yang secara rutin singgah di pelabuhan udara ini adalah GIA, Merpati dan Mandala.

Sebetulnya pelabuhan udara Tabing ini adalah pangkalan utama TNI Angkatan Udara. Sampai sekarang di samping dipergunakan sebagai pangkalan TNI Angkatan Udara juga dipergunakan sebagai tempat pelabuhannya pesawat-pesawat komersial. Sampai sekarang di kota Padang belum ada pelabuhan udara khusus untuk didarati pesawat-pesawat komersial. Sebetulnya pelabuhan udara tidak memungkinkan sebagai landasan pesawat terbang komersial. Letaknya tidak begitu jauh dari pusat kota dan tidak bisa didarati oleh pesawat penumpang yang mempunyai badan lebar dan bobot berat yang lebih besar dari pesawat terbang DC 9. Jalan keluar yang direncanakan pemerintah kota Padang adalah merencanakan pemindahan pelabuhan ini ke Ketaping, terletak lebih kurang 40 km sebelah utara kota Padang. Sampai sekarang beberapa usaha untuk mewujudkan rencana itu telah mulai dilakukan, umpamanya beberapa penelitian lapangan.

Sebagai kota besar dengan jumlah penduduk yang makin lama semakin bertambah, kota Padang diharuskan untuk memenuhi beberapa macam kebutuhan lain dari warganya. Perkembangan dan pembangunan di bidang perekonomian ternyata

ta membawa kota Padang menjadi suatu kota perdagangan yang cukup penting di bagian tengah pulau Sumatera. Kenyataan ini tentu saja didukung oleh tersedianya sarana transportasi yang memadai di kota Padang dengan daerah-daerah sekitarnya.

Perkembangan perekonomian yang makin lama semakin pesat ini juga membawa perubahan pada status dan fungsi kota Padang, terutama semenjak penghujung tahun 1950-an.

Semenjak tahun itu, tepatnya semenjak tahun 1958 kota Padang de-facto menjadi ibu kota propinsi Sumatera Barat.¹²⁾ Semenjak saat itu pulalah kota ini berangsur-angsur berperan menjadi kota administratif.

Sebagaimana diketahui di awal tahun 1950-an, kendatipun mempunyai jumlah penduduk yang cukup besar kota Padang hanya berperan sebagai salah satu dari 16 Daerah tingkat II yang ada di lingkungan propinsi Sumatera Tengah dengan status Kota Praja.¹³⁾ Kota Padang saat itu hanyalah berfungsi sebagai tempat kedudukan wali kota sebagai penguasa tertinggi dari kota praja Padang. Sedangkan ibu kota propinsi Sumatera Tengah ketika itu adalah Bukit Tinggi yang sekaligus juga berfungsi sebagai ibu kota praja Bukit Tinggi dan ibu kota Kabupaten Agam. Kota Bukit Tinggi ini terletak lebih kurang 91 km sebelah Timur Laut kota Padang.

Seiring dengan berfungsinya kota Padang menjadi kota administratif di akhir tahun 1950-an, maka secara berangsur-angsur lembaga-lembaga pemerintahan dan kantor-kantor serta instansi-instansi dalam jajaran daerah Tingkat I propinsi Sumatera Barat mulai berdiri di Padang. Kantor Gubernur Kepala Daerah ditempatkan di jalan Sudirman, sedangkan beberapa kantor lainnya menempati posisi-posisi tertentu dan bertebaran di berbagai penjuru kota.

Segera setelah didirikannya propinsi Sumatera Barat, maka di kota Padang ditempatkan satu Komando Daerah Militer dengan nama Komando Daerah Militer III 17 Agustus. Nama 17 Agustus bagi Kodam III tersebut diambilkan dari nama gugus tugas operasi penumpasan pemberontakan PRRI di tahun 1958.

Kodam III 17 Agustus didirikan secara resmi tanggal 17 Agustus tahun 1959 segera setelah dibubarkannya gugus tugas operasi 17 Agustus.¹⁴) Kodam III 17 Agustus ini membawahi wilayah seluruh propinsi Sumatera Barat dan Riau. Sekarang Kodam III 17 Agustus diturunkan statusnya setingkat Korem, dan berada di bawah Kodam I Bukit Barisan di Medan.

Sebelum Kodam III didirikan, di kota Padang sebelumnya telah ada suatu kesatuan Kepolisian Kota yang tugasnya lebih diarahkan kepada usaha-usaha pengamanan, tetapi tidak tertutup kemungkinan bagi mereka guna menghadapi kemungkinan yang memerlukan tindakan cepat dan tegas yang seharusnya tindakan pengatasannya dilakukan oleh tentara.

Di samping itu Mobrig semacam pasukan elite kepolisian merupakan suatu kekuatan Angkatan Bersenjata yang cukup tinggi di Sumatera Barat dan pusatnya juga ada di kota Padang, kendatipun pusat pendidikan agen polisi buat Mobrig terdapat di Padang Panjang. Sedangkan sekolah guna mendidik polisi baru didirikan di kota Padang pada tahun 1953 tepatnya pada bulan Mei.

Perkembangan lainnya yang juga cukup berhasil di kota Padang adalah perkembangan sarana-sarana penunjang pembangunan dan perkembangan perekonomian. Tumbuhnya beberapa pabrik dan perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang-barang kebutuhan masyarakat adalah salah satu perwujudan perkembangan pembangunan sektor perekonomian. Sejak awal tahun 1950-an beberapa perusahaan telah muncul di kota Padang. Di antaranya adalah pabrik minyak kilangan atau pabrik minyak kelapa kepunyaan NV. Lam Kiaw. Di awal tahun 1950-an tersebut perusahaan ini telah menghasilkan lebih kurang 214 ton minyak setiap bulan. Di samping memproduksi minyak, perusahaan ini sejak awal tahun 1950-an telah pula mendirikan pabrik kaleng. Sesuai dengan imbauan pemerintah untuk diadakannya pembauran dalam segala bidang dengan masyarakat Cina, maka sekarang nama perusahaan ini telah berganti dengan Lembah Krya.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pakaian, maka di kota Padang juga pernah berdiri beberapa buah pabrik tekstil umpamanya NV. Peradi yang berdiri di awal tahun 1950-an suatu perusahaan yang dikelola oleh orang Padang. Sebelumnya perusahaan ini kepunyaan Mij TVDZ van Houten Staffen & Co. Kemudian di tahun 1960-an di Ulak Karang juga didirikan sebuah pabrik tekstil dengan induk perusahaan PT Asratex. Sama halnya dengan perusahaan dari NV Persdi, PT Asratex ini akhirnya juga gulung tikar. Beberapa penyebab bangkrutnya perusahaan mungkin bahwa lemahnya daya beli, dan kalah bersaing serta upah buruh yang cukup tinggi, yang paling utama adalah kesulitan mendapatkan bahan-bahan serta kurangnya.

Untuk memenuhi kebutuhan warga kota Padang dalam penyediaan bahan keperluan bangunan seperti kayu, gergaji, maka di kota Padang juga berdiri beberapa buah perusahaan penggergajian kayu. Salah satu yang terbesar adalah NV Allinco yang pada awal produksinya menghasilkan kayu gergajian lebih kurang 30 m³ sehari.

Media massa dari jenis surat kabar dan majalah yang telah lama dikenal oleh masyarakat Sumatera Barat pada kurun waktu 1950 sampai 1979 juga tetap lestari di Sumatera Barat. Pada kurun waktu ini beredar beberapa surat kabar dan majalah seperti harian *Penerangan* yang diterbitkan oleh Lie Unsam; *Haluan* yang semula diterbitkan di Bukit Tinggi; *Warga Merdeka* dan *Singgalang*. Surat kabar-surat kabar di atas adalah surat kabar yang mempunyai oplag cukup besar. Di samping itu tersebut lagi brosur-brosur yang diterbitkan oleh instansi-instansi pemerintah.

Hampir semua kebutuhan kertas didatangkan dari daerah lain. Walaupun begitu dalam pengadaan kertas untuk beberapa keperluan lain, kota Padang bisa memproduksi sendiri, seperti pabrik kertas untuk pabrik semen Indarung yang memproduksi tidak hanya kertas karung untuk semen tetapi juga untuk bermacam-macam pembungkus lainnya.

Kota Padang juga mempunyai beberapa buah unit percetakan. Di percetakan inilah beberapa surat kabar dan brosur

serta berkala diterbitkan. Di samping beberapa buah percetakan yang langsung dimiliki oleh surat kabar tersebut, maka percetakan-percetakan lainnya yang ada di kota Padang adalah unit percetakan Sridharma yang pada awal tahun 1950-an telah mempunyai seorang tenaga ahli yang telah mendapat pendidikan khusus di Amsterdam.

Kemudian percetakan Asia, percetakan Sumatera Bode, percetakan Angkasa, percetakan Rezkydan dan percetakan Tanjung Raya.

Untuk mengolah hasil hutan sebelum diekspor, maka di kota ini didirikan beberapa pusat pengolahan, seperti pabrik pengasapan karet yang berlokasi di sekitar Ujung Gurun, pabrik atau perusahaan penggilingan rotan atau manau. Rata-rata kesemua pabrik atau perusahaan ini dimiliki oleh masyarakat yang berasal dari keturunan Cina.

Beberapa industri lainnya yang juga ada di kota Padang adalah pabrik es balok Sari Petojo, pabrik es balok dan minyak kelapa Hadis Didong, pabrik makanan ternak unggas Nusantara dan beberapa buah perusahaan pembuat perabot rumah tangga. Juga ada beberapa buah perusahaan karoseri kendaraan angkutan oplet dan di Teluk Bayur ada pula perusahaan milik negara yang mencoba membuat beberapa buah motor boat dan kapal-kapal dalam ukuran kecil.

Selain berfungsi sebagai pusat perdagangan, pusat perekonomian dan pusat pemerintahan, maka kota Padang juga berfungsi sebagai kota pendidikan. Kesemua sekolah yang ada tersebut juga mempunyai berbagai jurusan dan kejuruan. Sekolah-sekolah tersebut antara lain SMP, ST, SMEP, SKKP, PGA, Madrasah Tsanawiyah dan SMA, SMEA, STM, SAKMA, SKKA, atau sekarang SMKK, SPG, PGA 6 tahun atau madrasah Aliyah, SMF serta perguruan tinggi terdiri dari Unand, IKIP Padang, IAIN Imam Bonjol, AKBP, ATP, ATIP, ABA Prayoga.

Di samping mempunyai lembaga pendidikan formal seperti di atas maka kota Padang juga mempunyai banyak lembaga atau pusat-pusat pendidikan informal seperti tempat kursus-kursus bahasa asing, kursus Bon A dan Bon B, kursus mengetik, kursus

montir ataupun kursus keahlian dalam membuat perabot rumah tangga dan lain sebagainya.

Berpusatnya berbagai kegiatan tata hidup dan kehidupan masyarakat di kota Padang selama kurun waktu 29 tahun ini memang betul-betul menjadikan kota ini menjadi suatu kota besar dan pantas disebut sebagai pusat dari berbagai kegiatan, tidak kecuali sebagai pusat dari kegiatan administratif.

4.3. Pembagian Administratif Kota.

Pembentukan daerah administratif kotapraja Padang bermula semenjak didirikannya Gemeente Padang pada tahun 1906, tepatnya pada tanggal 1 April 1906. Pendirian kota Padang ini dapat dilihat dalam artikel 1 Ordonantie tanggal 1 Maret 1906 dan juga tercantum dalam Lembaran Negara (staatsblad) No. 151. Sebagai penguasa tertinggi di kota Padang sementara dirangkap oleh Asisten Residen. Perangkapan jabatan ini berlangsung sampai tanggal 7 Agustus 1928 saat diadakannya Burgermeester yang pertama buat kota ini dan semenjak itu pula Gemeente Padang langsung berada di bawah Departemen B.B bagian Desentralisasi.¹⁵⁾

Setelah proklamasi kemerdekaan, kota Padang berada di bawah pimpinan walikota Mr. Abu Bakar Yaar. Statusnya langsung di bawah Residen Sumatera Barat kemudian Propinsi Sumatera Tengah. Pada waktu clash ke-2 kota Padang dijadikan markas tentara kerajaan Belanda dan juga pusat kegiatan administratif untuk seluruh daerah Sumatera Barat. Status kota ini kembali berada di bawah kekuasaan pemerintah Belanda. Pejabat walikota ketika itu adalah Dr. A. Halim.

Selama beralihnya status kota Padang seperti di atas, maka kampung merupakan suatu unit administratif yang penting. Jumlah kampung juga berubah-ubah.

Berdasarkan Stadsgemeente Ordonantie, daerah Gemeente Padang meliputi :

1. Kampung Jawa
2. Belakang Tangsi

3. Kampung Pondok
4. Sebagian Ulak Karang
5. Alang Lawas
6. Sawahan
7. Pasar Gedang
8. Parak Gadang
9. Sebagian Marapalam

Jumlah penduduk ketika itu diperkirakan 60.000 jiwa. Dari sekian suku bangsa yang mendiami kota Padang ketika itu, jumlah penduduk bumiputera tetap jauh lebih banyak dari penduduk yang berasal dari bangsa dan suku bangsa lain.

Dari kampung-kampung tersebut di atas terlihat bagaimana pemerintah kolonial mengelompokkan bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa di perkampungan-perkampungan tertentu. Wilayah sepanjang Batang Arau sampai ke ujung jalan Nipah di bagian timur adalah pemukiman dan perkampungan serta pusat perkantoran pemerintah Belanda. Sebelah luar dari jalur tadi adalah perkampungan Cina, Keling (India) dan Arab. Di luar itu lagi adalah perkampungan untuk masyarakat bumiputera. Tetapi masyarakat bumiputera yang tinggal berhampiran dengan perkampungan orang cina, Keling dan Arab tersebut adalah masyarakat yang berasal dari suku bangsa yang bukan suku Minangkabau, misalnya masyarakat Nias dan Jawa. Sampai sekarang masih tersisa adanya perkampungan suku bangsa Nias dan suku bangsa Jawa ini, yaitu Kampung Nias dan Kampung Jawa. Di luar perkampungan masyarakat yang berasal dari suku bangsa lain inilah sebagian besar masyarakat kota Padang asli bermukim.¹⁶⁾ Walaupun begitu di dalam perkampungan yang khusus untuk bangsa dan suku bangsa asing tadinya juga ada ditemui orang-orang Padang yang asli bermukim. Bagaimanapun pembagian yang dibuat oleh pemerintah Kolonial Belanda tersebut tidak begitu kuat dijalankan.

Dari perkampungan yang masuk dalam wilayah kota Padang lama dapat dirinci penyebaran penduduknya. Kampung Ulak Karang, Marapalam, Sawahan dan Alang Lawas didiami

oleh penduduk asli. Penduduk yang mendiami Kampung Jawa, seperti yang telah disebut di atas sebagian besar adalah berasal dari suku bangsa Jawa. Kampung Pondok, Belakang Tangsi dan sekitarnya sebagian besar berasal dari bangsa Cina, Keling dan Arab. Masyarakat Cina merupakan penduduk yang terbanyak bila dibandingkan dari ketiga bangsa ini. Sedangkan daerah sekitar pasar Gedang sampai ke Muara Batang Arau didiami oleh orang Belanda.

Teluk Bayur, tempat di mana pelabuhan laut yang semula dibangun oleh pemerintah Belanda untuk membawa batu-bara Ombilin semula tidaklah termasuk dalam lingkungan daerah administratif kota Padang. Secara juridis, Teluk Bayur baru masuk ke dalam wilayah administratif kota Padang semasa pendudukan Jepang tahun 1942 – 1945. Pada masa itu, kota Padang diperintah oleh seorang Padang Stityo. Masuknya Teluk Bayur ke dalam wilayah administratif kotapraja Padang, bersamaan dengan diadakannya perluasan wilayah kota dengan masuknya daerah Marapalam dan Ulak Karang, Seberang Padang, Bukit Air Manis dan Gunung Pengilun.

Setelah perluasan kota ini kampung menjadi 13. Hal ini membawa perubahan yang cukup penting. Perubahan itu terutama pada banyaknya penduduk. Walaupun sensus penduduk tidak pernah dilaksanakan pada masa pendudukan Jepang, diperkirakan saat itu penduduk kota berjumlah lebih kurang 78.000 jiwa. Setelah penyerahan kedaulatan dan dikembalikannya kota Padang ke pangkuan ibu pertiwi, penduduk kota Padang diperkirakan berjumlah lebih kurang 114.905 jiwa.

Jumlah kampung yang terdapat di kota Padang ini bertahan terus sampai dipecahnya kembali propinsi Sumatera Tengah menjadi Sumatera Barat, Riau dan Jambi, dan dijadikannya kota Padang sebagai ibu kota propinsi Sumatera Barat. Suatu perubahan yang cukup penting bagi pembagian wilayah administratif kota Padang adalah dijadikannya kota Padang menjadi tiga kecamatan yaitu kecamatan Padang Barat, Padang Timur dan Padang Selatan. Dengan perincian sebagai berikut : Kecamatan

Padang Barat dengan luas 13 km² meliputi Ulak Karang dengan luas 6 km², Kampung Jawa 3 km², BelakangTangsi 3 km², dan kampung Pondok 1 km². Kecamatan Padang Timur seluas 10 km² meliputi Alai Gunung Pangilun seluas 2 km², Sawahan seluas 3 km², Marapalam seluas 4 km² dan Parak Gadang seluas 1 km². Sedangkan Kecamatan Padang Selatan mempunyai luas 10 km² meliputi Alang Lawas seluas 1 km², Pasar Gadang seluas 1 km², Seberang Padang seluas 4 km², Air Manis seluas 3 km² dan Teluk Bayur seluas 1 km². Seperti yang telah diungkapkan, maka secara keseluruhan luas kota Padang adalah 33 km².

Pembagian resort administratif buat tiap-tiap kampung dikeluarkan pada tanggal 12 Februari 1954 no. 2/DPR/54. Pembagian resort administratif buat tiap-tiap kampung tersebut adalah sebagai berikut.¹⁷⁾

1. Kampung Ulak Karang meliputi :
 - a. Air Tawar
 - b. Ulak Karang
 - c. Pesisir Ulak Karang
 - d. Belanti Barat
 - e. L o l o l o n g
2. Kampung Jawa meliputi :
 - a. Rimbo Kaluang
 - b. Ujung Gurun Barat
 - c. Tapi Bandar Purus Timur
 - d. Belantung Barat
 - e. Belakang Olo
 - f. Kampung Perak
 - g. Padang Pasir
 - h. Benteng Barat
 - i. Jalan Kencana
 - j. Kampung Jawa
 - k. Tapi Banda Olo Timur

3. Kampung Belakang Tangsi meliputi :
 - a. P u r u s
 - b. D a m a r
 - c. Olo Ladang
 - d. Kasiak Angek
 - e. Koto Marapak
 - f. Tapi Banda Purus Barat
 - g. Tapi Banda Olo Barat
 - h. O l o
 - i. Ujung Pandan
 - j. Belakang Tangasi
 - k. Koto Marapak
4. Kampung Pondok meliputi :
 - a. Pondok Barat
 - b. Kampung
 - c. Kampung Dobi
 - d. Kampung Sebelah
 - e. Pulau Karam
 - f. Jalan Arau
 - g. B e r o k
 - h. N i p a h
5. Kampung Alai Gunung Pangilun meliputi :
 - a. Belanti Timur
 - b. Gunung Pangilun
 - c. Alai Timur
 - d. Alai Barat
 - e. Rimbo Kaluang
6. Kampung Sawahan meliputi :
 - a. Ujung Gurun Timur
 - b. Jati Timur
 - c. Jati Barat
 - d. Kampung Pisang

- e. Belantung Timur
 - f. Simpang Haru
 - g. Sawahan
 - h. Benteng Timur
 - i. Tarandam
7. Kampung Andalas/Marapalam meliputi :
- a. Parak Karakah
 - b. Marapalam
 - c. Andalas I dan Andalas II
 - d. K u b u
 - e. L a k u k
 - f. Simpang Haru
8. Kampung Parak Gadang meliputi :
- a. Kampung Dunia
 - b. Aur Duri
 - c. Air Mati
 - d. Parak Gadang
 - e. Ganting
 - f. Paulasan
9. Kampung Alang Lawas meliputi :
- a. R a n a h
 - b. Alang Lawas
 - c. Kampung Nias
 - d. Pondok Timur
 - e. KampungTionghoa Timur
 - f. Tarandam Selatan
10. Kampung Pasar Gadang meliputi :
- a. Pasar Gadang
 - b. Palinggam
 - c. Kampung Sudut
 - d. Kampung Teleng

- e. Kampung Pabayan
 - f. Kampung Pangalangan
 - g. Kampung Batu
 - h. Pulau Air
 - i. Pasar Batipuh
11. Kampung Seberang Padang meliputi :
- a. Seberang Padang
 - b. Mata Air
 - c. Rawang I dan Rawang II
12. Air Manis meliputi :
- a. Kampung Bukit
 - b. Air Manis
13. Kampung Teluk Bayur meliputi :
- a. Teluk Bayur

Di samping pembagian menurut wilayah administratif kecamatan dan kampung, maka semenjak tahun 1972 di kota Padang diperkenalkan pula bentuk pembagian wilayah atau daerah dengan nama Rukun Tetangga atau RT dan Rukun Kampung atau RK. Bentuk pembagian wilayah berupa RT ini maksudnya adalah merupakan suatu organisasi kemasyarakatan yang dilegalisir oleh pemerintah. Konsep pembagian wilayah berdasarkan tempat tinggal ini pertama kali diperkenalkan oleh pemerintah pendudukan Jepang. Tetapi untuk kota Padang mulai dipakai secara intensif semenjak tahun 1972 dan keseluruhan kota semenjak tahun anggaran 1973/1974. Adapun pembagian wilayah administratif kota Padang khususnya semenjak dipecahnya Sumatera Tengah menjadi Sumatera Barat, Riau dan Jambi adalah sebagai berikut :

Daerah Administratif dan Organisasi Masyarakat

Tahun	Kecamatan	Kampung	RT	RK
---/1970	3	13	—	—
1970/1971	3	13	—	—
1971/1972	3	13	—	—
1972/1973	3	13	—	—
1973/1974	3	13	617	99
1974/1975	3	13	617	99
1975/1976	3	13	617	99
1976/1977	3	13	617	99
1977/1978	3	13	617	99
1978/1979	3	13	617	99

19)

Sampai tahun 1979 kota Padang masih memiliki Kecamatan 3 buah, kampung 13 buah, RT sebanyak 617 dan RK sebanyak 99 buah. Barulah setelah terjadinya perluasan kota Padang jumlah daerah-daerah administratif ini mengalami perubahan. Perubahan itu diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 14 April 1980, sebagai realisasi permintaan rakyat Sumatera Barat yang tercantum dalam Keputusan DPRD-nya NO. 10/SB/75 tanggal 28 Oktober 1975.

CATATAN

- 1). Marnis Nawi Drs etl, *Perkampungan Diperkotaan Sebagai Pola Adaptasi Sosial, Kehidupan Diperkampungan Miskin Kota Padang*, Proyek IDKD Sumatera Barat 1982, hal 57.
- 2). Sumber : Kantor BAPPEDAKODYA PADANG TAHUN 1980.
- 3). Marnis Nawi Drs etl, opcit, hal. 59.
- 4). *Ibid*, hal. 60.
- 5). *Ibid*, hal. 64.
- 6). Sumber : Kantor BAPPEDA KODYA PADANG TAHUN 1980.
- 7). Lihat *Padang Statistik 1976*. Team Perencanaan Pembangunan Daerah datau Tappeda Kodya dengan Kantor Sensus dan Statistik Dati II Padang, hal. 4.
- 8) Ada beberapa asumsi yang diajukan mengenai terjadinya penurunan tingkat pertumbuhan penduduk kota Padang pada kurun waktu 1961-1971. Salah satu diantaranya dikaitkan dengan terjadi perantauan yang cukup tinggi dari warga kota Padang keluar daerah segera setelah terjadinya pemberontakan PRRI. Hans-Dieter Evers dalam studinya mengenai Struktur Sosial Kota-kota Asia Tenggara: Kasus studi Kota Padang hanya melihat terjadi penurunan tingkat pertumbuhan penduduk sebagai akibat derasnya

- orang Padang yang merantau keluar daerah tanpa mencoba mengaitkan dengan terjadinya pemberontakan PRRI. Untuk lebih jelasnya lihat Hans-Dieter Ever, *Sosiologi Perkotaan*, Jakarta: LP3ES, 1982 hal 104-113.
- 9) Ada beberapa kriteria yang diajukan oleh para ahli dalam rangka menentukan apa sebuah kota itu dapat dikatakan sebagai kota besar atau tidak. Berapa teori yang diajukan tersebut dapat dilihat dalam apa yang diungkapkan oleh Sugiyanto Sugiyoko dan Budhi Cahyono Sugiyanto "Daerah Perkotaan: Tinjauan Menuju Strategi Pembangunan Perkotaan" dalam majalah Prima No. 3 April 1976. Sedangkan beberapa sarana dan prasarana yang harus ada dan disiapkan oleh suatu kota besar atau kota yang maju dapat dilihat dalam Dr R OHH. Kusumahatmaja, SH, *Peranan Kota dalam Pembangunan Bandung*: Binatjpta, 1978 hal 36.
 - 10). Sumber : Dinas Pariwisata Sumatera Barat, Peta Sumatera Barat Padang dan Bukittinggi.
 - 11). Pembangunan pelabuhan Teluk Bayur, jalan Kereta Api dan tambang Batubara Ombilin ini diungkapkan dengan puitis oleh Rusli Amran sebagai pembangunan tiga serangkai yang mempunyai arti penting bagi daerah Sumatera Barat dipenghujung abad ke-19. Untuk lebih lengkapnya lihat Rusli Amran, *Sumatera Barat Plakat Panjang*. Jakarta: Sinar Harapan, 1985 hal 303-320.
 - 12). Lihat majalah *Mimbar Departemen Dalam Negeri* No. 3-4 tahun 1980 hal. 19.
 - 13). Mengenai proses pembentukan Kotapraja Padang dapat dilihat dalam buku *Propinsi Sumatera Tengah*, Dep. Penerangan RI, tanpa penerbit dan tanpa tahun terbit hal 374-377.
 - 14). Lihat buku yang diterbitkan oleh Dinas Sejarah Militer Kodam III/17 Agustus, *Hari Ulang Tahun Komando*

Daerah Militer III 17 Agustus ke XVI. (Tanpa kota terbit dan tanpa tahun terbit).

- 15). Lihat buku *Propinsi Sumatera Tengah*, p. 377.
- 16). Mengenai pembagian daerah tempat tinggal di kota Padang tempo doeloe secara lebih lengkap bila dilihat dalam A.A. Navis, *Pasang Surut Pengusaha Pejuang: Otobiografi Hasjim Ning*, (jakarta. Grafiti Pers, 1986) p. 6-7.
- 17). Pembagian resort administratif buat kampung-kampung di kota Padang ini dapat ditemui dalam Berita Propinsi tahun 1954 No. 14 dan juga dapat ditemui dalam *Himpunan Peraturan Sejarah Pemerintah Kodya Padang* yang diterbitkan oleh Bagian Hukum dan Organisasi Tatalaksana Pemerintahan Kodya Dati II Padang tahun 1984.
- 18). Sumber: Padang Statistik dan Informasi.

BAB V

PERANAN EKONOMI

5.1. Gambaran Umum dan Kehidupan Sosial Ekonomi.

Berdasarkan informasi buku "daftar Monitoring, Tipologi dan Klasifikasi Tingkat Perkembangan Desa", yang diterbitkan Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Sumatera Barat, dari 193 buah kelurahan yang ada di kota Padang, hanya 46 buah kelurahan (23,83%) yang kehidupan masyarakatnya cukup memadai atau termasuk klasifikasi Desa Swasembada. Sisanya sebanyak 61,11% termasuk Desa Swakarya dan 16,06% lagi Desa Swadaya.¹)

Dari persentase di atas terlihat, bahwa kehidupan masyarakat daerah ini, berada di bawah garis kemiskinan, terlebih lebih lagi pada kelurahan yang tergolong swadaya.

Dari data/informasi yang diperoleh ternyata masyarakat tersebut berada pada kehidupan dari hasil pertanian dan perikanan atau nelayan, yaitu pada Kecamatan Koto Tangah, Pauh, Kuranji, Lubuk Kilangan, Bungus/Teluk Kabung dan Kecamatan Lubuk Begalung.

Sebahagian kelurahan di Padang Barat, Padang Utara, Padang Selatan merupakan masyarakat di pusat kota dengan kehidupan sebagai pedagang, pegawai, buruh dan yang bergerak di bidang jasa. Kehidupan mereka relatif lebih baik di-

bandingkan dengan keadaan yang dijumpai pada lima kecamatan yang telah disebut pada bahagian terdahulu.

Kehidupan masyarakat yang tergolong elit di kota ini hanya dijumpai pada beberapa tempat saja. Umumnya masyarakat elit yang menempati daerah ini terdiri dari pedagang-pedagang sebagian pegawai negeri mereka yang bergerak di bidang jasa.

Kelurahan yang dianggap elit di Padang Barat adalah: Padang Pasir I, Padang Pasir II, Belakang Olo, Rawang, Padang Baru Barat, Simpang Enam dan Kelurahan Jalan Haji Juanda. Untuk Padang Utara disebut Kelurahan Ulak Karang Timur, Air Tawar Timur, Padang Baru Timur, Kampus Air Tawar dan Wisma Indah I. Di Padang Utara adalah tempat berdomisilinya pejabat-pejabat dan karyawan serta pegawai yang tergolong mempunyai kehidupan yang lumayan.

Perlu dikemukakan bahwa daerah Padang Utara baru tumbuh sekitar 5 - 7 tahun. Daerah ini memang mempunyai potensi sebagai tempat pemukiman perumahan mewah, seperti tersedianya penerangan: air, dan hubungan yang cukup lancar.

Transportasi dan komunikasi cukup memadai, dan dilengkapi dengan sarana pasar, tempat hiburan, tempat ibadah, dan sekolah.

Kehidupan ekonomi masyarakat pada kelurahan-kelurahan "miskin" umumnya terdiri dari orang yang berusaha di bidang pertanian dan nelayan.

Kelurahan yang dianggap miskin di sekitar kota Padang adalah:

1. Padang Barat : a. Parak Kerambil
b. Belakang Tangsi
c. Kampung Jawa Dalam
2. Padang Timur : a. Andalas II
b. Kampung Durian
3. Padang Selatan : a. Pemancangan
b. Bukit Gado-gado

- c. Bukit Kandang
- d. Air Manis
- 4. Padang Utara :
 - a. Berok Gunung Pangilun
- 5. Koto Tengah :
 - a. Dadok Tunggul Hitam
 - b. Air Dingin
 - c. Pulai
 - d. Sungai Bangek
- 6. Nanggalo :
 - a. O l a
 - b. Gurun Lawas
- 7. Kuranji :
 - a. Gunung Sarik
 - b. Kuranji
 - c. Kalumbuk
- 8. Pauh
 - a. Piai Tengah
 - b. Cupak Tengah
 - c. Limau Manis
- 9. Lubuk Begalung
 - a. Kampung Juar
 - b. Penggambaran
 - c. Banuaran
- 10. Lubuk Kilangan
 - a. Tarantang
 - b. Baringin
- 11. Bungus/Teluk Kabung
 - a. Cindakir
 - b. Taluk Buo
 - c. Koto
 - d. Sungai Pisang.³⁾

Daerah-daerah di pusat kota, tanah perhatiannya (sawah maupun ladang) telah mulai hilang karena bertambahnya penghuni kota yang ingin membangun perumahan dan toko-toko untuk perdagangan.

Para petani mulai terdesak dan menjual tanah dan sawah mereka dan pindah ke luar kota. Tempat mereka digantikan oleh masyarakat pedagang. Sebahagian dari penduduk yang pindah ke pinggir kota, ada yang berhasil meningkatkan pendapatannya.

Dari data/informasi yang diperoleh pada Kantor Bappeda Kotamadya Padang, dari 11 kecamatan, Kecamatan Koto Tengah dan Kuranji cukup besar jumlah masyarakatnya yang bekerja sebagai buruh tani. Dari 7.445 rumah tangga yang tercatat yang bekerja sebagai buruh tani adalah 33,98% atau 2.530 rumah tangga⁴).

Jumlah buruh nelayan yang terbesar dijumpai di Kecamatan Koto Tengah, Bungus/Teluk Kabung dan Kecamatan Padang Selatan. Daerah Padang Barat dan Padang Utara sebahagian besar para nelayan telah menjadi pengusaha-pengusaha yang bermodal.

Di samping buruh tani dan buruh nelayan di beberapa keperluan dijumpai buruh tambak, buruh peternakan, dan unggas.

Perlu dikemukakan bahwa hasil pertanian yang utama adalah padi, jagung, kacang tanah, sayur-sayuran, buah-buahan, ubi jalar dan ubi kayu. Hasil pertanian hanya dapat memenuhi kebutuhan sendiri dan sebahagian kecil saja yang dapat dipasarkan, seperti sayur-sayuran dan buah-buahan.

Selain bahan makanan masyarakat daerah ini juga mengusahakan tanaman keras, seperti cengkeh, kelapa, kopi, pala, dan kulit manis. Produksi tanaman keras dijumpai di Koto Tengah, Lubuk Begalung, Bungus/Teluk Kabung, Pauh dan Kuranji.

Luas tanaman cengkeh pada tahun 1980 adalah 1.499 Ha dengan produksi sebesar 259,20 ton atau 0,17 tcn rata-rata per hektar. Hasil yang terbesar diperoleh dari Kecamatan Pauh yaitu 0,34 ton per hektar, sedangkan yang terendah di Kecamatan Koto Tengah dan Bungus/Teluk Kabung yaitu 0,15 ton per hektar.

Kesimpulan umum yang dapat dikemukakan adalah bahwa kehidupan sebahagian besar penduduk Kotamadya Padang masih bersumber dari hasil pertanian dan perikanan, sedangkan daerah-daerah pertanian yang ada di beberapa kecamatan sebahagian besar masyarakatnya masih relatif miskin.

Hal lain yang cukup juga mempengaruhi terhadap kehidupan perekonomian rakyat di kota Padang adalah kegiatan

perindustrian, baik yang dikelola secara perorangan maupun oleh badan usaha seperti PT, CV dan Firma.

Jenis industri yang ada adalah industri makanan, minuman, tekstil, kulit kayu, kimia, barang logam dan kimia, barang galian bukan logam dan lain-lainnya.

Pada umumnya adalah industri makanan dan minuman. Bentuk badan usaha yang mengelolanya adalah perorangan. Sebanyak 110 buah dari 126 buah industri yang ada berbentuk Firma, PT dan CV.

Industri bahan makanan adalah seperti: pabrik roti, mie, tahu, kerupuk, giling lada, giling kopi, minyak makan, kecap, casing, es lilin, es batu, cetak garam, makanan ternak. Sedangkan industri bahan minuman adalah limun sirup, anggur dan spiritus.

Jenis industri tekstil dan kulit adalah pertenunan, penyamakan kulit, sepatu, plastik dan barang dari kulit. Jenis industri ini jumlahnya tidak banyak, tapi cukup berarti dibandingkan dengan industri lainnya.

Industri kayu yang cukup banyak memakan tenaga kerja di daerah ini bergerak di bidang pembuatan alat-alat rumah tangga dan penggergajian, seperti: pembuatan kursi, meja, kursi tamu, meja makan, bupet, lemari, toilet, tempat tidur. Umumnya industri ini berada pada pusat kota. Sedangkan industri penggergajian kayu dan pengolahan manau/rotan terletak di pinggir kota.

Di samping industri kayu, juga dijumpai beberapa industri kimia, seperti: getah ojol, getah slab, getah mesin, getah SIR 20/50, getah tebal, kopra, kelapa sawit dan tim plato. Selain itu terdapat juga industri logam dan kimia yang bergerak dalam pembuatan atau assembling seng, kaleng kosong, tempat tidur, tempat piring, pagar besi, jendela, mobil, karet vulkanisir ban, sabun cuci dan deterjen.

Beberapa industri barang galian bukan logam seperti sumur, jubin, polongan, pintu angin, batu kerawang, batu teraso dan batu pecah. Pada umumnya adalah industri rakyat,

dan hanya satu dua yang ditangani oleh badan usaha.

Suatu hal yang berkaitan erat juga dengan kehidupan ekonomi masyarakat adalah pasar. Di Kotamadya Padang telah banyak berdiri pasar Inpres sebagai pasar-pasar pembantu. Paling tidak tiap kecamatan ada pasar pusat, dan satu pasar pembantu. Umpamanya Padang Utara ditemui 2 pasar pembantu, yaitu yang terletak di Ulak Karang dan di Alai Gunung Pangilun.

Di Kecamatan Padang Selatan yang sebahagian daerahnya merupakan pusat pertokoan terdapat beberapa buah pasar pembantu seperti Pasar Tanah Kongsu, Pasar Teluk Bayur, dan Pasar Simpang Haru. Begitu juga pada kecamatan lain paling tidak punya pasar satu; dan pada hari-hari tertentu sangat ramai, seperti Pasar Lubuk Buaya pada hari Minggu ini terkenal dengan pasar pagi dan murah.⁵)

5.2. Hubungan Ekonomi dengan Kota Lain.

Tersedianya prasarana dan sarana transportasi yang memenuhi syarat antara kota Padang dengan kota-kota kecil di sekitarnya merupakan suatu keuntungan dalam rangka penyediaan barang-barang keperluan. Dari kota atau dari daerah tersebut banyak dihasilkan barang-barang yang diperlukan kota Padang.

Sebetulnya ketergantungan kota ini akan barang-barang dari kota di sekitarnya terbatas pada beberapa jenis hasil tanaman. Karena terbatasnya tanah maka beberapa jenis tanaman tersebut mesti didatangkan. Beberapa jenis barang yang didatangkan adalah: padi, buah-buahan, sayur-sayuran, hasil hutan seperti kayu, karet, hasil perikanan darat ataupun perikanan laut dan lain sebagainya.

Hampir di seluruh daerah Sumatera Barat sebetulnya dapat dijumpai tanaman padi. Tetapi dari keseluruhan tersebut hanya dua daerah yang paling terkenal, yaitu Solok dan Agam. Padi atau beras dari kedua daerah ini mempunyai arti tersendiri. Sampai akhir tahun 1970-an Sumatera Barat belum

bisa berswasembada karena itu harus mendatangkan beras untuk memenuhi kebutuhan warganya. Menurut catatan ketika itu sekitar 45,234,9 ton beras didatangkan melalui Pelabuhan Teluk Bayur.⁶⁾

Selain mendatangkan beras dari Solok dan Agam, di kota Padang sendiri sebetulnya juga terdapat areal persawahan yang ditanami padi, terutama di bahagian Timur kota. Tetapi karena areal tanah persawahan tidak begitu luas maka hasil yang diperoleh jauh dari mencukupi; apalagi areal persawahan tersebut semakin berkurang karena banyaknya tanah persawahan yang dijadikan sebagai areal perluasan pembangunan fisik kota. Berikut ini dapat dilihat berapa tanah kota yang dijadikan sebagai areal pertanian di samping untuk keperluan tata kota.

Jenis dan Luas Penggunaan Tanah.⁷⁾

No.	Jenis Penggunaan Tanah	Luas (Ha)	Persentase
1.	Perumahan	739,20	22,40
2.	Perdagangan	70,20	2,13
3.	Pemerintahan	49,50	1,50
4.	J a l a n	122,43	3,71
5.	Industri	34,66	1,02
6.	Jalur hijau	198,00	6,00
7.	Penggunaan/Sungai	825,00	25,00
8.	Sawah/Pertanian/dll	1.260,90	38,24
J u m l a h		3.300,00	100,00

Selain beras, hasil lain yang dimasukkan ke Padang adalah palawija. Seperti juga tanaman padi, palawija ini juga terdapat di seluruh Sumatera Barat. Biasanya palawija atau tanaman sayuran ini ditanam di sawah-sawah sesudah panen atau di ladang-ladang⁸⁾

Mengingat banyaknya palawija di daerah ini, maka pemerintah mengusahakan mengirimnya ke daerah lain seperti Jambi dan Riau. Daerah yang paling banyak menghasilkan palawija atau sayuran ini adalah di kaki Gunung Merapi di Kabupaten Agam, Padang Panjang, dan daerah sekitar Alahan Panjang di Solok Selatan. Jenis-jenis palawija tersebut adalah jagung, ketela pohon, ketela rambat, kacang tanah, kedele, kol, sawi putih, tomat, kentang dan beberapa jenis sayuran lainnya.

Di samping plawija ada beberapa jenis makanan yang dikonsumsi masyarakat kota Padang didatangkan dari daerah lain. Jumlahnya seringkali melebihi kebutuhan, sehingga Padang melemparkannya ke kota lain. Di sini Padang berfungsi sebagai perantara antara satu kota dengan kota lain.

Beberapa jenis tanaman sejenis adalah: kopi, teh, kelapa, karet, cengkeh, gambir, tembakau, bungkil, cassiavera, hasil hutan, rempeh-rempeh, pala, kacang, serta lain-lainnya.

Kalau tadi dilihat hubungan kota-kota kecil sebagai penghasil barang-barang kebutuhan kota Padang, maka dapat dilihat pula hubungan kota Padang dengan daerah-daerah di pinggirannya, seperti Pauh V, Pauh IX, Kuranji, Lubuk Minturun, Pasang Usang dan lain-lainnya. Khusus untuk daerah-daerah ini hasil utama yang dimasukkan ke kota Padang adalah sayuran, seperti: kangkung, daun ketela pohon, bayam dan ketimun. Sayur ini dibawa oleh pedagang kecil dalam jumlah yang relatif kecil, seperti sebakul atau seketiding. Pada pedagang sayuran yang berasal dari daerah pinggir kota Padang ini sebahagian besar adalah para wanita yang berdagang dengan sistem kaki lima atau berdagang di emper-emper pertokoan.⁹⁾

Peranan lain dari daerah pinggir kota ini adalah sebagai penyedia bahan untuk pembangunan, seperti batu, pasir, kerikil, serta tanah timbunan. Sebahagian besar kebutuhan ini diambilkan dari sungai. Pusat-pusat pengambilan batu, pasir, kerikil dan tanah timbunan antara lain terdapat di sekitar Lubuk Begalung dan Kuranji.

Peranan daerah pinggir dalam pemenuhan kebutuhan pembangunan adalah untuk penyediaan batu bata. Batu bata

Perincian Barang-barang Bahan Bangunan Yang Keluar
Masuk Melalui Jalan Darat dari Jembatan Timbangan
Teluk Bayur Tahun 1979.

No.	Jenis Barang	Volume Keluar/Masuk (ton)	
		Keluar	Masuk
1.	2	3	4
1.	Semen	40.361,4	2.065,6
2.	Tegel/eternit	—	82,3
3.	Balok/Papan	4.091,2	19,8
4.	Genteng	—	177,50
5.	S e n g	391,90	9.950,40
6.	A s p a l	—	7.773,00
7.	Besi Beton	30,50	5.588,70
8.	Paku	—	686,40
9.	Alat Listrik	7,70	935,30
10.	Alat Leading	—	1.802,70
11.	Tripleks	—	269,80
12.	Asbes	—	348,10
13.	Kaca/Cermin	—	53,50
14.	K a w a t	—	240,20
15.	S t i b a s	—	557,40
16.	Batu api	—	1.375,40
17.	M i k a	—	4,10
18.	K o a k e l	—	37,00
J u m l a h		44.882,70	31.987,20 ¹⁰⁾

yang digunakan untuk kota Padang didatangkan dari Lubuk Alung. Sedangkan bahan bangunan seperti kayu didatangkan dari Kabupaten Pasaman, tepatnya di Kecamatan Air Bangis, Pasaman dan Talamau, Kabupaten Sawahlunto Sijunjung, dan Kepulauan Mentawai. Beberapa nama kayu yang cukup terkenal di kalangan masyarakat yang banyak dihasilkan daerah-daerah tersebut adalah andalas, rikir, rasak, merbau, kalek, katuko, paning-paning, banio dan surian. Kayu-kayu ini dibawa ke kota Padang, ada yang dalam bentuk gelondongan dan ada pula yang telah diolah. Di kota Padang kayu-kayu yang berasal dari daerah ini diproses lagi di beberapa buah pusat penggergajian.

Seperti sudah disinggung di atas, selain dikonsumsi sendiri, kota Padang juga berfungsi sebagai pusat transito. Sejumlah barang ditumpuk kemudian disalurkan ke kota lain.

Dari delapan belas macam bahan bangunan yang penting ini, hanya lima jenis yang dikeluarkan dari daerah Sumatera Barat atau Padang. Dua dari lima jenis itu adalah semen, balok atau papan.

Tabel-tabel berikut ini juga akan memperlihatkan kenyataan serupa, di mana barang-barang komoditi dan barang-barang keperluan untuk daerah pedalaman terlebih dahulu masuk melalui kota Padang.

Tabel

Perincian Barang-barang Hasil Tambang Yang Keluar Dan Masuk Melalui Jalan Darat dari Jembatan Timbangan Teluk Bayur Tahun 1979.

No.	Jenis Barang	Volume Keluar/Masuk (ton)	
		Keluar	Masuk
1.	2	3	4
1.	Gibs	—	28.659,60
2.	Minyak tanah	—	84.723,80
3.	Bensin	—	43.472,50
4.	Solar	—	76.750,30
5.	Olie	—	3.038,80
6.	Residu	—	22.805,10
7.	Avtur	—	7.202,00
8.	Timah	149,10	646,90
9.	Batu pualam	—	30,90
10.	Batubara	4,80	—
11.	Dan lain-lain	116,30	8.192,70
Jumlah		270,20	275.527,60 11)

Tabel
Perincian Barang-barang Mesin Yang Keluar Masuk Melalui
Jalan Darat dari Jembatan Timbangan Teluk Bayur tahun 1979

No.	Jenis Barang	Volume Keluar/Masuk (ton)	
		Keluar	Masuk
1.	Onderdil	—	1.262,90
2.	Sepeda motor	—	736,10
3.	Radio/Televisi	—	305,10
4.	Mesin jahit	—	713,50
5.	Mesin lainnya	34,50	1.008,00 12)
J u m l a h		34,50	4.205,60

Tabel
Perincian Barang-barang Pangan Yang Keluar Masuk Melalui
Jalan Darat Dari Jembatan Timbangan Teluk Bayur Tahun 1979

No.	Jenis Barang	Volume Keluar/Masuk (ton)	
		Keluar	Masuk
1.	Beras	7.043,30	45.234,90
2.	Tepung terigu	—	16.114,50
3.	Gula pasir	—	24.731,50
4.	Gula merah	—	—
5.	Garam	—	10.612,50
6.	Ikan asin	37,40	365,10
7.	Minyak goreng	147,50	40,00
8.	Kacang	—	390,90
9.	Roti	—	262,00
10.	Sayur-sayuran	—	1.480,50
11.	Buah-buahan	132,30	— 13)
J u m l a h		7.360,50	99.231,90

Tabel
Perincian Barang-barang Sandang, Kelontong dan Lain-lain
Yang Keluar Masuk Melalui Jalan Darat dari Jembatan Timbang-
an Teluk Bayur Tahun 1979.

No.	Jenis Barang	Volume Keluar/Masuk (ton)	
		Keluar	Masuk
1.	Tekstil	1,90	7.504,60 14)
2.	Bahan tenun	—	90,40
3.	Kapas	—	474,60
4.	Sandal/sepatu	—	3,90
5.	Kelontong	7,50	15.636,50
6.	Dan lain-lain	13,90	46,70
J u m l a h		23,40	23.756,70

Tabel

Perincian Barang-barang Pertanian/Hasil Hutan Yang Keluar Masuk Melalui Jalan Darat dari Jembatan Timbangan Teluk Bayur Tahun 1979.

No.	Jenis Barang	Volume Keluar/Masuk (ton)	
		Keluar	Masuk
1.	Kopi	5.745,40	—
2.	Teh	49,70	210,00
3.	Kelapa	—	—
4.	Karet	40.897,80	—
5.	Cenkeh	1.381,30	—
6.	Gambir	5.096,60	—
7.	Tembakau	45,10	48,90
8.	Bungkil	3.272,50	—
9.	Cassiavera	12.927,90	28,60
10.	Hasil Hutan	14.183,80	198,60
11.	Rempah-rempah/pala	515,20	277,70
12.	Sagang	329,70	—
13.	Dan lain-lain	49,80	— 15)
Jumlah		84.484,80	763,80

Tabel
Perincian Barang-barang Bahan Kimia Yang Keluar Masuk Melalui Jalan Darat dari Jembatan Timbangan Teluk Bayur Tahun 1979.

No.	Jenis Barang	Volume Keluar/Masuk (ton)	
		Keluar	Masuk
1.	Sabun	—	385,00
2.	Rokok	—	3.796,20
3.	Pupuk	40,70	29.174,70
4.	Obat-obatan	63,80	528,00
5.	Cat	—	80,20
6.	Bahan Minuman	—	1.632,50
7.	Lain-lain	—	129,80
Jumlah		104,50	35.726,40

Dari kesemua tabel di atas dapatlah dilihat bagaimana peranan kota Padang dalam penyaluran dan pendistribusian berbagai jenis barang. Tabel di atas memperlihatkan betapa besarnya ketergantungan daerah Sumatera Barat terhadap barang-barang yang datang dari luar. Kecuali barang-barang hasil pertanian dan hasil hutan Sumatera Barat sangat bergantung pada barang-barang yang datang dari luar. Di kota Padanglah semua keperluan tersebut ditumpuk terlebih dahulu dan kemudian baru dibagi. Kesimpulan sementara adalah bahwa kota Padang memang mempunyai arti khusus dalam menyalurkan dan mendistribusikan barang-barang keperluan daerah pedalaman, di samping untuk keperluannya sendiri.

5.3. Pasar dan Pusat Pertokoan.

Semenjak tahun 1950 sampai dengan tahun 1979 di kota Padang telah dibangun sebuah kompleks pasar induk selaku pu-

sat jaringan perekonomian penduduk kota sepanjang hari. Pasar induk itu dikenal sebagai Pasar Raya yang terdiri dari Pasar Bertingkat Fase I, II, III, IV, V, Pasar Bertingkat Blok A, Fase VI, VII, Pasar Raya Timur Blok I dan Pertokoan Rajawali.

Berbagai macam jenis barang kebutuhan seperti makanan, pakaian, tas-tas, sepatu, televisi, radio, alat-alat tulis dan sebagainya tersedia di Pasar Raya ini. Barang-barang ini kebanyakan didatangkan dari luar kota Padang. Barang-barang ini diangkut ke kota Padang oleh para pedagang melalui jalan darat. Adapun pusat penjualannya di pasar Raya yang bertempat di los-los pasar Balok Timur I dan juga memenuhi jalan-jalan di sekitarnya.

Sebahagian besar usaha perdagangan barang kebutuhan pokok di kota Padang itu, dijalankan oleh para pedagang yang tergolong kecil dan menengah. Mereka berasal dari Bukittinggi, Solok, Pariaman, Payakumbuh dan lain-lain. Laju peningkatan usaha mereka berjalan relatif stabil, keuntungannya hanya sekedar untuk memenuhi keperluan hidup rumah tangga mereka. Dengan kata lain, keuntungan yang diperoleh sukar dijadikan sebagai investasi untuk memperbesar usaha perdagangannya.

Sementara itu penjualan barang-barang sandang berupa kain baju dan celana berpusat pada bahagian tengah kompleks Pasar Raya, yang digerakkan oleh para pedagang yang tergolong berekonomi menengah dan kuat. Pada bahagian kompleks yang sama, juga terdapat pusat perniagaan sepatu, barang-barang kelontong, alat-alat kosmetik, alat-alat tulis dan lain-lain. Mereka memiliki modal yang tergolong menengah dan kuat. Hal ini dapat dilihat melalui penampilan usaha mereka yang kebanyakan mempunyai persediaan barang-barang dagang yang relatif banyak dari berbagai kualitasnya. Secara praktis, peranan para pedagang Cina hampir tidak ditemui di pusat-pusat perbelanjaan Pasar Raya Padang.

Penjualan barang-barang kebutuhan sekunder yang tergolong mewah: berupa radio, televisi, mesin tulis, alat-alat listrik, dan lain-lain, berpangkalan di Pasar bertingkat Blok A.

Perdagangan ini dipegang oleh para saudagar yang mempunyai modal yang besar. Di pasar bertingkat Blok A ini juga terdapat pusat perdagangan grossir. Orang-orang yang membeli barang dalam partai besar ini adalah saudagar-saudagar dari daerah lain, di mana barang-barang yang telah dibelinya itu kemudian dijualnya di Solok, Pariaman, Batusangkar dan lain-lain. Adapun barang-barang grossir ini yaitu buku-buku tulis, pakaian jadi, tas-tas untuk keperluan anak-anak sekolah, benang dan lain-lain.

Aktivitas perdagangan di Pasar Raya ini, penting artinya bagi perekonomian kota Padang. Di satu pihak, Pasar Raya berfungsi sebagai tempat berakumulasinya barang-barang lokal dari luar guna memenuhi kebutuhan hidup penduduk kota Padang, di pihak lain ia mampu menciptakan wadah lapangan kerja. Tidak sedikit di antara para pedagang Pasar Raya itu yang mengikutsertakan anak dan saudara-saudaranya yang datang dari kampung halaman, dengan tujuan untuk meneruskan studinya. Jadi sambil sekolah, mereka ini dididik memenuhi kebutuhan hidup sendiri, sehingga mereka tidak canggung menghadapi hari esok jika pendidikan formalnya terputus. Peluang-peluang lapangan pekerjaan baru lainnya juga terbuka sebagai akibat dari aktivitas perekonomian Pasar Raya itu. Di antaranya buruh-buruh angkat, tenaga Hansip yang akan bertugas mengelola ketertiban dan kebersihan gang Pasar Raya. Di lain pihak, keberhasilan para pedagang di Pasar Raya dalam aktivitas perdagangannya, sudah pasti akan memperbesar masukan jumlah pajak dan berbagai jenis pungutan lainnya yang bisa diperoleh pemerintah kota Padang.

Ketekunan para saudagar Pasar Raya dalam mengembangkan usahanya, banyak yang akhirnya muncul menjadi pedagang kaya yang menempati posisi sosial terhormat di lingkungan tempat tinggalnya. Mereka memiliki kendaraan, gedung tempat tinggal yang tergolong mewah, dan anak-anaknya memperoleh pendidikan di berbagai perguruan tinggi. Keuntungan perdagangan yang mereka dapatkan tidak hanya dipergunakan untuk memenuhi biaya keperluan hidup juga diinvestasikannya guna me-

tingkatkan volume dan mempertahankan kelangsungan usaha perdagangannya. Sebahagian uang yang ditabungkan pada berbagai Bank kota ini, penting artinya, karena uang ini merupakan sumber dana bagi pihak Bank. Bank menyalurkan pada para nasabah yang membutuhkannya, dalam bentuk berbagai macam jenis kredit. Di antaranya Kredit Investasi Kecil atau KIK, Kredit Modal Kerja Permanen atau KMKP dan lain-lain yang dimanfaatkan oleh para nasabah untuk mengembangkan aktivitas kehidupan yang mereka tekuni.

Di samping Barat terminal oplet, terdapat sederetan pedagang emas dan diselang-selingi oleh para pedagang jam dan kacamata. Di bahagian belakangnya tersedia barang-barang perabot rumah tangga seperti kursi, meja, lemari dan sebagainya. Nampaknya pusat perbelanjaan barang-barang perabot ini, bertugas melayani masyarakat pembeli yang kategorinya tergolong berekonomi lemah dan menengah. Bagi pembeli yang berasal dari kalangan elit dan orang-orang yang memiliki ekonomi kuat, lebih senang membeli alat-alat perabot rumah tangga di tempat-tempat di luar kompleks Pasar Raya ini, seperti pada toko-toko penjualan perabot yang berlokasi di Jalan Pemuda, Jalan Veteran, Ulak Karang dan lain-lain.

Pusat penjualan barang-barang bangunan seperti seng, cermin, besi, pipa-pipa air, paku dan yang sejenis dengan itu terdapat di sepanjang jalan Prof. Mohammad Yamin SH Padang. Pada deretan lokasi ini dijual pula barang-barang onderdil mobil dan sepeda motor oleh para pedagang Cina. Sementara itu di sepanjang Jalan Bundo Kandung dan Imam Bonjol sampai ke daerah-daerah pemukiman masyarakat Cina, merupakan pusat perbelanjaan barang-barang mewah seperti mobil, sepeda motor, televisi, alat-alat olahraga dan juga ada beberapa buah restoran. Aktivitas perdagangan di kompleks ini didominasi oleh para pedagang Cina. Walaupun demikian, kompleks ini ada juga ditempati oleh segelintir usahawan Minangkabau. Mereka menjual barang kerajinan tangan rakyat seperti kain tenunan, keranjang dan topi yang terbuat dari rotan, sepatu, toko-toko buku dan sebagainya.

Selain kompleks Pasar Raya dan pusat-pusat perbelanjaan tersebut, di kota Padang juga terdapat beberapa buah pasar pembantu. Pasar pembantu ini adalah: Pasar Simpang Haru di bahagian Timur kota Padang, Pasar Alai yang terletak di Timur Laut kota Padang, Pasar Tanah Kongsu di kawasan pemukiman masyarakat Cina, Pasar Teluk Bayur yang terletak di bahagian Selatan kota, dan Pasar Ulak Karang yang terletak di arah Utara. Kecuali Pasar Tanah Kongsu, maka seluruh pasar-pasar pembantu tersebut ditempati oleh para pedagang penduduk asli, yang merupakan pedagang-pedagang kecil. Sebahagian besar isi pasar ini adalah barang-barang kebutuhan pokok. Tempat-tempat penjualan berupa petak-petak kios, los-los dan kaki lima. Pasar ini juga berperan sebagai tempat penampungan barang-barang pertanian yang dihasilkan oleh penduduk daerah Padang luar kota seperti: sayur pakis dari Bungus, telur, bayam, ketimun, lada, kacang dan sebagainya datang dari Pauh, Koto Tangah, Indarung dan lain-lain.

Dalam volume yang relatif kecil, di Pasar Pembantu ini juga diperdagangkan barang-barang pakaian, alat-alat tulis, sepatu, sandel, alat-alat listrik dan sebagainya.

Pasar Tanah Kongsu, merupakan kawasan pertokoan di daerah pemukiman masyarakat Cina. Kebanyakan mekanisme perdagangan di daerah ini berlangsung secara grossir, yaitu proses perdagangan dalam bentuk partai besar. Di samping itu juga ada pedagang-pedagang eceran yang melayani keperluan rumah tangga seperti telur, minyak goreng, sabun, tepung terigu dan lain-lain. Pasar ini banyak didatangi oleh penduduk di daerah sekitarnya seperti Muara, Berok Nipah, Masyarakat Cina, Palanggam, Pemancangan dan lain-lain. Biasanya pasar ini diramaikan orang pada setiap pagi sampai tengah hari.

Kehadiran para pedagang kaki lima juga penting artinya bagi kegiatan perekonomian kota Padang. Mereka menjual baju dan celana, barang-barang kumango seperti ikat pinggang, pisau, gunting, benang, jarum, barang-barang kelontong, buku dan majalah, batu cincin, alat-alat permainan anak-anak, sandel,

sepatu dan lain-lain. Aktivitas perdagangan kaki lima ini kebanyakan ditekuni oleh anak-anak muda yang umumnya dikenal sebagai generasi muda putus sekolah. Pedagang-pedagang kaki lima yang beroperasi di bidang penjualan rokok keliling, banyak yang dikerjakan oleh anak-anak berusia sekolah dasar dan menengah. Mereka bekerja dengan motivasi ingin membantu kesulitan ekonomi keluarga, dan membantu diri mereka dalam rangka melanjutkan aktivitas pendidikan formal yang mereka ikuti. Sedangkan pedagang kaki lima yang menjual sandal jepit yang jumlahnya relatif tidak begitu banyak di kota Padang, umumnya ditekuni oleh para pedagang lelaki dan wanita dari tanah Batak.

Pedagang kaki lima di kota Padang sebahagian berperan melayani para pembeli ekonomi lemah. Karena masyarakat pembeli ini lebih suka berhubungan dengan pedagang kaki lima yang harga jualnya relatif murah dan tidak mencekik. Di samping itu, perdagangan kaki lima tersebut juga berperan sebagai wadah penampungan bagi proses urbanisasi. Aktivitas perdagangan ini berfungsi pula sebagai arena latihan bagi orang-orang yang berminat terhadap dunia perdagangan. Melalui proses latihan itu, maka terbukalah peluang-peluang bagi para saudagar bersangkutan untuk berkembang lebih jauh. Ada di antara para pedagang ekonomi menengah dan kuat yang berdagang di kompleks Pasar Raya Padang sekarang, adalah bekas saudagar-saudagar yang pernah memetik pengalaman melalui arena latihan selaku pedagang kaki lima. Selama periode dari tahun 1950 sampai dengan tahun 1979, terlihat bahwa fasilitas dan kegiatan perekonomian yang berlangsung di kota Padang selalu mengalami perbaikan, guna menjamin terpenuhinya kebutuhan penduduk kota. ¹⁷⁾

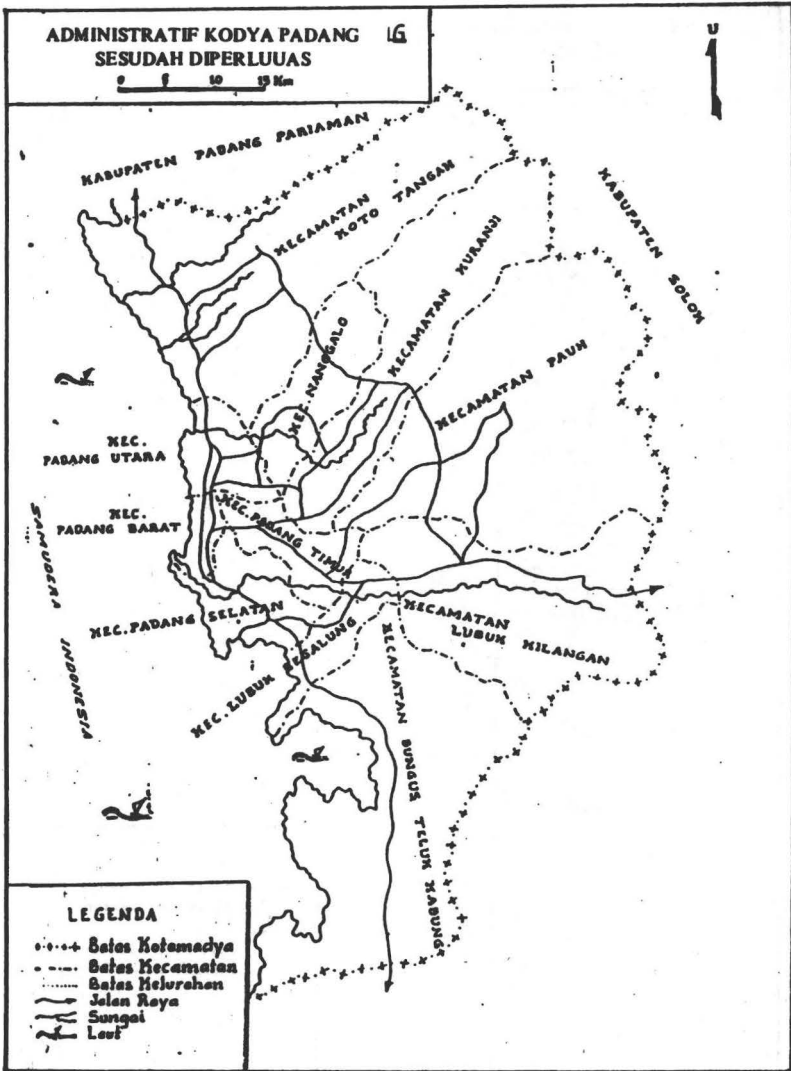
CATATAN

- 1) Direktorat Pembangunan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera, *Daftar Monitoring, Tipologi Dan Klasifikasi Tingkat Pembangunan Desa*, Padang, 1982, hal 51.
- 2). Marnis Nawi, Drs, et al, *Perkampungan Di Perkotaan Sebagai Pola Adopsi Sosial Kehidupan Diperkampungan Miskin Kota Padang*, IDKD Sumatera Barat 1982, hal 69.
- 3). *Ibid*, hal 71
- 4). Kantor BAPPEDA KOTAMADYA PADANG, *Penyebaran Penduduk di Kota Padang*, Padang 1982, hal 71.
- 5). Marnis Nawi, et al, *Op Cit*, hal 76.
- 6). Lihat *Padang Dalam Angka Tahun 1979*, Padang TEPPE-DA Kotamadya Tk. II Padang dan Kantor Sensus dan Statistik Kotamadya Tk. II Padang, 1980, hal 157.
- 7). Sumber : Padang *Statistik 1976*.
- 8). Penanaman tanaman muda atau sayuran di sawah setelah panen telah merupakan suatu pola tanam dalam masyarakat Sumatera Barat. Dengan pola tanam seperti ini beberapa keuntungan diperoleh oleh petani, seperti adanya variasi tanaman sehingga tidak memung-

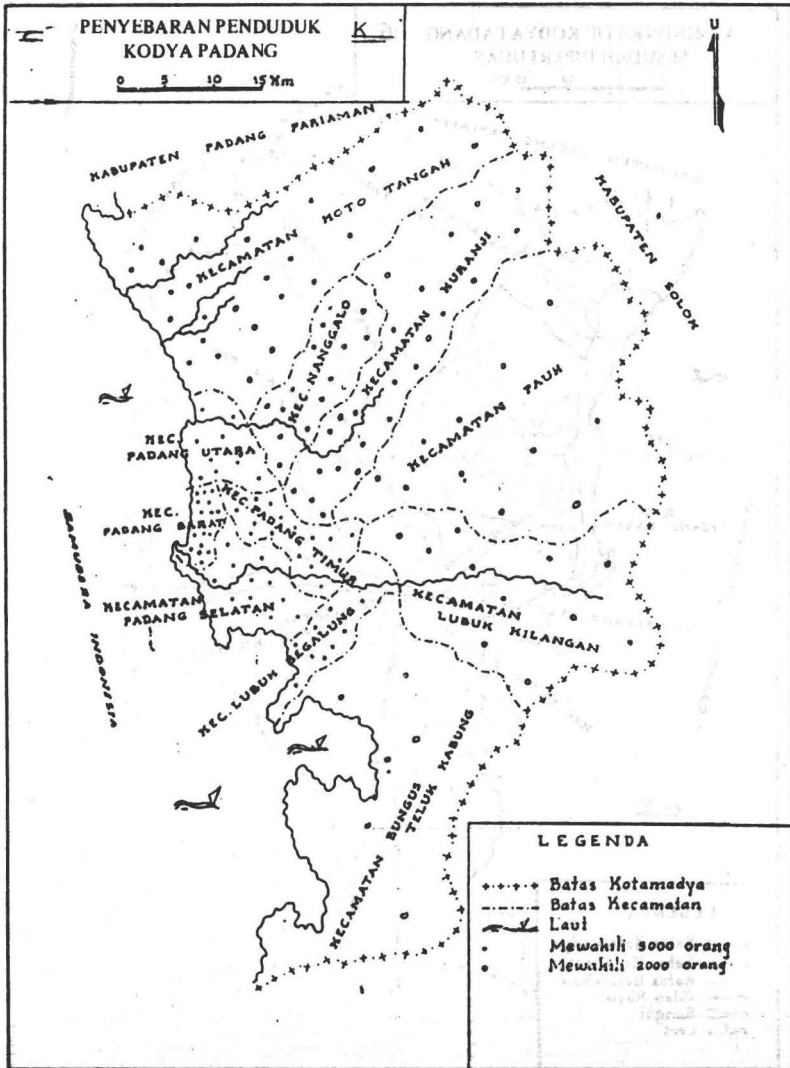
kinkan adanya satu jenis hama tanaman di persawahan serta dapat pula memanfaatkan sawah-sawah setelah panen dari pada kosong.

- 9). Suatu studi mengenai para pedagang sayuran dari daerah pinggiran kota Padang ini walaupun sudut peninjauan dari aspek sosiologis telah ada yang melakukan. Untuk lebih jauh mengetahui mengenai pedagang-pedagang ini dapat dilihat dari *skripsi Afrizal*.
- 10). Sumber : *Padang Dalam Angka Tahun 1979*.
- 11). *Ibid.*
- 12). *Ibid.*
- 13). *Ibid.*
- 14). *Ibid.*
- 15). *Ibid.*
- 16). *Ibid.*
- 17). Seluruh data yang ada dari uraian mengenai "*Pasar Dan Pusat Pertokoan*" berdasarkan pengamatan langsung dan wawancara dengan beberapa pedagang yang tidak dapat memberikan data tertulis.

2. Lampiran II.



3. Lampiran III.



4. Lampiran IV.

Klasifikasi Jalan Dan Panjangnya Di Kodya Padang Menurut Keadaan Tahun 1979 Dan 1980.

No.	Klasifikasi	1979 meter	Persen- tase (%)	1980 meter	Persen- tase (%)
1.	Klas I	—	—	—	—
2.	Klas II	—	—	12.805	4,26
3.	Klas III	24.266	12,08	16.729	5,57
4.	Klas III A	11.350	5,65	20.000	6,67
5.	Klas IV	26.420	13,15	60.000	19,97
6.	Klas V	47.531	23,66	85.466	28,45
7.	Tanpa Klas	91.348	45,46	105.400	35,08
J u m l a h		200.915	100,00	300.400	100,00

Panjang Jalan Menurut Jenisnya Di Kodya Padang Keadaan Tahun 1979 dan 1980.

No.	Jenis Jalan	Panjang Jalan			
		1979		1980	
		Meter	%	Meter	%
1.	Aspal	109.567	54,53	195.000	64,91
2.	Kerikil	11.848	5,90	15.400	5,13
3.	Tanah	79.500	39,57	90.000	29,96
J u m l a h		300.915	100,00	300.400	100,00

Panjang Saluran Primer Menurut Jenis Di Kodya Padang Dari Tahun 1978 Sampai Dengan Tahun 1980.

No.	Tahun	Jenis saluran	Lebar (meter)	Panjang (meter)	Jumlah
1.	1978	Permanen	4 - 7	6.085	11.435
		Tanah	4 - 7	5.350	
2.	1979	Permanen	4 - 7	6.152	11.435
		Tanah	4 - 7	5.283	
3.	1980	Permanen	4 - 7	8.400	15.500
		Tanah	4 - 7	7.100	

Sumber : Dinas PU Kodya Padang 1980.

5. Lampiran V.

Panjang Saluran Sekunder Menurut Jenisnya Di Kodya Padang Dari Tahun 1978 Sampai Dengan Tahun 1980.

No.	Tahun	Jenis saluran	Lebar (meter)	Panjang (meter)	Jumlah (meter)
1.	1978	Permanen	2 - 4	1.250	8.220
		Tanah	2 - 4	6.970	
2.	1979	Permanen	2 - 4	1.602	8.220
		Tanah	2 - 4	6.618	
3.	1980	Permanen	2 - 4	3.700	18.100
		Tanah	2 - 4	14.400	

Panjang Saluran Tertier Menurut Jenisnya Di Kodya Padang
Dari Tahun 1978 Sampai Dengan Tahun 1980.

No.	Tahun	Jenis saluran	Lebar (meter)	Panjang (meter)	Jumlah (meter)
1.	1978	Permanen Tanah	0,5 – 2	19.188	101.721
			0,5 – 2	82.603	
2.	1979	Permanen Tanah	0,5 – 2	28.677	101.721
			0,5 – 2	73.044	
3.	1980	Permanen Tanah	0,5 – 2	45.000	145.000
			0,5 – 2	100.000	

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kodya Padang Tahun 1980.

Banyak Bangunan Bertingkat Dan Tidak Bertingkat Dari Jenis
Tunggal Menurut Kecamatan Di Kodya Padang Keadaan Tahun
1980.

No.	Kecamatan	Jenis Bangunan Tunggal			
		Bertingkat		Tidak Bertingkat	
		f	%	f	%
1.	Padang Selatan	1997	3,68	121	6,82
2.	Padang Barat	6681	12,31	297	16,74
3.	Padang Utara	5393	9,93	76	4,29
4.	Padang Timur	6895	12,70	156	8,79
5.	Koto Tengah	7900	14,55	133	7,50
6.	Nanggalo	3368	6,20	22	1,24
7.	Kuranji	7680	14,15	319	17,98
8.	Pauh	3756	16,92	431	24,30
9.	Lubuk Kilangan	2784	5,04	94	5,30
10.	Lubuk Begalung	5666	10,44	112	6,31
11.	Bungus/T. Kabung	2213	4,08	13	0,73
Jumlah		54283	100,00	1774	100,00

**KEGIATAN PEMBINAAN KEPARIWISATAAN TERHADAP DAERAH BAWAHAN ORANG (KAB)
TAHUN 1977/1978**

No.	Jenis Kegiatan					
	Penataran	Rapat staf	Pertemuan	Kunjungan	Santiaji	Studi Tour
1. Kecamatan	11/3	11/60	11/11	4/11	326/11	1/1
2. Kelurahan	772/2	193/3	12/11	192/15		-
3. LKMD/SD	193/11	112/4	10/11	-	-	13/1
4. P K K	243/11	-	500/11	129/15		10/1
Jumlah	1.224/27	296/17	714/41	317/44	326/11	24/3

Sumber Kantor BAPPEDA Kodya Padang 1982

7. Lampiran VI.

Wilayah Administratif Pemerintahan Kodya Padang 1977/1978
Sampai Dengan 1981/1982

No.	Periode		1980/1981	1981/1982	
	1977/1978 - 1981/1982		PP No. 17/ 1980	SK Mendagri No. 140	502/1982
1.	Kecamatan	3	6	11	
2.	Kampung	13	13	193	Kelurahan
3.	Nagari	—	9	—	
4.	RK/LSD	101	101	193	(LKMD)
5.	Jorong	—	94	—	

Sumber : Kantor BAPPEDA Kodya Padang 1982.

Tabel II.11

Jumlah Penduduk, Luas dan Kepadatan Penduduk Pada Setiap Kecamatan Di Kotamadya Padang Keadaan Tahun 1980.

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk		Luas Kec. (km ²)		Kep. Pend
		f	%	f	%	
1.	Padang Selatan	55396	11,53	12,20	1,95	4541
2.	Padang Barat	80534	16,73	6,77	1,08	11896
3.	Padang Utara	47488	9,88	7,97	1,27	5958
4.	Padang Timur	75817	15,76	7,62	1,22	9950
5.	Koto Tengah	49038	10,21	157,85	25,19	311
6.	Nanggalo	25330	5,27	14,17	2,26	1788
7.	Kuranji	17157	9,81	57,00	9,10	827
8.	Pauh	21392	4,45	147,00	23,46	146
9.	Lubuk Kilangan	21461	4,47	86,80	13,85	247
10.	Lubuk Begalung	44654	9,29	30,00	4,79	1488
11.	Bungus/Teluk Kabung	12310	2,57	99,25	15,83	124
Kotamadya Padang		480607	100,00	626,63	100,00	767

Lampiran : V

**BANGUNAN-BANGUNAN MENURUT JENISNYA PADA SETIAP KECAMATAN DI KODYA PADANG
KEADAAN TAHUN 1980**

Kecamatan	Pergunaan Bangunan										Lainnya	
	Tempat tinggal		Toko per- dagangan		Industri/ kerajinan		Penginapan/ restoran		Rumah tangga			
	%	J	%	J	%	J	%	J	%	J	f	%
Padang Selatan	8497	11,09	396	11,25	111	14,40	65	21,45	9725	11,30	712	13,74
Padang Barat	12334	16,11	1349	38,32	177	22,96	170	56,11	14326	16,64	748	14,44
Padang Utara	8089	10,56	3239	6,79	76	9,86	18	5,94	8485	9,86	375	7,24
Padang Timur	11360	14,82	395	11,22	85	11,02	20	6,60	13931	16,18	656	12,66
Kota Tengah	7843	10,23	449	12,76	75	9,73	6	1,98	8601	9,99	899	17,35
Nanggalo	4506	5,88	101	2,87	15	1,94	—	—	4481	5,21	404	7,80
Kuranji	8120	10,60	226	6,42	39	5,06	4	1,32	8822	10,25	288	5,56
Pauh	3948	5,15	90	2,56	57	7,39	15	4,95	4178	4,85	170	3,28
Lbk. Kilangan	3516	4,59	162	4,60	43	5,58	2	0,66	3777	4,39	312	6,02
Lbk. Begalung	6316	8,24	107	3,04	93	12,06	3	0,99	7529	8,74	380	7,33
Bungus/Teluk Kabung	2093	2,73	6	0,17	—	—	—	—	2233	2,59	237	4,58
Jumlah	76632	100,00	3520	100,00	771	100,00	303	100,00	86088	100,00	5181	100,00

9. Lampiran IX.

Banyak Bangunan Bertingkat Dan Tidak Bertingkat Dari Jenis Gandeng Dua Atau Kopel Pada Kecamatan-Kecamatan Di Kodya Padang Menurut Keadaan Tahun 1980.

No.	Kecamatan	Jenis Bangunan Gandeng Dua			
		Tidak Bertingkat		Bertingkat	
		f	%	f	%
1.	Padang Selatan	663	15,43	37	14,98
2.	Padang Barat	916	21,32	75	30,36
3.	Padang Utara	667	15,53	28	11,34
4.	Padang Timur	821	18,90	71	28,75
5.	Koto Tengah	230	5,35	9	3,64
6.	Nanggalo	597	13,90	—	—
7.	Kuranji	41	0,95	7	2,83
8.	Pauh	23	0,54	2	0,81
9.	Lubuk Kilangan	254	5,91	12	4,86
10.	Lubuk Begalung	81	1,89	6	2,43
11.	Bungus/Teluk Kabung	12	0,28	—	—
Jumlah		4.296	100,00	247	100,00

Banyak Bangunan Bertingkat Dan Tidak Bertingkat Jenis Gandeng Banyak Pada Kecamatan-Kecamatan Di Kodya Padang Menurut Keadaan Tahun 1980.

No.	Kecamatan	Jenis Bangunan Gandeng Banyak			
		Tidak Bertingkat		Bertingkat	
		f	%	f	%
1.	Padang Selatan	737	19,70	548	56,09
2.	Padang Barat	1.077	28,79	289	29,58
3.	Padang Utara	330	8,82	23	2,36
4.	Padang Timur	1.088	29,08	69	7,06
5.	Koto Tengah	93	2,49	5	0,51
6.	Nanggalo	37	0,99	—	—
7.	Kuranji	15	0,40	13	1,33
8.	Pauh	16	0,43	2	0,20
9.	Lubuk Kilangan	130	3,48	10	1,02
10.	Lubuk Begalung	213	5,69	18	1,85
11.	Bungus/Teluk Kabug	5	0,13	—	—
J u m l a h		3.741	100,00	977	100,00

10. Lampiran X.

Komposisi Penduduk Menurut Golongan Umur Dan Jenis Kelamin Di Kotamadya Padang Keadaan Tahun 1980.

No.	Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	0 - 4	35037	32754	67791
2.	5 - 9	34194	32855	67049
3.	10 - 14	31068	29824	60892
4.	15 - 19	28267	27579	55846
5.	20 - 24	31210	30451	61661
6.	25 - 29	13671	13339	27010
7.	30 - 34	12334	12033	24367
8.	35 - 39	11895	11606	23501
9.	40 - 44	10946	11681	22627
10.	45 - 49	10363	10110	20473
11.	50 - 54	8246	8547	16793
12.	55 - 59	8028	8332	16360
13.	60 - 64	4719	4604	9323
14.	65 ke atas	3283	3631	6914
Jumlah		243261	237346	480607

Penduduk Kampung Pemancungan Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 1982.

No.	Jenis Pendidikan	Jumlah penduduk	Persentase (%)
1.	S.D.	1.563 orang	68,55
2.	SMTP	40 orang	1,75
3.	SMTA	30 orang	1,32
4.	Akademi/Perguruan Tinggi	2 orang	0,09
Jumlah		1.635 orang	71,71

DAFTAR SUMBER

A. DAFTAR BACAAN

1. AA. Navis, *Pasar Suraut Pengusaha Pejuang, Otobiografi Hasyim Ning*, Grafiti Pers, Jakarta 1986.
2. Afrizal, *Pedagang Sayuran Dari Daerah Pinggiran Kota Padang*, Skripsi Jurusan Sosiologi Fakultas Sastra Universitas Andalas Padang, Padang, 1986.
3. Azis St. H, et al, *Menggali Hari Jadi Kota Padang*, Padang, 1980.
4. Akira Oki, *Social Change In The West Sumatera Village*, Australian National University, Canberra, 1977.
5. Berita Provinsi Tahun 1954 No. 14, *Himpunan Peraturan Sejarah Pemerintah Kotamadya Padang*, Pemerintah Kotamadya Padang, 1984.
6. Christine Dobbin, *Islamic Revivalism in a Changing Prosent Economy*.
7. DPRD Kotamadya, *Sejarah Hari Lahir Kota Padang*, Padang, 1986.
8. Dinas Kepekerjaan Umum Kodya Padang, *Pertambahan Jalan Di Kota Padang*, Padang, 1985.

9. *Dinas Pasar Kota Madya Padang*, Padang, 1986.
10. Dinas Pariwisata Sumatera Barat, *Peta Sumatera Barat, Padang Dan Bukittinggi*.
11. Direktorat Pembangunan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Barat, *Daftar Monitoring, Tipologi Dan Klasifikasi Tingkat Pembangunan Desa*, Padang, 1982.
12. Elizabeth Graves, *The Ever Victorian Buffalo University of Michigan*, 1971.
13. Hans Dieter Ever, *Sosiologi Perkotaan, LP3ES*, Jakarta, 1982.
14. *Harian Singgalang*, 15 Nopember 1982 No. 2106 Tahun XVI, Padang, 1982.
15. Kementerian Penerangan, *Provinsi Sumatera Tengah*, Jakarta, 1950.
16. Kantor BAPPEDA Padang, *Penyebaran Penduduk Di Kota Padang*, Padang, 1980.
17. *I d e m*, Padang, 1982.
18. Kodam III/L7 Agustus, *Hari Ulang Tahun Kodam III/Agustus ke XVII*, Padang.
19. M.D. Mansoer, Drs, et al, *Sejarah Minangkabau*, Bhratara, Jakarta, 1970.
20. Marnis Nawi, Drs, et al, *Perkampungan Diperkotaan Sebagai Pola Adoptasi Sosial, Kehidupan Diperkampungan Miskin Di Kota Padang*, IDKD Sumatera Barat, Padang, 1982.
21. *Mimbar Departemen Dalam Negeri* No. 3 – 4, Jakarta, 1980.
22. *Padang Dalam Angka Tahun 1979*, TEPPEDA Kota Madya Padang, Padang, 1980.
23. *Padang Statistik 1976*, TEPPEDA Kota Madya Padang.

24. *Padang Statistik Dan Informasi 1970-1974*, TEPEDA Kota Madya Padang.
25. Rusli Amran, *Sumatera Barat Plakat Panjang*, Sinar Harapan, Jakarta, 1985.
26. Idem *Padang Riwayatmu Duku*, Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 1986.
27. Sugiyanto Sugiyoko et al, *Tinjauan Menuju Strategi Pembangunan Perkotaan*, Prisma, Jakarta, 3 April 1976.
28. Tsuyoshi Kato, *Matriliny Migration Envolving Minangkabau Tradition In Indonesia*, Cornell University Press, Ithaca and London, 1982.

B. WAWANCARA

1. *Bachtiar Nurdin*, Kepala Dinas Pasar Kota Madya Padang, Padang, 2 April 1987.
2. *Bustal Dt. Bungsu*, Padang, 22 Juni 1987.
3. *Datuk Mara Indo Bumi*, Seberang Padang, Padang, 12 April 1987.
4. *Dinar*, Ampang Kecamatan Kuranji, Padang, 7 April 1987.
5. *Datuk Suleman*, Padang, 22 Nopember 1986.
6. *Marah Dahler*, Padang, 1 Nopember 1986.
7. *Moh. Ali atau Mak Uniang*, Padang, 15 Oktober 1986.
8. *Nurma Tajab*, Padang, 14 Oktcber 1986.
9. *Nur Suhud Akhir*, Padang, 10 Oktober 1986.
10. S. St. Burhanuddin, Jalan Thamrin Padang, Padang 2 Oktober 1986.
11. *St. Khaidir*, Padang, 2 Oktober 1986.
12. *St. Munir*, Padang, 15 September 1986.
13. *Zainuddin Zen*, Padang, 12 September 1986.

001251.2

G3.3